



PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN TASIKMALAYA



2025



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sampai dengan triwulan I memperlihatkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu penyesuaian pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 28) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 23 Juni 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 23 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 24

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-11
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2024	II-3
2.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Taikmalaya Tahun 2024	II-19
2.3 Evaluasi Pelaksanaan SDG's (<i>Sustainable Developments Goals</i>)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-25
2.4 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-42
2.5 Capaian Penanganan Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-52
2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025	II-58
2.7 Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	II-107
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-18
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	IV-2
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	IV-19
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024.....	II-6
Tabel 2.2	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tasikmalata dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024.....	II-8
Tabel 2.3	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024.....	II-11
Tabel 2.4	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024.....	II-13
Tabel 2.5	Capaian dan Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024	II-20
Tabel 2.6	Indikator SDG's yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai	II-29
Tabel 2.7	Indikator SDG's yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Tercapai.....	II-33
Tabel 2.8	Indikator SDG's yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai.....	II-39
Tabel 2.9	Indikator SDG's yang Tidak Ada Data (NA).....	II-41
Tabel 2.10	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	II-43
Tabel 2.11	8 Aksi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-49
Tabel 2.12	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-52
Tabel 2.13	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	II-68
Tabel 2.14	Realisasi Keuangan Kecamatan Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	II-71
Tabel 2.15	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-76
Tabel 2.16	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	II-77
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (%YoY)	III-3
Tabel 3.2	Laju PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota (ADHK) Tahun 2021-2024.....	III-7
Tabel 3.3	Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2024.....	III-8
Tabel 3.4	PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	III-10
Tabel 3.5	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya (ADHB%) Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-2024	III-12
Tabel 3.6	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III-28
Tabel 3.7	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III-33

Tabel 3.8	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD 2025.....	III-37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	IV-15
Tabel 4.2	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	IV-23
Tabel 4.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	IV-44
Tabel 4.4	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025	IV-59
Tabel 4.5	Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-85
Tabel 4.6	Program Dukungan terhadap Pencapaian SDG's Tahun 2025.....	IV-93
Tabel 4.7	Program Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024	IV-102
Tabel 4.8	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-105
Tabel 4.9	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap Prioritas Nasional/Asta Cita Tahun 2025	IV-113
Tabel 4.10	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025.....	IV-130
Tabel 5.1	Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta Sasaran Pembangunan dan Pagu Indikatif	V-1
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-12
Tabel 6.1	Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025..	VI-4
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023-2025.....	VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I-9
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-4
Gambar 2.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-5
Gambar 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-7
Gambar 2.4	Perbandingan TPT Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-8
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-10
Gambar 2.6	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-11
Gambar 2.7	Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-14
Gambar 2.8	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-14
Gambar 2.9	PDRB Per Kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-16
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-17
Gambar 2.11	Perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-17
Gambar 2.12	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	II-65
Gambar 2.13	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tahun 2025	II-66
Gambar 2.14	Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	II-70
Gambar 2.15	Realisasi Keuangan Kecamatan.....	II-73
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulanan	III-5
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Komponen Pengeluaran (%).....	III-5
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)	III-6
Gambar 3.4	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat 2015-2024.....	III-11
Gambar 3.5	Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2024.....	III-14
Gambar 3.6	Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024.....	III-15
Gambar 3.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024	III-16
Gambar 3.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024.....	III-17
Gambar 3.9	Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024	III-18

Gambar 4.1	Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045.....	IV-3
Gambar 4.2	Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers).....	IV-4
Gambar 4.3	Prioritas Nasional Tahun 2025.....	IV-6
Gambar 4.4	Tantangan Multi Dimensi RKP 2025	IV-6
Gambar 4.5	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Pendidikan”	IV-53
Gambar 4.6	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting”	IV-54
Gambar 4.7	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi”..	IV-54
Gambar 4.8	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Mitigasi dan Penanggulangan Bencana”	IV-55
Gambar 4.9	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem”	IV-55
Gambar 4.10	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan”	IV-65
Gambar 4.11	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro”	IV-65
Gambar 4.12	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Inovasi Pelayanan Publik”	IV-66
Gambar 4.13	Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Kemandirian Desa”	IV-66

BAB



PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029. Dikarenakan pada saat penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, maka dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 masih menggunakan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026, meskipun untuk kepala daerah terpilih periode 2025-2030 sudah memiliki visi yaitu “Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil dan Makmur”.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terjadi karena adanya beberapa hal yang mendasar diantaranya adalah:

- a. Menyinergikan program asta cita presiden dan wakil presiden periode 2024-2029;
- b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2025;
- c. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, target kinerja kegiatan serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.

- d. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 oleh BPK yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;
- e. Perubahan pagu program/kegiatan/sub kegiatan; dan
- f. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025, landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Daerah Nomor 262);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044; dan
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

Sumber: Bappenas, 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 triwulan I.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), serta dasar penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II	EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

BAB

II

**EVALUASI HASIL RKPD
SAMPAI TRIWULAN I
TAHUN 2025**



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 merupakan tahun kelima penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, untuk mewujudkan visi pembangunan “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”, yang dijabarkan melalui 4 (empat) misi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024, dan mengambil tema “Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, serta mempedomani program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Selain itu, penyusunan RKPD ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang mencakup seluruh tahapan mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, hingga Musrenbang Tingkat Kabupaten. Seluruh proses penyusunan dilakukan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah yang harus didukung oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, karena disusun berdasarkan isu strategis serta memuat janji Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun yang menjadi prioritas pembangunan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya untuk Tahun 2025, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemandirian Desa

Seiring dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Langkah ini penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang kemudian dijabarkan dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini dilakukan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 untuk menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke dalam perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025. Pemerintah Daerah perlu segera menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan 1, serta menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan nasional dan visi-misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun berjalan, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, karena capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada sebagian besar Perangkat Daerah masih berada pada kategori rendah. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi capaian ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD tahun 2025.

Sesuai amanat pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2025.

2.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2024

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) yang mencerminkan hasil dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial. Indikator ini bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

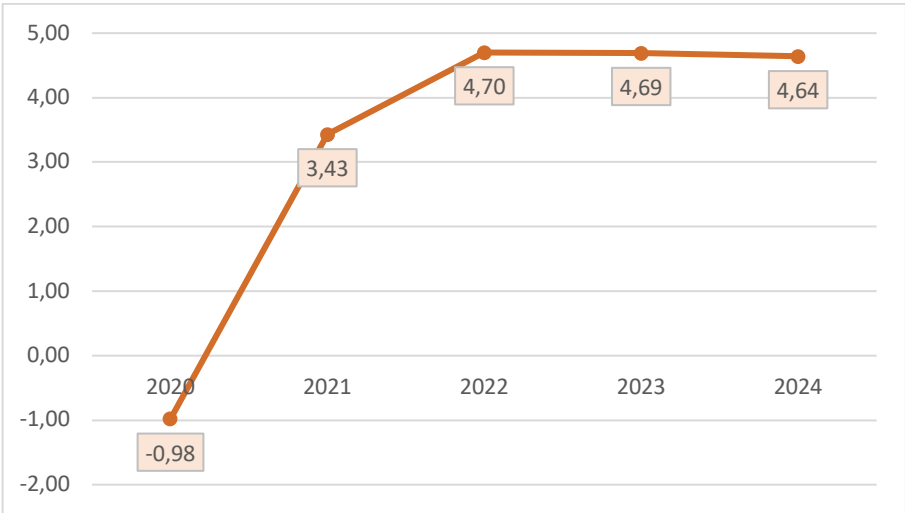
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Penetapan indikator kinerja makro Kabupaten Tasikmalaya meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Ketimpangan (*Gini Ratio*), PDRB Per Kapita, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selanjutnya untuk mengetahui gambaran capaian kinerja makro Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dijelaskan melalui tabel dan grafik untuk masing-masing indikator.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

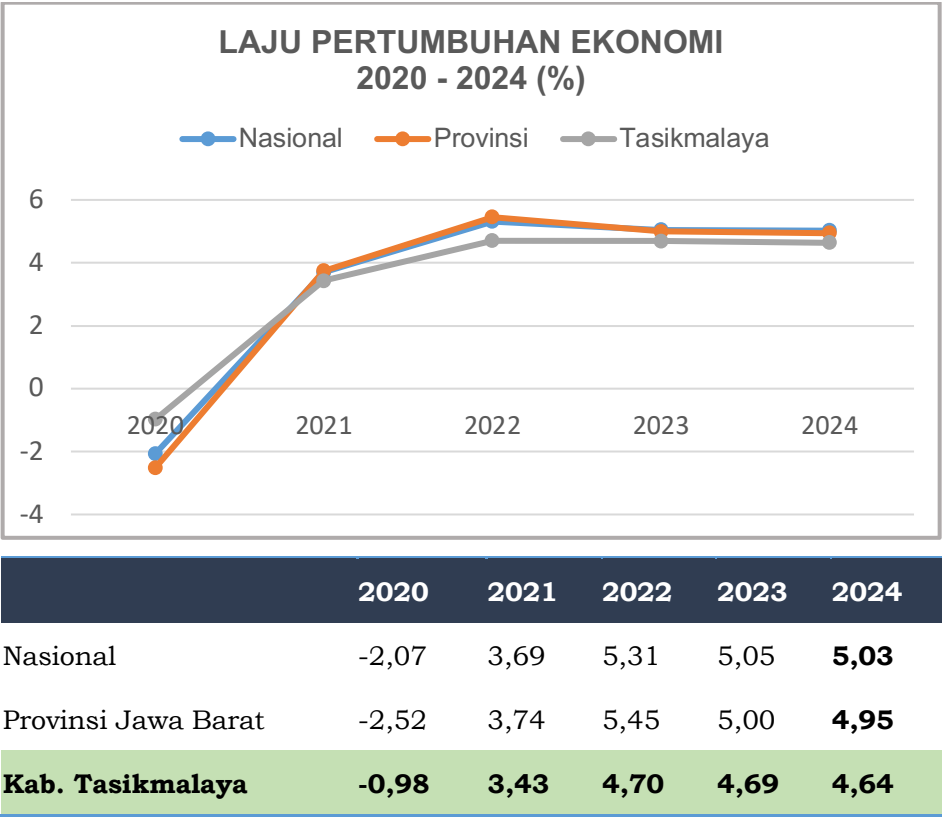
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Besaran laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun bersangkutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020-2024.



Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuasi selama Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020, terjadi kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, mulai Tahun 2021, kondisi ekonomi berangsur pulih yang ditandai dengan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,43%, yang didorong oleh kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat, provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Tren positif ini berlanjut pada 2022 dan 2023 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,70% dan 4,69%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada Tahun 2024 menjadi 4,64%, secara umum perekonomian Kabupaten Tasikmalaya berada dalam kondisi yang stabil.



Gambar 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Selama periode 2021-2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikutnya adalah tabel perbandingan dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar
Tahun 2022-2024

Keterangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	5,08	4,94	4,95
Kabupaten Tasikmalaya	4,70	4,69	4,64
Kabupaten Ciamis	5,02	4,99	4,97
Kabupaten Pangandaran	5,03	5,26	5,12
Kota Tasikmalaya	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	4,29	4,71	5,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pengembangan destinasi wisata lokal, pemberian kemudahan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui program MTU (Mitra Terampil Usaha) dan BLK (Balai Latihan Kerja), serta pembangunan pusat layanan terpadu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya, memberikan dukungan bagi pelaku usaha, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta memperluas peluang bisnis.

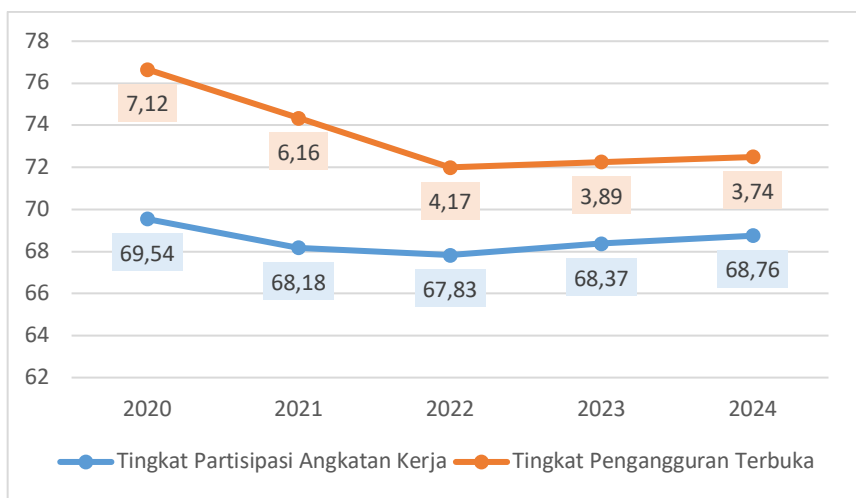
Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah perlu terus mendorong sektor-sektor ekonomi potensial, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan menjalankan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

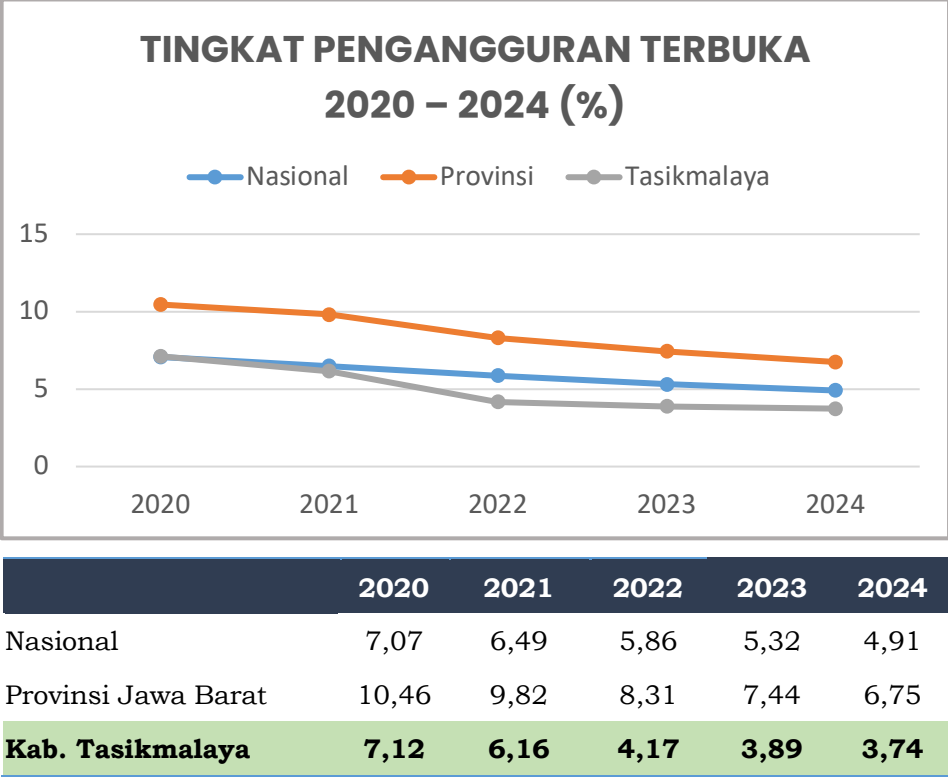
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Definisi ini mengacu pada rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran.

Jumlah angkatan kerja secara alamiah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan penambahan penduduk usia kerja (diatas 15 tahun) dan kecenderungan individu yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki pasar kerja. Namun, fokus utama dalam pengukuran TPT pada variabel jumlah pengangguran. Yang termasuk daam kategori pengangguran meliputi mereka yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat upah, dan tingkat inflasi. Berikut adalah gambar yang menjelaskan perkembangan TPT dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024, serta perbandingannya dengan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
 Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



Gambar 2.4
Perbandingan TPT Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 3,74%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikut adalah tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.2
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	TPT (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	7,60	7,33	6,96
Kabupaten Tasikmalaya	4,17	3,89	3,74
Kabupaten Ciamis	3,75	3,52	3,37
Kabupaten Pangandaran	1,56	1,52	1,58
Kota Tasikmalaya	6,62	6,55	6,49
Kota Banjar	5,53	5,43	5,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Pada Tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat ketiga terendah dalam TPT di wilayah Priangan, setelah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis. Tingkat pengangguran ini juga merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Mekerja Kabupaten Tasikmalaya memiliki sedikit lapangan usaha skala besar, data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah bekerja, terutama di sektor pertanian, serta UMKM yang turut menyerap Angkatan kerja. Hal ini didukung oleh konsistensi Balai Latihan Kerja (BLK) yang melaksanakan program jemput bola ke desa-desa untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan dari 68,37% pada tahun 2023 sebesar menjadi 68,76% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pencari kerja maupun pekerja aktif.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini melalui penguatan sektor UMKM, penyediaan pelatihan yang relevan, serta penciptaan iklim ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

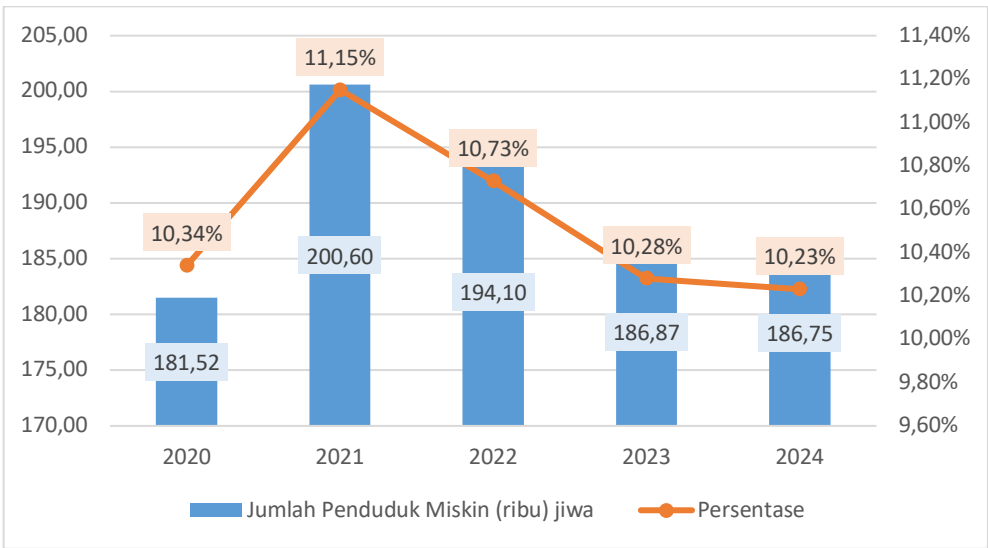
2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah isu kompleks yang menjadi perhatian utama pemerintah karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kondisi kemiskinan dapat menghambat pembangunan manusia, mengingat individu yang hidup dalam kemiskinan umumnya mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan peluang ekonomi.

Dalam pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam konsep ini, kemiskinan didefinisikan

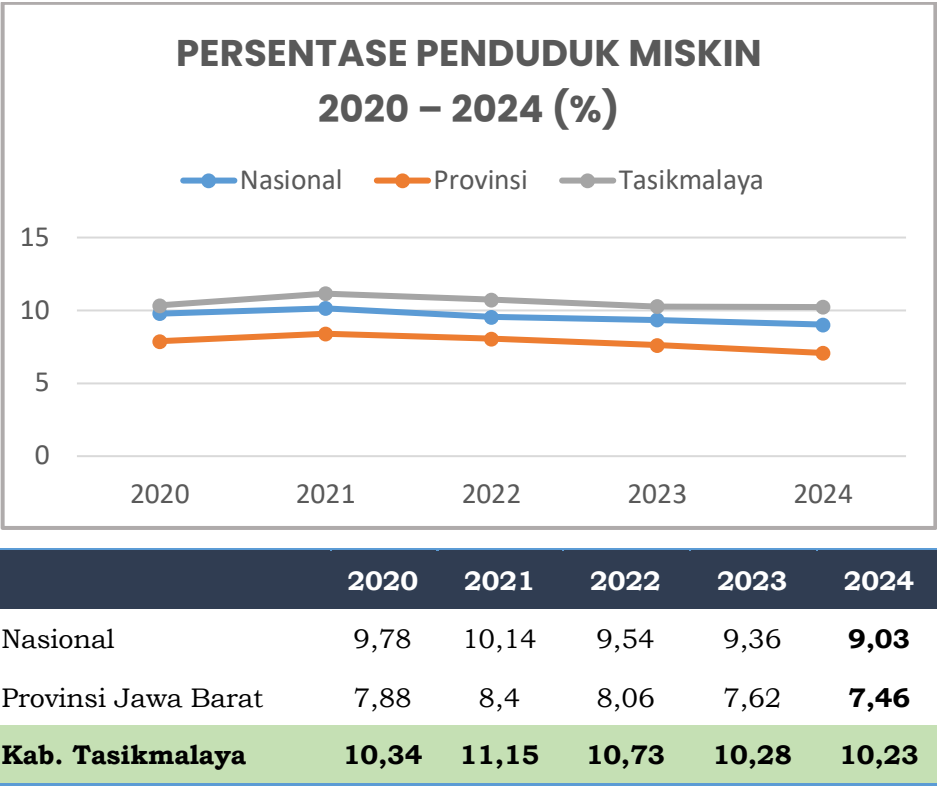
sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan lainnya. Indikator yang digunakan adalah pengeluaran per kapita per bulan, dimana individu yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Di bawah ini adalah gambar yang menyajikan perkembangan persentase penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2020-2024, serta perbandingannya dengan tingkat kemiskinan secara nasional dan di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



Gambar 2.6
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 10,23% pada tahun 2024, angkanya masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh karena itu, dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. Sebagai perbandingan, berikut adalah data persentase penduduk miskin dari kabupaten/kota sekitar.

Tabel 2.3
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	10,42	9,77	9,68
Kabupaten Tasikmalaya	10,73	10,28	10,23
Kabupaten Ciamis	10,42	7,42	7,39
Kabupaten Pangandaran	7,72	8,98	8,75
Kota Tasikmalaya	12,72	11,53	11,10

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)		
	2022	2023	2024
Kota Banjar	6,73	6,14	5,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Secara umum, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan selama Tahun 2020-2024, menunjukkan adanya dampak positif dari pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 sempat menyebabkan kenaikan persentase penduduk miskin menjadi 10,34% pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 11,15% pada 2021, sebelum akhirnya kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga menyangkut dimensi lain yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu tidak hanya fokus pada penurunan angka, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan pengeluaran dan tingkat keparahan kemiskinan.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 050/Kep.240-Bappelitbangda/2022.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang dihadapi antara lain:

1. Data kemiskinan yang tersedia belum terintegrasi dan termutakhirkan. Diperlukan peningkatan dalam sistem pengumpulan, pembaruan, dan integrasi data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang jumlah dan karakteristik penduduk miskin. Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk mendukung perencanaan serta pelaksanaan program yang tepat sasaran.
2. Intervensi program dan kegiatan terhadap sasaran belum optimal. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap program

- dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan guna menilai efektivitasnya. Hal ini penting untuk menentukan intervensi mana yang berhasil dan layak ditingkatkan, serta yang belum efektif dan perlu ditinjau ulang.
3. Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya, yang sebagian besar terdiri dari daerah fisiologi vulkanik dan berbukit, memiliki wilayah dengan kemiringan lahan yang mendukung pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, sementara sisanya sebesar 78,47% memiliki kondisi kemiringan yang kurang mendukung. Kondisi geografis ini menjadikan Kabupaten Tasikmalaya rawan bencana dan menghadapi frekuensi kejadian bencana alam maupun bencana sosial yang tinggi.
 4. Pemenuhan hak dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya terpenuhi.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan.

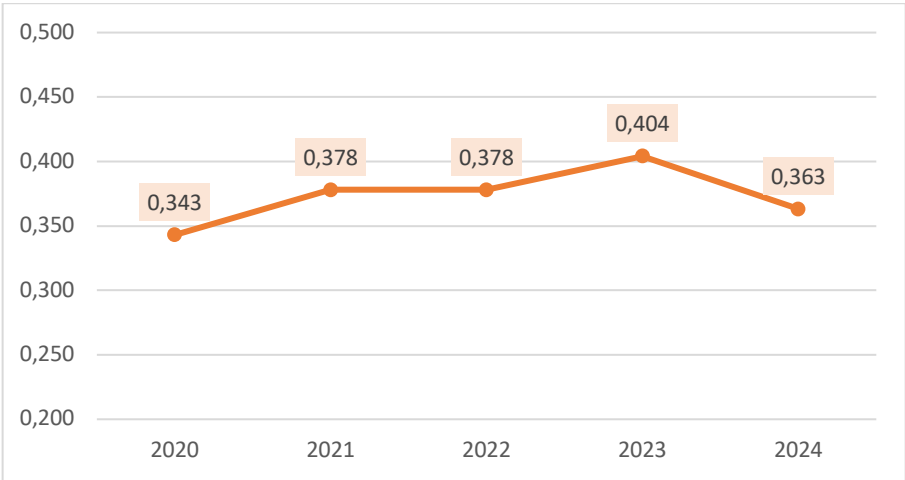
Dengan mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan melaksanakan kebijakan strategis yang efektif, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat memberikan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Ketimpangan (*Gini Ratio*)

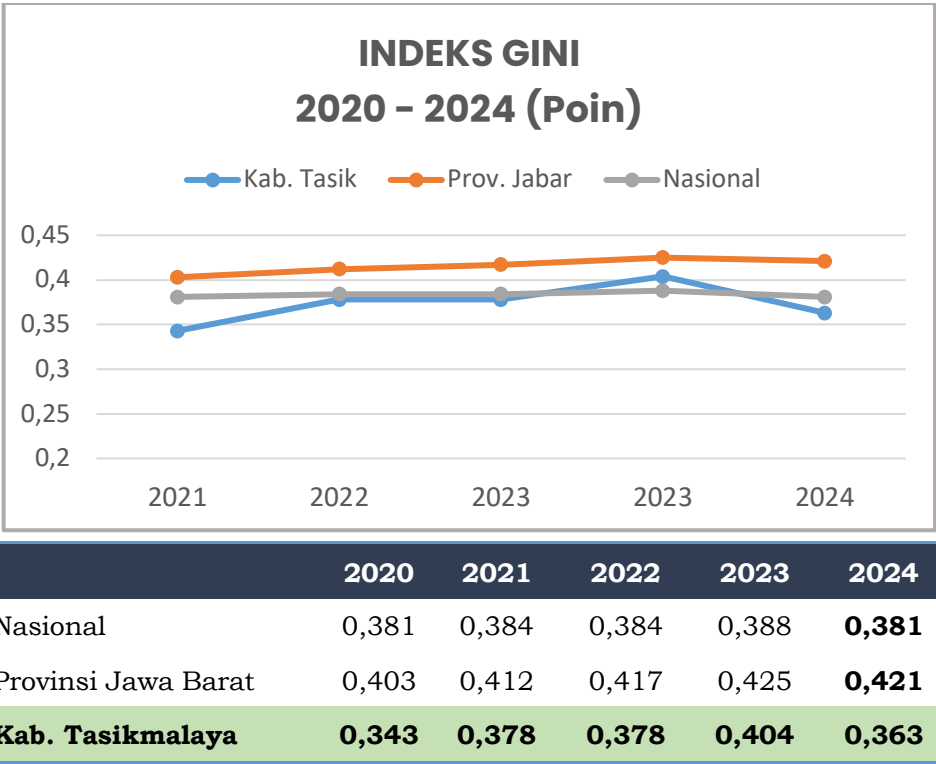
Gini Ratio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai *Gini Ratio* berada dalam rentang antara 0 hingga 1. *Gini Ratio* bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama (tidak ada ketimpangan). Sedangkan *gini ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-

orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Semakin mendekati 0 nilai gini ratio, semakin merata distribui pendapatan suatu wilayah. Adapun kategori Gini Ratio adalah sebagai berikut:

- a) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- b) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- c) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.



Gambar 2.7
Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025



Gambar 2.8
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber : BPS, 2025

Pada Tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya tercatat 0,363 poin, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,404. Meskipun demikian, *Gini Ratio* ini masih berada pada kategori yang sama yaitu SEDANG. Jika dibandingkan, nilai *Gini Ratio* Kabupaten Tasikmalaya lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat, namun masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah provinsi, meskipun masih belum sebaik capaian secara nasional.

Penurunan *Gini Ratio* ini diharapkan menjadi indikator positif dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan serta mendorong daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan strategi pembangunan ekonomi inklusif serta penguatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi diharapkan dapat terus menekan tingkat ketimpangan di Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.5 PDRB Per Kapita

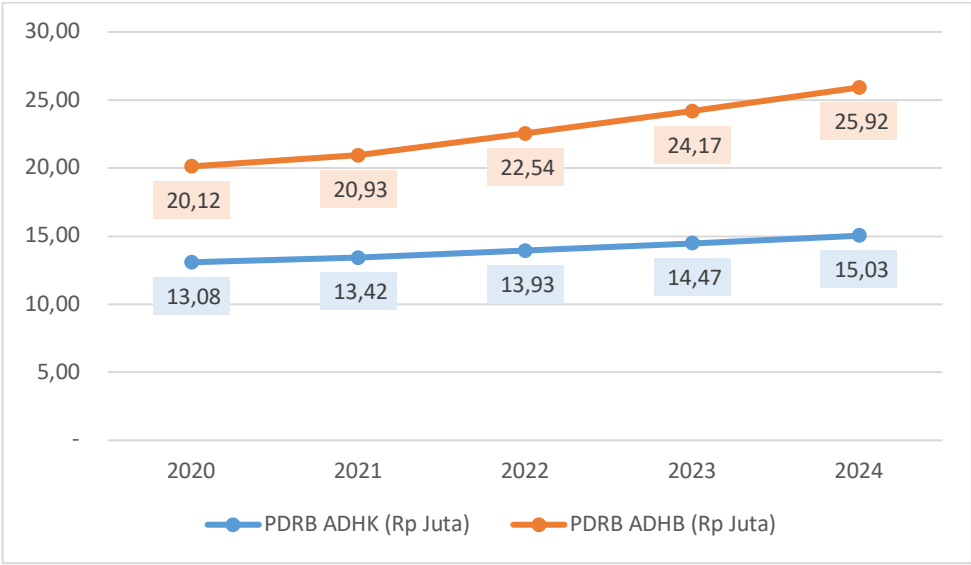
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah dan menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi regional.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 25.916.290, sedangkan PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya atas

dasar harga konstan 2010 (ADHK) mencapai Rp 15.034.290.

Selama tahun 2020-2024, sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Pendidikan. Perkembangan nilai PDRB per Kapita Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



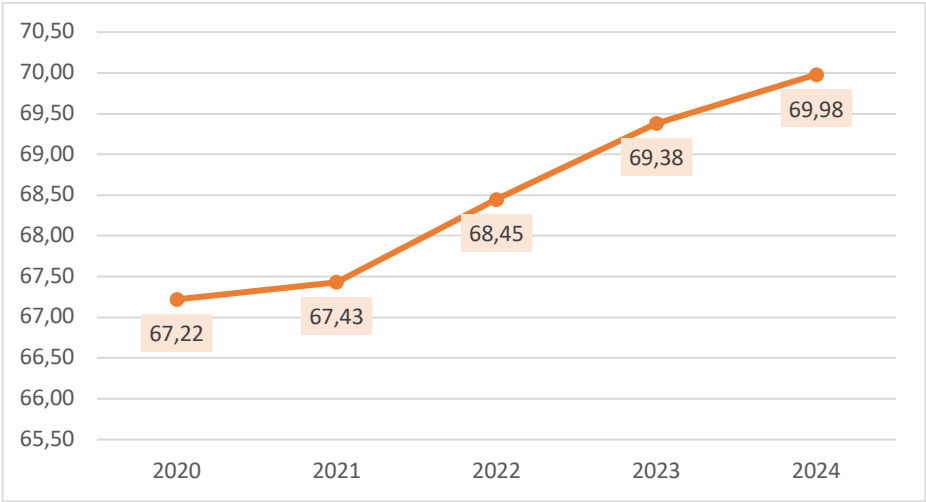
Gambar 2.9
PDRB Per Kapita Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

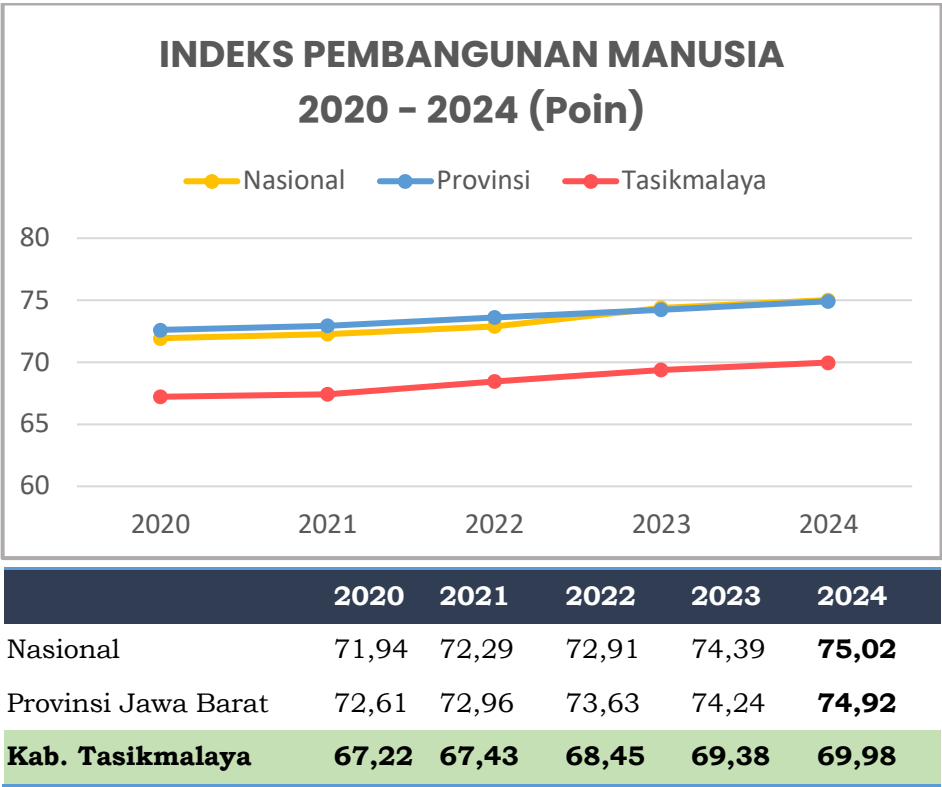
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat. Kriteria pengelompokan IKM adalah sebagai berikut:

- IPM <60 : IPM rendah
- 60 ≤ IPM <70 : IPM sedang
- 70 ≤ IPM< 80 : IPM tinggi
- IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi



Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2025



Gambar 2.11
Perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, capaian IPM Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 menempati posisi yang relatif lebih rendah, meskipun masih berada di atas

Kabupaten Garut. Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya mencatat IPM yang lebih tinggi, bahkan telah masuk dalam kategori tinggi. Berikutnya adalah tabel perbandingan IPM Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar.

Tabel 2.4
Perbandingan Indeks Pembangunan Manudia Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	IPM (Poin)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Garut	68,51	69,22	69,91
Kabupaten Tasikmalaya	68,45	69,38	69,98
Kabupaten Ciamis	72,52	73,12	73,64
Kabupaten Pangandaran	70,21	70,57	71,03
Kota Tasikmalaya	74,84	75,47	76,03
Kota Banjar	73,93	74,45	75,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Selama lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Tasikmalaya mencapai 69,98 poin dengan kategori SEDANG, naik sebesar 0,60 poin dari tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 69,38. Meskipun belum mencapai kategori tinggi, posisi ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam meningkatkan capaian IPM, perlu meningkatkan capaian pada faktor atau variabel pembentuk yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Pengeluaran per Kapita, serta melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pada ketiga variabel di Kabupaten Tasikmalaya.

Capaian indeks pendidikan pada tahun 2024 adalah sebesar 61,68 poin. Peningkatan indeks pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan di sektor pendidikan yang berdampak langsung terhadap kedua indikator tersebut.

Kemudian, capaian indeks kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

tahun 2024 sebesar 83,17 poin. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain masih tingginya jumlah kematian bayi yang berkontribusi pada tingginya rasio kematian bayi, angka kematian ibu yang masih cukup tinggi, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta angka stunting yang masih menjadi isu nasional. Selain itu, belum adanya pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, keterbatasan dan distribusi tenaga Kesehatan tidak merata, rasio jumlah RS dengan jumlah penduduk.

Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 8.965.000 per tahun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 8.562.000 per tahun. Peningkatan ini menunjukkan membaiknya daya beli masyarakat dan menjadi sinyal positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan alat ukur yang menggambarkan sejauhmana Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan secara berjenjang dalam rencana tahunan atau RKPD melalui program dan kegiatan dengan menetapkan target yang didasarkan data akurat.

Pada tabel berikut ditampilkan Capaian Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2021-2024.

Tabel 2.5
Capaian dan Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			2024		Keterangan	Target 2025
					2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi		
Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.												
T.1 Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat. cerdas. berakhlaq mulia dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	S.1. Meningkatkan derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	Poin	59,31	59,77	60,74	61,62	62,13	61,68	Tidak Tercapai	62,73
		S.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	76,11	76,42	76,85	82,88	83,00	83,17	Tercapai	83,58
		S.3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	66,68	68,04	68,04	68,22	68,61	70,21	Tercapai	68,65
		S.4. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	NA	20,72	23,68	35,82	39,22	41,42	Tercapai	39,32
		S.5 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,02	86,42	86,64	87,47	87,50	87,64	Tercapai	87,82
			Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	550,65 (Menuju Madya)	579,60 (Menuju Madya)	575 * (Menuju Madya)	595 (Menuju Madya}	595 (Menuju Madya}	Belum Rilis	615 (Menuju Madya)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			2024		Keterangan	Target 2025
					2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi		
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.												
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	Skor	3,31 (Sedang)	3,34 (Sedang)	3,55 (Sedang)	3,38* (Sedang)	3,40 (Sedang)	3,40* (Sedang)	Belum Rilis	3,42 (Tinggi)
			Nilai SAKIP	Skor	B	62,89 (B)	63,41 (B)	64,20 (B)	64,25 (B)	64,80 (B)	Tercapai	64,30 (B)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,9	80,48	81	81,72	81,75	82,48	Tercapai	81,80 (Baik)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	59,06	66,489	78,019	70,144	79	84,007	Tercapai	70,50
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56,73	57,117	55,85	71,32	71,80	80,02	Tercapai	72,30
			Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	45 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)	51 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)	Tidak Tercapai	52 (Inovatif)
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			2024		Keterangan	Target 2025
					2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi		
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	21,33	20,86	22,38	24,17	25,99	25,92	Tidak Tercapai	26,40
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.												
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	141.219 Juta	-93,91%	2360,20 %	110,96 %	4%	-48,85%	Tidak Tercapai	5%
						8.599 Juta	211.553 juta	446.296 Juta		228.279 Juta		

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2024, dari 8 (delapan) sasaran dan 14 (empat belas) indikator sasaran masih terdapat angka sementara dan dalam proses perhitungan atau belum rilis. Terdapat 4 (empat) IKU yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Indeks Pendidikan

Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 sebesar 61,68, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,62. Namun, angka ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 62,13.

Hal ini berkaitan erat dengan masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS pada tahun 2024 tercatat 12,64 sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 12,63. HLS yang masih rendah mencerminkan keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak, terutama di daerah pedesaan, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendorong anak-anak untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.

Sementara itu, RLS pada tahun 2024 sebesar 7,97 menunjukkan bahwa banyak penduduk usia 15 tahun ke atas belum menyelesaikan jenjang pendidikan yang cukup, yang mengindikasikan masih tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi, sosial, dan minimnya fasilitas pendidikan.

Karena HLS dan RLS merupakan komponen utama dalam perhitungan Indeks Pendidikan, nilai yang rendah pada kedua indikator ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indeks pendidikan yang belum optimal. Untuk meningkatkan indeks pendidikan, perlu dilakukan upaya seperti perluasan akses sekolah, program beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta dukungan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah.

2. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebesar 47,59, masih dibawah target sebesar 51. Meskipun demikian, capaian ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

yang sebesar 43,12. Aspek penilain Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 8 variabel meliputi institusi, sumber daya manusia, ekosistem inovasi, kajian infrastruktur, *output* pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, jumlah inovasi dan hasil kreatif.

Dari 8 variabel tersebut, jumlah inovasi yang dikirimkan oleh Kabupaten Tasikmalaya masih belum memenuhi standar jumlah yang ditetapkan, sehingga berdampak pada nilai indeks inovasi secara keseluruhan.

3. PDRB Perkapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 hanya terealisasi sebesar 25,92 juta rupiah (99,73%) dari target tahun 2024 25,99 juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu permodalan dan infrastruktur yang dapat membatasi perkembangan sektor-sektor ekonomi utama di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sektor utama PDRB Kabupaten Tasikmalaya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sehingga cukup bergantung pada sektor tersebut;
- c. Tingkat investasi di Kabupaten Tasikmalaya yang masih rendah dalam sektor-sektor kunci seperti industri, pertanian, pariwisata, atau infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan PDRB di Kabupaten Tasikmalaya.

4. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV, nilai realisasi penanaman modal Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah Rp. 228.279.000.000,- dari target Rp. 162.045.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 170,148%. Namun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

mencapai 446.296.000.000, realisasi investasi mengalami penurunan sebesar -48,85%, jauh dari target pertumbuhan investasi tahun 2024 sebesar target 4%.

Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi investasi, belum tersusunnya peraturan daerah Penanaman Modal, belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi, dan belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi diantaranya Mal Pelayanan Publik belum terbangun sesuai yang direncanakan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan SDG's (*Sustainable Developments Goals*)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Amanat pelaksanaan TPB di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan. TPB bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integral dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diturunkan menjadi beberapa indikator sasaran nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, terdapat 319 indikator yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 menjadi 289 indikator. Jumlah indikator dibagi berdasarkan masing-masing kewenangan yang terdiri dari 308 indikator untuk pemerintah pusat, 235 indikator untuk pemerintah provinsi, 220 indikator untuk pemerintah kabupaten, dan 222 indikator untuk pemerintah kota.

Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs, meliputi;

5. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
6. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
7. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
8. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
9. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
10. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
11. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
12. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
13. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
14. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
15. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
16. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
17. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
18. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
19. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
20. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan

untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

21. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Hasil identifikasi dan evaluasi, bahwa dari 17 TPB dan 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 16 TPB dan 213 indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah Kabupaten Tasikmalaya. Satu tujuan yang tidak relevan adalah TPB 14 ekosistem lautan, karena indikator yang menjadi sasaran bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, serta 6 indikator yang tidak relevan dengan Kabupaten Tasikmalaya karena bukan merupakan kewenangan kabupaten, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT), pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah, rasio penggunaan gas rumah tangga, jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga, persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan, jumlah devisa sektor pariwisata, dan Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan karena Kabupaten Tasikmalaya bukan merupakan kawasan perkotaan metropolitan.

Hasil evaluasi terhadap capaian TPB di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat melalui 4 (empat) kategori berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai mencapai 23,94%;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum tercapai sebesar 51,17%;
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan tercapai sebesar 5,635;
4. Indikator TPB yang tidak ada data (NA) sebesar 19,25%

Beberapa indikator yang belum tercapai dapat diindikasikan adanya indikator baru yang belum pernah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau belum menjadi fokus utama sebagian perangkat daerah. Untuk indikator yang tidak ditemukan datanya, dapat diindikasikan kurangnya dokumentasi secara berkala, belum dilakukan pengumpulan data yang memadai, dan/atau terdapat

keterlambatan pemberian data sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Selanjutnya untuk melihat gambaran capaian TPB di kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada 4 (empat) kategori sebagaimana dijelaskan melalui tabel berikut:

a. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai

Tabel 2.6
Indikator SDG's yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai

Target	Kode	Indikator
TPB 1: Tanpa kemiskinan		
Target 1.3	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
Target 1.4	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
Target 1.5	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social
	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
TPB 2: Tanpa kelaparan		
Target 2.2	2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil
	2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Target 2.3	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
Target 2.4	2.4.1*	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera		
Target 3.1	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Target 3.2	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Target 3.3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa
Target 3.4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi
	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri
TPB 4 : Pendidikan Berkualitaas		
Target 4.4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)
Target 4.5	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
TPB 5 : Kesenjaraan Gender		
Target 5.3	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
Target 5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak		
Target 6.2	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Target 6.3	6.3.2.(a)	Kualitas air danau
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
Target 6.4	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri = cakupan pelayanan irigasi
Target 6.5	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		
Target 8.3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin
TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		
Target 9.2	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Juta Rupiah)
TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan		
Target 10.1	10.1.1.(c)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri

TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan		
Target 11.4	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
Target 11.7	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang = penyediaan ruang terbuka hijau
Target 11.b	11.b.2* D	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab		
Target 12.8	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim		
Target 13.1	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
TPB 15 : Ekosistem Daratan		
Target 15.1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan
Target 15.9	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayat

TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh		
Target 16.2	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
Target 16.6	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B (Indeks)
Target 16.7	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Target 16.9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
TPB 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan		
Target 17.1	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik (%)
Target 17.18	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistic
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
Target 17.19	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)

b. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Tercapai

Tabel 2.7
Indikator SDG's yang Sudah Dilaksanakan dan Belum tercapai

Target	Kode	Indikator
TPB 1 : Tanpa Kemiskinan		
Target 1.2	2 1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Target 1.3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (%)
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
Target 1.4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
Target 1.5	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (Orang)
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB
Target 1.a	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
TPB 2 : Tanpa Kelaparan		
Target 2.1	2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
Target 2.2	2.2.1*	Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera		
Target 3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) (Orang)
Target 3.2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2.(b)	Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
	3.3.2.(a)	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
Target 3.3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (Kejadian Malaria per 1000 orang)
	3.3.4.(a)	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
Target 3.4	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Target 3.5	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir
Target 3.7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
Target 3.8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)
Target 3.9	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan
Target 3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Target 3.c	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (%)

TPB 4 : Pendidikan Berkualitas

Target 4.1	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.
	4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun
Target 4.2	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Target 4.3	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
Target 4.c	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik
TPB 5 : Kesetaraan Gender		
Target 5.2	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
Target 5.3	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.
Target 5.5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
Target 5.6	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)
Target 5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak		
Target 6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
Target 6.2	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Target 6.3	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau		
Target 7.1	7.1.1*	Rasio elektrifikasi
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita
TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		
Target 8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita
	8.1.1.(a)	PDB per kapita

Target 8.3	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
Target 8.5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja (Rp)
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (%)
Target 8.6	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (%)
Target 8.9	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		
Target 9.1	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional (jalan kabupaten)
Target 9.2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita
Target 9.c	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan		
Target 10.1	10.1.1*	Rasio Gini (%)
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Target 10.4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (%)
TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan		
Target 11.1	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
Target 11.5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (orang)
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Target 11.6	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani = sampah terangkut ke TPSA
	11.6.2*	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)
TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab		
Target 12.6	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya
Target 13.1	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (orang)
TPB 15 : Ekosistem Daratan		
Target 15.3	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh		
Target 16.1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
Target 16.2	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
Target 16.3	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan non-litigasi (kasus)
Target 16.5	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Target 16.7	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (%)
TPB 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan		
Target 17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (%)
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (%)
Target 17.19	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

c. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai (BB)

Tabel 2.8
Indikator SDG's yang Belum Dilaksanakan dan Belum tercapai

Target	Kode	Indikator
TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera		
Target 3.5	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba
Target 3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun
TPB 4 : Pendidikan Berkualitas		
Target 4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi
TPB 5 : Kesenjangan Gender		
Target 5.1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
Target 5.2	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
Target 5.6	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi
TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak		
Target 6.2	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
Target 6.5	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air

TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		
Target 8.2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
Target 8.10	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		
Target 9.2	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
Target 9.3	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
Target 9.5	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
Target 9.c	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
	9.c.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet (pengakses)
TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan		
Target 10.1	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
Target 10.2	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas
Target 10.3	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan		
Target 11.3	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur
TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab		
Target 12.4	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
Target 12.5	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
Target 12.6	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

TPB 15 : Ekosistem Daratan		
Target 15.2	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya
	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan
TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh		
Target 16.1.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

d. Indikator TPB yang Tidak Ada Data (NA)

Tabel 2.9
Indikator SDG's yang Tidak Ada Data (NA)

Target	Kode	Indikator
TPB 4 : Pendidikan Berkualitas		
Target 4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2025 - 2045 426 Target Kode Indikator fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
TPB 5 : Kesenjangan Gender		
Target 5.3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
Target 5.6	5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

2.4 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
1	Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	99,79%	
			Pendidikan Kesetaraan			
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	14,78%	
			Pendidikan Usia Dini			
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	83,59%	Dinas Kesehatan
2	Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	96,45%	
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	99,10%	
			Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,66%	
			Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	98,22%	

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,30%	
			Jumlah warga negara usia produktif (15 – 59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	
			Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,59%	
			Jumlah warga penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,20%	
			Jumlah warga penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	
			Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	94,83%	
			Jumlah warga terduga yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	97,50%	
			Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,84%	
3	Bidang Pekerjaan Umum	Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air minum	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	
		Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air limbah	Penyediaan pengolahan air limbah domestik			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	100%	

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	100%	
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	99,64%	
			Standar operasional Prosedur Satpol PP	100%	100%	
			Standar sarana prasarana Satpol PP	100%	100%	
			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100%	89,18%	
			Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%	
	Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Badan Penanggulanga n Bencana Daerah

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyelamatan Non Kebakaran				
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	
		Program tanggap dan penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	
6	Bidang Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial			Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	
		3. Program Penanganan Bencana	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuha dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%	

No	Urusan	Program	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian	Target 2024	Capaian 2024	Perangkat Daerah
			Persentase anak (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%	
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan pengemis di luar panti	100%	100%	
			Persentase % gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota			
			Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	100%	100%	
			Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			

2.5 Capaian Penanganan Stunting Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaannya dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.28.Dinsos, PPKB,P3A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang akan memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam percepatan penurunan stunting.

Untuk terwujudnya percepatan penurunan stunting telah ditetapkan strategi percepatan penurunan stunting yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku Kepentingan dengan sasaran tujuan untuk:

1. Menurunkan Prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Mmperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Terdapat 8 Aksi pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang harus di lakukan oleh Kabupaten/Kota. Dalam Pelaksanaannya harus terintegrasi dan membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor, agar program kegiatan intervensi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh keluarga sasaran rumah tangga khususnya pada kelompok usai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berikut adalah 8 aksi pelaksanaan intervensi penurunan stunting Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.11
8 Aksi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Kegiatan	Hasil
Aksi 1 (Analisis Situasi)	Rapat Koordinasi Pembahasan Analisis dan Situasi Penanganan Stunting dengan hasil Penetapan Desa Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KS.04/Kep.178-Kesra/2023, yang menetapkan 60 Desa Lokus Tahun 2024 yang tersebar di 24 Kecamatan.
Aksi 2 (Rencana Kegiatan)	Rencana Tahun 2024: Jumlah Sub Kegiatan 41, dengan total anggaran 202.608.849.600.
Aksi 3 (Rembuk Stunting)	Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penerima layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan lembaga. - Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 di Aula Puskesmas Cikatomas yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah dengan penandatanganan Berita Acara serta

Kegiatan	Hasil
	Komitmen dan Kesepakatan Bersama. - Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam bentuk Mini Lokakarya dengan tema Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Salawu dan Kecamatan Sukaratu dengan tema Percepatan Penurunan Stunting. - Rembuk Stunting Tingkat Desa Tahun 2024 telah dilaksanakan di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Aksi 4 (Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting))	Sosialisasi Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta regulasi/kebijakan lain yang mendukung terhadap Percepatan Penurunan Stunting.
Aksi 5 (Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan)	- Adanya Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa); - Setiap pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa) memiliki rencana kerja; - Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan pelaku dan pemerintahan desa (KPM, TPK, TPPS Desa & Kelembagaan Masyarakat Desa) tentang Penanganan Stunting dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis.
Aksi 6 (Sistem Manajemen Data Stunting)	- Perbaikan Manajemen Data, dengan hasil data terkait stunting yang lengkap dan akurat; dan - Rapat Koordinasi Analisis dan Perencanaan Perbaikan ketersediaan Data Penanganan Stunting dengan hasil analisa data dan perencanaan terkait penanganan stunting.
Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting)	- Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (BPB) dilakukan secara serempak melibatkan semua instansi

Kegiatan	Hasil
	pemerintahan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya; – Publikasi data stunting melalui pertemuan di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Desember 2024 dengan sasaran Kepala Puskesmas dan Tenaga Pelaksana Gizi; – Publikasi Stunting melalui Media Elektronik (<i>Instagram dan Facebook</i>); – Audit Kasus Stunting (AKS) dilakukan 2 kali pada tahun 2024. – Penyebaran AKS I di 1 (satu) desa yaitu Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa dengan sebaran sasaran sebagai berikut: • Calon Pengantin sebanyak 2 Orang; • Ibu Hamil sebanyak 3 Orang; • Ibu Nifas/Pasca Persalinan sebanyak 3 Orang; • Bayi Dibawah Usia Lima Tahun sebanyak 3 Orang. – Penyebaran AKS II di 1 (satu) desa yaitu Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna dengan sebaran sasaran sebagai berikut: • Calon Pengantin sebanyak 2 Orang; • Ibu Hamil sebanyak 3 Orang; • Ibu Nifas/Pasca Persalinan sebanyak 3 Orang; • Bayi Dibawah Usia Lima Tahun sebanyak 3 Orang.
Aksi 8 (Reviu Kinerja Tahunan)	Reviu Kinerja Tahunan Penanganan Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya bersama Perangkat Daerah.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, 2025

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Triwulan I tahun 2025, dapat dijelaskan melalui perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, realisasi keuangan, capaian kinerja program berdasarkan urusan serta capaian kinerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.7.1 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025

Membandingkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan cara untuk melihat sejauhmana konsistensi dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan dengan pelaksanaan, alasan yang mendasarinya dilihat dari RKPD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025, serta hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Berikut disajikan dalam tabel dan gambar.

Tabel 2.12
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
1	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	7	19	122	6	15	60	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 62 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi;
2	Dinas Kesehatan	5	22	74	5	19	65	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD; Terdapat 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan yang tidak mendapatkan

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi;
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	21	35	86	15	24	57	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 6 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	36	2	7	14	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan, dan 22 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	10	26	3	10	20	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada PPAS dan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 6 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
6	Sosial Pengendalian Penduduk KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	31	92	12	26	51	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 5 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
7	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	28	5	11	22	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	33	4	8	21	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6	28	61	5	19	40	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Perindustrian dan Perdagangan	14	21	46	11	16	28	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 program, 5 kegiatan dan 18 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	12	18	34	7	11	21	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 5 program, 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								APBD sebagai dampak efisiensi
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	9	21	47	7	13	21	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	12	30	67	9	16	19	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 program, 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
14	Sekretariat Daerah	6	25	75	6	22	63	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
15	Sekretariat DPRD	2	16	52	2	16	51	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	19	60	5	16	49	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang tidak

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								mendapat anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	13	69	4	13	60	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 9 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	29	3	12	27	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 2 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
19	Inspektorat Daerah	3	11	35	3	11	32	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	13	43	6	10	29	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
JUMLAH		144	378	1115	120	295	750	
21	Kecamatan Cibalong	6	14	29	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
22	Kecamatan Parungponteng	5	12	23	5	9	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
23	Kecamatan Jatiwaras	5	11	19	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan, dan 3 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBDnsebagai dampak efisiensi
24	Kecamatan Salopa	5	11	20	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan, dan 3 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
25	Kecamatan Tanjungjaya	5	9	15	5	9	15	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan APBD telah

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								sesuai dengan RKPD
26	Kecamatan Puspahiang	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD.
27	Kecamatan Sukaraja	5	12	21	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 2 kegiatan, dan sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD
28	Kecamatan Salawu	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD
29	Kecamatan Karangnunggal	6	14	30	5	10	18	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
30	Kecamatan Bantarkalong	6	13	27	5	9	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
31	Kecamatan Cipatujah	5	10	18	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
32	Kecamatan Cikatomas	6	13	29	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada PPAS dan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 3 kegiatan, dan 12 sub kegiatan tidak mendapat anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
33	Kecamatan Taraju	5	11	19	5	10	16	sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
34	Kecamatan Pancatengah	6	14	28	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan, dan 11 sub kegiatan tidak mendapat anggaran dalam APBD sebagai

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								dampak efisiensi
35	Kecamatan Cikalong	6	13	28	5	10	18	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
36	Kecamatan Sodonghilir	5	11	17	5	10	16	- Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
37	Kecamatan Kadipaten	6	14	19	5	13	18	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang tidak mendapat anggaran pada APBD sebagai dampak efisiensi
38	Kecamatan Pagerageung	5	11	18	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
39	Kecamatan Jamanis	5	10	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
40	Kecamatan Rajapolah	5	10	16	5	10	15	-Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD.
41	Kecamatan Ciawi	5	11	20	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
42	Kecamatan Cineam	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD
43	Kecamatan Manonjaya	5	10	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.
44	Kecamatan Bojonggambir	6	13	28	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada

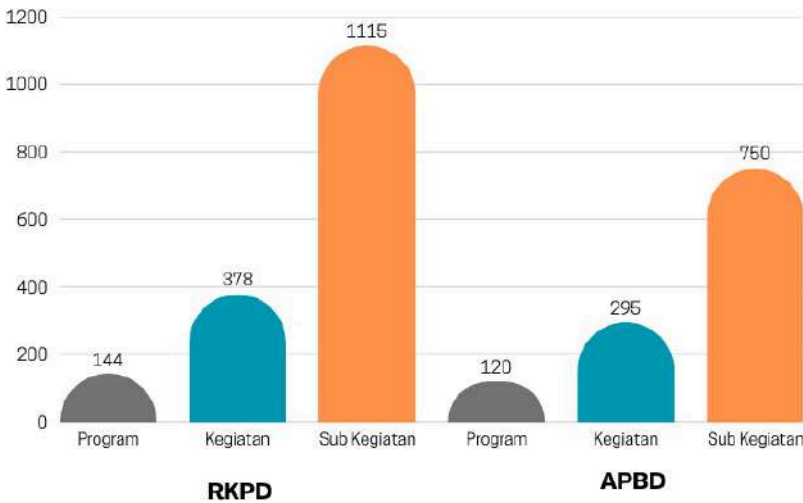
No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
45	Kecamatan Cisayong	5	11	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
46	Kecamatan Sariwangi	5	10	18	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada PPAS dan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
47	Kecamatan Singaparna	5	10	22	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 6 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
48	Kecamatan Sukarame	5	11	24	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 kegiatan dan 7 sub

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
49	Kecamatan Sukahening	6	14	24	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - terdapat 1 program, 4 kegiatan, dan 7 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD Sebagai dampak efisiensi
50	Kecamatan Sukaratu	5	11	20	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. - Terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
51	Kecamatan Cigalontang	5	10	23	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 6 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi.
52	Kecamatan Leuwisari	5	13	23	4	9	14	Sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 4 kegiatan, dan 9 sub kegiatan mendapatkan anggaran dalam APBD.
53	Kecamatan Padakembang	5	11	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.

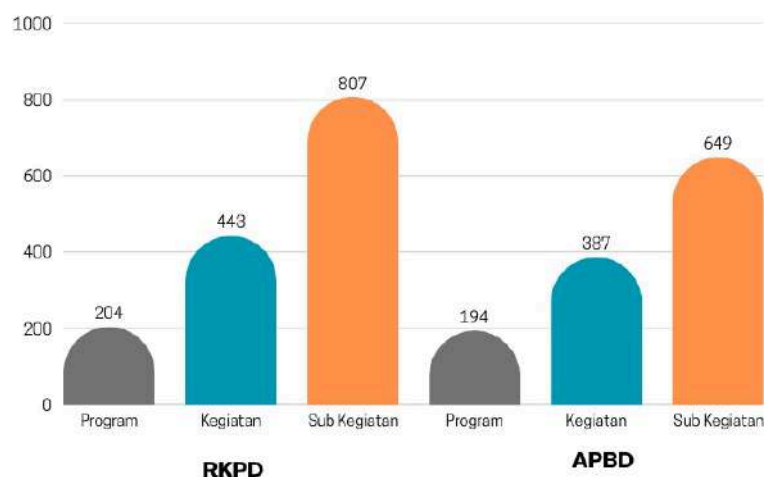
No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								Terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD.
54	Kecamatan Gunungtanjung	5	9	16	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat penambahan 1 kegiatan pada APBD tetapi tidak menambah sub kegiatan
55	Kecamatan karangjaya	5	10	16	5	10	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat penambahan 1 sub kegiatan pada APBD
56	Kecamatan Culamega	5	11	17	5	10	16	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
57	Kecamatan Sukaresik	5	13	23	5	10	19	Program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD
58	Kecamatan Mangunreja	5	11	20	5	8	17	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD.

No	Nama Perangkat Daerah	RKPD			APBD			Ket
		Prog	Keg	Sub Keg	Prog	Keg	Sub Keg	
								Terdapat 3 kegiatan, dan 3 sub kegiatan tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
59	Kecamatan Bojongasih	5	11	22	5	10	19	Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD telah sesuai dan mengacu pada RKPD. Terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD sebagai dampak efisiensi
JUMLAH		204	443	807	194	387	649	
JUMLAH TOTAL		348	821	1922	314	682	1399	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025



Gambar 2.12
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025



Gambar 2.13
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.12 dan Gambar 2.12, 2.13, terdapat pengurangan yang signifikan pada jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam APBD Tahun 2025 untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD tetap mengacu dan selaras dengan RKPD. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Namun demikian, besarnya efisiensi yang harus dilakukan menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi terganggunya pencapaian target kinerja pembangunan Tahun 2025.

Beberapa hal penting terkait hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) oleh sebagian Perangkat Daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Akibatnya, proses pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya menghasilkan informasi yang relevan dan terfokus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;

2. Pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 masih ditemukan sejumlah usulan program, kegiatan, dan subkegiatan dari Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan tidak efektif. Usulan tersebut kurang mempertimbangkan secara optimal kapasitas anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian yang signifikan antara pagu indikatif dalam RKPD dan pagu definitif dalam APBD;

Berkenaan dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa catatan penting, yaitu:

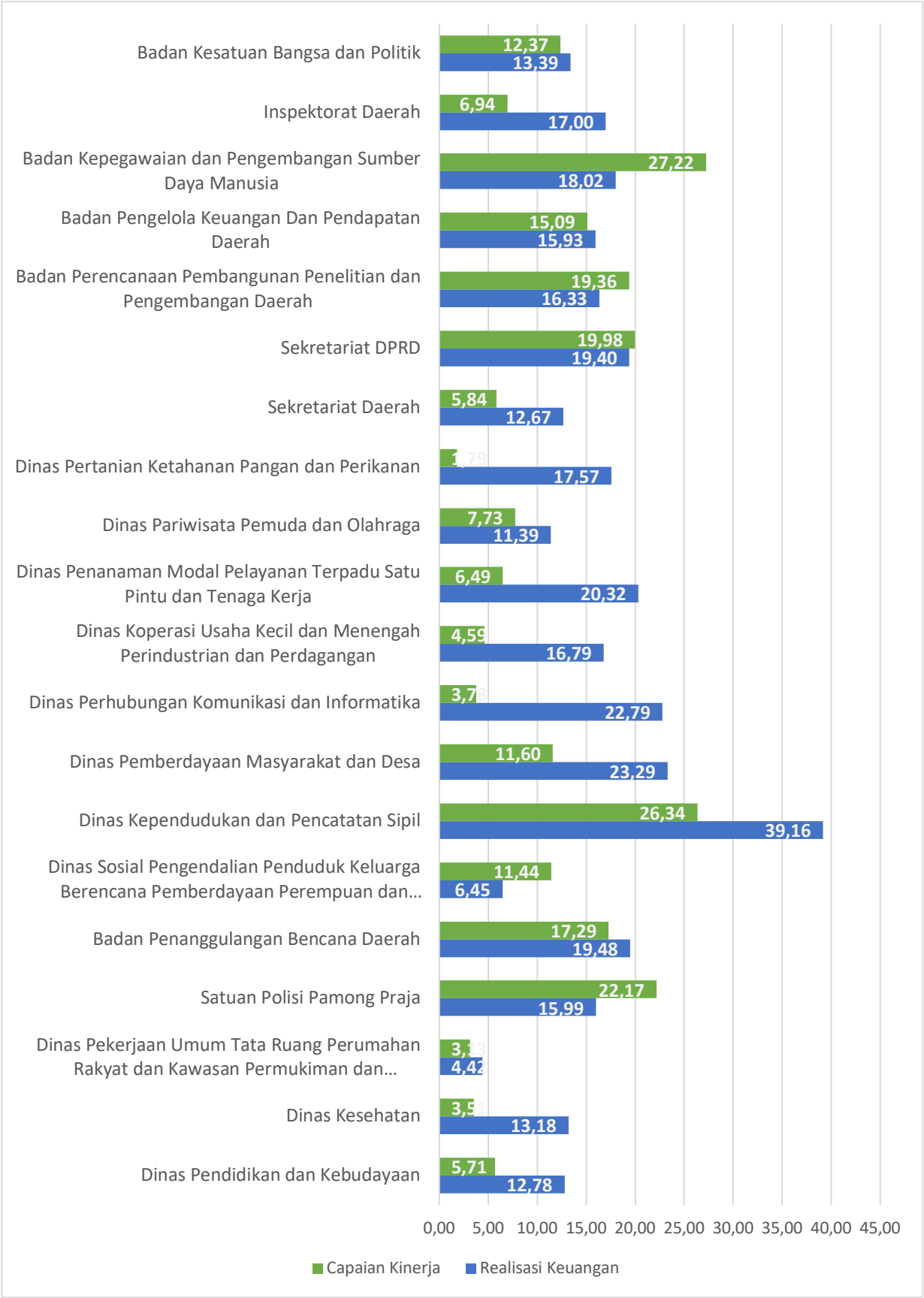
- a. Struktur APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit, disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan transfer antar daerah, sehingga tidak seluruh pagu terakomodir sesuai dengan target yang telah direncanakan;
- b. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, tidak dimungkinkan adanya penambahan anggaran untuk seluruh Perangkat Daerah, kecuali apabila anggaran tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) atau melalui mekanisme pergeseran anggaran antar program, kegiatan, maupun subkegiatan. Perubahan RKPD dapat dilakukan jika sumber biaya lebih, apabila tidak tercapai target pendapatan, maka perlu penyesuaian ketidaktercapaian dengan program/kegiatan;
- c. SILPA Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai target, sehingga tdk dapat digunakan untuk kegiatan lain;

Tabel 2.13
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	RKPD	APBD	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.431.369.198.083	1.338.053.962.616	171.067.922.710	12,78	5,71
2	Dinas Kesehatan	810.176.254.755	510.733.799.655	67.322.011.914	13,18	3,51
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	250.735.656.900	134.416.639.835	5.947.476.057	4,42	3,13
4	Satuan Polisi Pamong Praja	21.853.359.980	22.637.129.894	3.618.902.714	15,99	22,17
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.391.535.059	9.713.438.866	1.892.649.279	19,48	17,29
6	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.126.708.717	40.345.660.951	2.601.008.322	6,45	11,44
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.946.394.167	10.830.347.494	4.241.425.794	39,16	26,34
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.293.895.326	16.705.354.828	3.890.008.336	23,29	11,60
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	46.774.873.317	36.972.173.261	8.426.752.091	22,79	3,78
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	68.042.123.625	13.839.296.893	2.323.653.554	16,79	4,59
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	33.916.650.780	10.165.846.991	2.066.072.084	20,32	6,49
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	39.669.676.820	15.736.537.803	1.792.668.555	11,39	7,73
13	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.109.220.930	68.320.795.315	12.002.467.172	17,57	1,79
14	Sekretariat Daerah	166.405.535.693	112.860.836.183	14.296.430.614	12,67	5,84
15	Sekretariat DPRD	71.460.864.847	59.942.277.262	11.627.063.446	19,40	19,98
16	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.508.848.837	13.686.028.249	2.234.694.017	16,33	19,36

No	Perangkat Daerah	RKPD	APBD	Realisasi	%	
					Rp	Kinerja
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	824.825.192.160	747.795.627.710	119.157.436.032	15,93	15,09
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.311.030.025	14.199.826.041	2.559.368.302	18,02	27,22
19	Inspektorat Daerah	30.842.042.183	16.570.878.953	2.817.234.213	17,00	6,94
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.425.945.467	79.826.173.142	10.687.794.603	13,39	12,37
Total untuk 20 Perangkat Daerah		4.139.185.007.671	3.273.352.631.942	450.573.039.809	13,76	11,62

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025



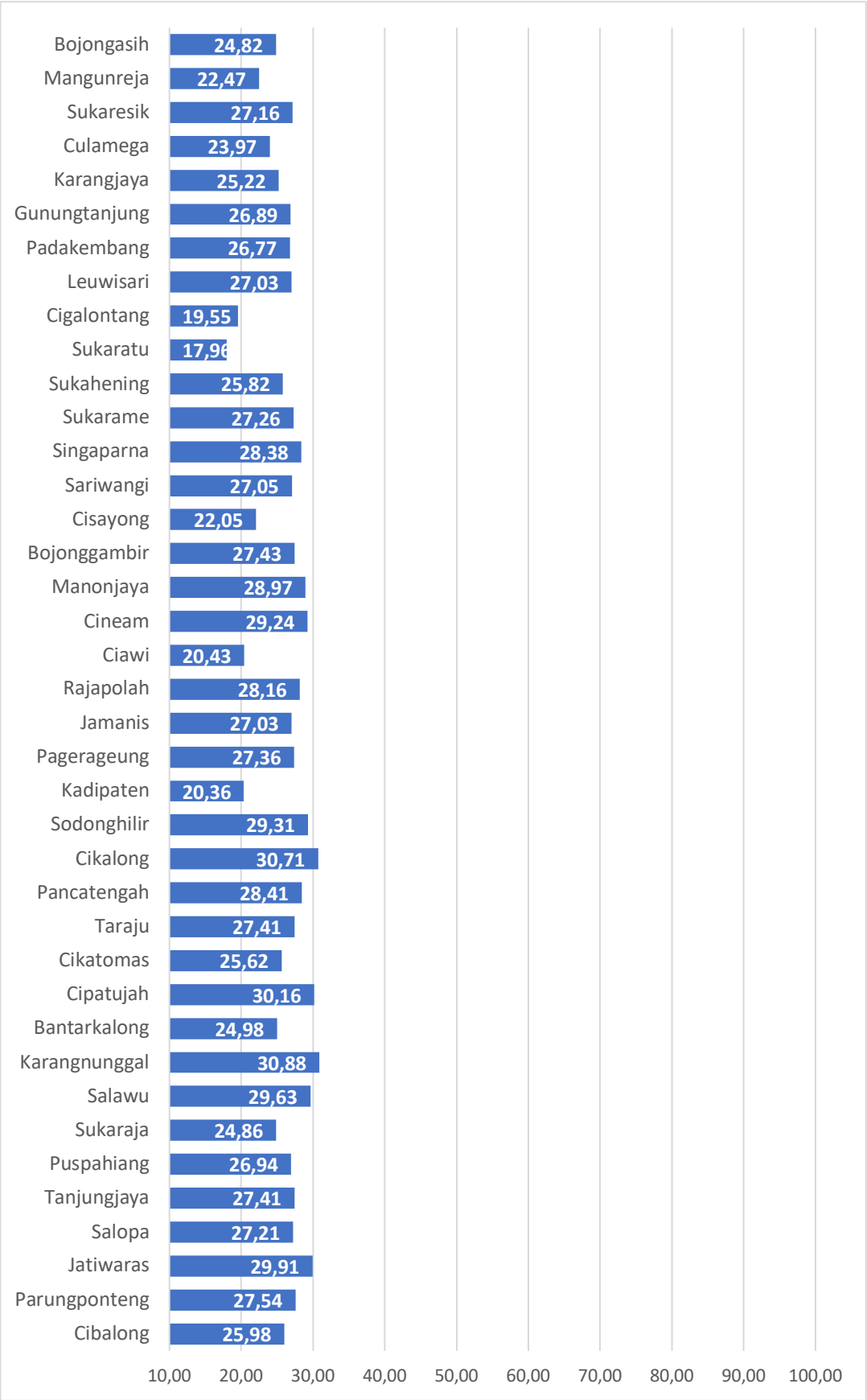
Gambar 2.14
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Tabel 2.14
Realisasi Keuangan Kecamatan Sampai dengan Triwulan I
Tahun Anggaran 2025

No	Kecamatan	RKPD	APBD	Realisasi Keuangan	%
1	Cibalong	2.248.149.410	2.198.868.236	571.306.329	25,98
2	Parungponteng	2.488.399.867	2.016.871.707	555.538.632	27,54
3	Jatiwaras	2.351.081.346	2.134.725.889	638.552.378	29,91
4	Salopa	2.169.826.054	1.861.256.254	506.539.436	27,21
5	Tanjungjaya	1.798.734.458	1.824.394.695	500.037.303	27,41
6	Puspahiang	2.177.246.165	2.006.468.488	540.589.507	26,94
7	Sukaraja	2.358.426.000	1.858.681.644	462.155.037	24,86
8	Salawu	2.301.377.042	2.089.857.989	619.156.629	29,63
9	Karangnunggal	2.749.012.585	2.300.868.847	710.616.369	30,88
10	Bantarkalong	2.363.514.866	2.183.781.326	545.590.906	24,98
11	Cipatujah	2.514.257.925	2.047.409.831	617.533.706	30,16
12	Cikatomas	2.262.595.468	2.110.190.999	540.653.574	25,62
13	Taraju	2.390.822.601	2.140.037.760	586.639.010	27,41
14	Pancatengah	2.422.703.555	1.863.515.694	529.508.828	28,41
15	Cikalong	2.523.763.727	1.952.353.984	599.502.768	30,71
16	Sodonghilir	2.448.226.253	2.104.029.097	616.770.687	29,31
17	Kadipaten	2.326.604.696	2.069.623.896	421.344.317	20,36
18	Pagerageung	2.493.387.957	2.033.181.017	556.367.987	27,36
19	Jamanis	2.094.376.378	1.939.729.601	524.363.810	27,03
20	Rajapolah	2.126.298.000	1.918.051.164	540.125.718	28,16
21	Ciawi	2.580.916.546	2.133.633.966	435.863.002	20,43
22	Cineam	2.070.777.340	2.163.324.068	632.498.093	29,24
23	Manonjaya	2.675.756.426	2.388.237.972	691.814.041	28,97
24	Bojonggambir	2.310.619.000	1.876.398.939	514.728.599	27,43
25	Cisayong	2.865.762.436	2.043.692.301	450.671.414	22,05
26	Sariwangi	2.205.281.464	1.886.201.883	510.158.217	27,05
27	Singaparna	2.486.341.612	2.292.318.228	650.553.127	28,38
28	Sukarame	2.328.174.472	2.058.751.861	561.269.663	27,26
29	Sukahening	2.346.848.243	2.093.923.971	540.569.032	25,82
30	Sukaratu	2.662.079.025	2.041.237.198	366.620.507	17,96
31	Cigalontang	2.549.282.424	2.156.778.857	421.693.634	19,55
32	Leuwisari	2.022.877.546	1.977.930.592	534.656.343	27,03
33	Padakembang	2.341.620.039	2.146.783.165	574.647.566	26,77
34	Gunungtanjung	2.055.224.724	1.999.345.857	537.652.322	26,89

No	Kecamatan	RKPD	APBD	Realisasi Keuangan	%
35	Karangjaya	2.102.738.626	1.866.583.135	470.743.758	25,22
36	Culamega	2.285.299.232	1.952.682.797	468.038.899	23,97
37	Sukaresik	2.356.097.590	1.966.825.943	534.247.154	27,16
38	Mangunreja	2.245.282.204	2.166.262.235	486.841.650	22,47
39	Bojongasih	2.363.931.023	2.178.312.826	540.720.924	24,82
Total 39 Kecamatan		91.463.714.325	80.043.123.912	21.106.880.876	26,37

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025



Gambar 2.15
Realisasi Keuangan Kecamatan
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara pagu RKPD Tahun 2025 dengan pagu APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.230.648.721.996,00 berbanding Rp3.353.395.755.854,00 atau setara dengan 79,26% dari total kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025. Dari total anggaran sebesar Rp3.353.395.755.854,00 tersebut, dialokasikan untuk 20 (dua puluh) Perangkat Daerah dan 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang melaksanakan 314 program, 682 kegiatan, dan 1.399 sub kegiatan. Hingga saat ini, realisasi anggaran telah mencapai Rp471.679.910.685,00 atau sebesar 14,07%.

Secara umum realisasi keuangan pada sebagian besar Perangkat Daerah masih berada di bawah 20%, sedangkan untuk Kecamatan, sebagian besar telah mencapai di atas 30%. Rendahnya capaian realisasi anggaran pada Perangkat Daerah disebabkan oleh beberapa kali pergeseran anggaran yang terjadi selama pelaksanaan. Untuk melihat gambaran persentase penyerapan anggaran untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I masih di bawah 30%, antara lain sebagai berikut :

➤ 30% - ke atas :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 39,16%, Kecamatan Karangnunggal 30,88%, Kecamatan Cikalong 30,70% dan kecamatan Cipatujah 30,16%;

➤ 20%-29% :

DPMPTSP 20,32%, Dinas Perhubungan dan Komunitas dan Informasi 22,79%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23,29%, Kecamatan Bojongasih 24,82%, Kecamatan Mangunreja 22,47%, Kecamatan Sukaresik 27,16%, Kecamatan Culamega 23,97%, Kecamatan Karangjaya 25,22%, Kecamatan Gunungtanjung 26,89%, Kecamatan Padakembang 26,77%, Kecamatan Leuwisari 27,03%, Kecamatan Sukahening 25,82%, Kecamatan Sukarame 27,26%, Kecamatan Singaparna 28,38%, Kecamatan Sariwangi 27,05%, Kecamatan Cisayong 22,05%, Kecamatan Bojonggambir 27,43%, Kecamatan Manonjaya 28,97%, Kecamatan Cineam 29,24%, Kecamatan Ciawi 20,43%, Kecamatan

Rajapolah 28,16%, Kecamatan Jamanis 27,03%, Kecamatan Pagerageung 27,36%, Kecamatan kadipaten 20,36%, Kecamatan Sodonghilir 29,31%, Kecamatan Pancatengah 28,41%, Kecamatan Taraju 27,41%, Kecamatan Cikatomas 25,62%, Kecamatan Bantarkalong 24,96%, Kecamatan Salawu 29,63%, Kecamatan Sukaraja 24,86%, Kecamatan Puspahiang 26,94%, Kecamatan Tanjungjaya 27,41%, Kecamatan Salopa 27,21%, Kecamatan Jatiwaras 29,91%, Kecamatan Parungponteng 27,54% dan kecamatan Cibalong 25,98%.

➤ Di bawah 20%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 13,39%, Inspektorat Daerah 17%, BKPSDM 18,02%, BPKPD 15,93%, Bappelitbangda 16,33%, Sekretariat DPRD 19,14%, Sekretariat Daerah 12,67%, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan 17,57%, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 11,39%, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan 16,79%, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk ,KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6,45%, BPBD 19,48%, Satuan Polisi Pamong Praja 15,99%, Dinas PU TR LH 4,42%, Dinas Kesehatan 13,18%, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12,78%.

Berdasarkan gambaran tersebut, sebagian besar Kecamatan (sebanyak 39 Kecamatan) mencatatkan rata-rata realisasi keuangan di atas 20%, sedangkan realisasi keuangan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya rata-rata masih berada di bawah 20%, bahkan terdapat beberapa Perangkat Daerah yang realisasinya masih di bawah 10%. Kecamatan Cikalong mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 30,71%, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki realisasi terendah, yaitu sebesar 3,12%.

Kriteria pengukuran capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2025, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	91%<_ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76%<_90%	Tinggi
(3)	66%<_75%	Sedang
(4)	51%<_65%	Rendah
(5)	<-50%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja hingga Triwulan I Tahun 2025, tercatat bahwa dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sesuai perhitungan pada form evaluasi terhadap hasil RKPD dari 20 (dua puluh) Perangkat Daerah beserta 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan masih berada pada kategori Sangat Rendah, yakni dengan capaian kinerja di bawah 50%.

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan khususnya RKPD Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan perencanaan tahunan, Tim evaluasi merekomendasikan:

1. Hasil evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) agar menjadi evaluasi seluruh Perangkat Daerah, terutama fokus terhadap target kinerja sasaran Renstra Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 guna mewujudkan visi dan misi karena tahun 2025 menjadi tahun terakhir periode dan terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20221-2026;
2. Dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan harus mempertimbangkan secara cermat kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, realistis dan terukur.

Tabel 2.16
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan sampai dengan Triwulan I
Tahun Anggaran 2025

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	940.456.963.851	46.584.221.856	4,95	6,11	Sangat Rendah	
II	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	802.226.447.111	40.349.443.726	5,03	8,91	Sangat Rendah	
1	PENDIDIKAN	346.550.196.640	19.280.607.979	5,56	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	336.727.651.040	19.250.607.979	5,72	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	177.667.202.540	9.362.510.358	5,27	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.494.150.500	3.540.488.991	4,24	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65.920.588.000	5.970.049.330	9,06	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.645.710.000	377.559.300	3,91	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.822.545.600	30.000.000	0,31	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.822.545.600	30.000.000	0,31	0,00	Sangat Rendah	
2	KESEHATAN	215.878.741.171	18.194.311.247	8,43	0,77	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	211.528.872.017	18.150.211.247	8,58	3,08	Sangat Rendah	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	108.344.213.759		0,00	0,02	Sangat Rendah	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.593.662.758	18.150.211.247	17,87	10,30	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	623.495.500	-	0,00	2,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	967.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.297.641.200	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	462.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	308.787.500	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	526.853.700	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.347.947.954	44.100.000	3,27	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	382.500.000	17.700.000	4,63	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	382.500.000	10.800.000	2,82	0,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	160.250.000	10.800.000	6,74	0,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	104.040.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	192.886.054		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	125.771.900	4.800.000	3,82	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.704.280.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	315.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.089.280.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214.676.146.000	32.728.000	0,02	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.700.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.700.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.020.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17.020.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.485.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4.485.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	21.955.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.955.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	9.805.000.000	23.150.100	0,24	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.805.000.000	23.150.100	0,24	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	11.470.063.000	1.416.400	0,01	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	11.470.063.000	1.416.400	0,01	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	125.041.083.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	125.041.083.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.000.000.000	8.161.500	0,82	0,00	Sangat Rendah	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	300.000.000	3.873.500	1,29	0,00	Sangat Rendah	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	600.000.000	4.288.000	0,71	0,00	Sangat Rendah	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.895.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	125.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.300.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	200.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.000.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.870.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.870.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	425.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	425.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.494.363.300	1.558.158.100	14,85	25,91	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.494.363.300	1.558.158.100	14,85	25,91	Sangat Rendah	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	10.244.363.300	1.536.493.100	15,00	26,88	Sangat Rendah	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	200.000.000	21.665.000	10,83	25,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	50.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
6	SOSIAL	10.732.000.000	1.283.638.400	11,96	26,77	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.400.000.000	117.000.000	8,36	18,87	Sangat Rendah	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000.000	117.000.000	8,36	0,27	Sangat Rendah	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.490.000.000	8.333.800	0,33	0,00	Sangat Rendah	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.290.000.000	4.333.800	0,19	0,00	Sangat Rendah	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	200.000.000	4.000.000	2,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.412.000.000	398.167.600	7,36	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.412.000.000	398.167.600	7,36	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.430.000.000	760.137.000	53,16	88,20	Tinggi	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	600.000.000	604.137.000	100,69	94,73	Sangat Tinggi	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	830.000.000	156.000.000	18,80	98,11	Sangat Tinggi	
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	138.230.516.740	6.234.778.130	4,51	3,31	Sangat Rendah	
1	TENAGA KERJA	21.767.836.636	59.517.000	0,27	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	200.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyusunan rencana tenaga kerja	200.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.800.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	8.700.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	12.117.836.636	24.992.000	0,21	0,00	Sangat Rendah	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	12.117.836.636	24.992.000	0,21	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	650.000.000	34.525.000	5,31	0,00	Sangat Rendah	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	34.525.000	5,31	0,00	Sangat Rendah	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.295.000.000	8.000.000	0,19	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.120.000.000	8.000.000	0,71	0,00	Sangat Rendah	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	8.000.000	2,67	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	200.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.175.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.800.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.050.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
3	PANGAN	491.673.200	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	491.673.200	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	491.673.200	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
4	PERTANAHAN	21.000.000.000	80.350.000	0,38	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	21.000.000.000	80.350.000	0,38	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000.000	80.350.000	0,38	0,00	Sangat Rendah	
5	LINGKUNGAN HIDUP	5.115.903.000	408.200.000	7,98	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	450.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	450.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.497.903.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.497.903.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	200.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.968.000.000	408.200.000	13,75	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Sampah	2.968.000.000	408.200.000	13,75	0,00	Sangat Rendah	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.857.197.300	2.057.530.750	53,34	28,33	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.371.183.500	1.992.647.750	59,11	60,00	Rendah	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	503.880.000	390.720.000	77,54	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.867.303.500	1.601.927.750	55,87	20,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	425.073.800	64.883.000	15,26	25,00	Sangat Rendah	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	70.000.000		0,00	25,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	355.073.800	64.883.000	18,27	25,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	60.940.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.940.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	16.458.224.488	2.817.321.380	17,12	6,25	Sangat Rendah	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.708.224.488	2.817.321.380	26,31	25,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.708.224.488	2.817.321.380	26,31	25,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.000.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	5.000.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	450.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	450.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENATAAN DESA	300.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	300.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.649.096.250	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	270.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	270.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.138.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	971.750.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.800.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	4.008.750.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.357.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.240.596.250	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.240.596.250	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
9	PERHUBUNGAN	3.451.261.800	729.687.000	21,14	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.451.261.800	729.687.000	21,14	0,00	Sangat Rendah	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	279.221.800	5.750.000	2,06	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	500.000.000	542.214.000	108,44	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	670.400.000	28.980.000	4,32	0,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	229.480.000	15.180.000	6,61	0,00	Sangat Rendah	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.452.160.000	126.950.000	8,74	0,00	Sangat Rendah	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	30.000.000	3.313.000	11,04	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	7.300.000	9,13	0,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.075.312.466	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM INFORMSI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.799.312.466	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.799.312.466	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.276.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.276.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	16.661.945.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	700.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	800.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	550.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	550.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.511.945.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	4.511.945.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10.100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	10.100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
12	PENANAMAN MODAL	2.320.000.000	32.296.000	1,39	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	455.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	400.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	750.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	750.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	420.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	420.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	695.000.000	32.296.000	4,65	0,00	Sangat Rendah	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	695.000.000	32.296.000	4,65	0,00	Sangat Rendah	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.740.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.770.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	5.150.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.620.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	516.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	516.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.454.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.304.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Kejuaaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6.450.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	200.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
14	STATISTIK	900.000.000	29.876.000	3,32	25,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	900.000.000	29.876.000	3,32	25,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	29.876.000	3,32	25,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	KEBUDAYAAN	2.838.650.000	12.000.000	0,42	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.301.250.000	4.000.000	0,31	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	146.250.000	4.000.000	2,74	0,00	Sangat Rendah	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.155.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.537.400.000	8.000.000	0,52	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.537.400.000	8.000.000	0,52	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	144.040.000	4.000.000	2,78	0,00	Sangat Rendah	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	144.040.000	4.000.000	2,78	0,00	Sangat Rendah	
16	PERPUSTAKAAN	1.146.880.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.146.880.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.880.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	992.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
17	KEARSIPAN	242.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	242.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	181.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/Kota	60.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
18	PERSANDIAN	219.036.600	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	219.036.600	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	219.036.600	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
III	URUSAN PILIHAN	78.889.451.500	4.246.644.150	5,38	0,57	Sangat Rendah	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.293.582.500	103.118.400	7,97	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	862.488.000	103.118.400	11,96	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	862.488.000	103.118.400	11,96	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	243.451.500	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	243.451.500	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	187.643.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	187.643.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
2	PARIWISATA	9.932.522.000	4.000.000	0,04	3,45	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.832.522.000	4.000.000	0,10	1,59	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	50.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.607.522.000	4.000.000	0,11	4,76	Sangat Rendah	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	175.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.150.000.000	-	0,00	8,76	Sangat Rendah	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	4.150.000.000		0,00	8,76	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	175.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	175.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.775.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.175.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	600.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
3	PERTANIAN	33.980.597.000	4.139.525.750	12,18	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.807.917.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	141.800.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	4.666.117.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	25.189.761.000	3.794.720.000	15,06	0,00	Sangat Rendah	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	25.027.261.000	3.794.720.000	15,16	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	162.500.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	522.148.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	365.371.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	41.400.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.377.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.460.771.000	344.805.750	9,96	0,00	Sangat Rendah	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.360.771.000	344.805.750	10,26	0,00	Sangat Rendah	
4	KEHUTANAN						Urusan kehutanan bukan merupakan kewenangan Kabupaten
5	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						Urusan energi dan sumber

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							daya alam tidak memperoleh anggaran
6	PERDAGANGAN	30.900.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PORGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	26.950.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	26.800.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	150.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	850.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	400.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	400.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KAB/KOTA	2.600.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kab/Kota	2.600.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan pengawasan	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
7	PERINDUSTRIAN	1.917.750.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.475.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.475.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	332.750.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	332.750.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	110.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	110.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
8	TRANSMIGRASI	865.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	765.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	765.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAN	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	100.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
IV	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	807.445.307.119	65.271.156.602	8,08	14,51		
1	PENGAWASAN	1.721.563.000	40.675.000	2,36	3,33	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.140.093.000	38.375.000	3,37	6,38	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	991.248.000	33.975.000	3,43	9,01	Sangat Rendah	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	148.845.000	4.400.000	2,96	3,75	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	581.470.000	2.300.000	0,40	0,28	Sangat Rendah	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	175.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pendampingan dan Asistensi	406.470.000	2.300.000	0,57	0,56	Sangat Rendah	
2	PERENCANAAN	4.819.250.324	272.392.686	5,65	22,66	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.610.000.000	97.382.700	3,73	29,07	Sangat Rendah	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.840.000.000	81.421.700	4,43	47,92	Sangat Rendah	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	-	0,00	12,50	Sangat Rendah	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000	-	0,00	12,50	Sangat Rendah	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	120.000.000	15.961.000	13,30	25,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.209.250.324	175.009.986	7,92	16,25	Sangat Rendah	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	865.500.324	97.370.486	11,25	16,25	Sangat Rendah	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	665.500.000	41.030.500	6,17	16,25	Sangat Rendah	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	678.250.000	36.609.000	5,40	16,25	Sangat Rendah	
3	KEUANGAN	789.521.692.530	64.117.679.516	8,12	8,47	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	773.153.342.530	63.477.085.170	8,21	12,08	Sangat Rendah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.323.356.000	412.230.370	17,74	12,73	Sangat Rendah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	622.000.000	105.691.000	16,99	15,00	Sangat Rendah	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.092.000.000	84.534.000	7,74	12,24	Sangat Rendah	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	769.115.986.530	62.874.629.800	8,17	8,33	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.767.400.000	98.059.500	3,54	4,17	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.767.400.000	98.059.500	3,54	4,17	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.600.950.000	542.534.846	3,99	9,17	Sangat Rendah	
	Pengelolaan pendapatan Daerah	13.600.950.000	542.534.846	3,99	9,17	Sangat Rendah	
4	KEPEGAWAIAN	3.087.999.269	279.611.900	9,05	0,73	Sangat Rendah	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.087.999.269	279.611.900	9,05	0,73	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.494.999.689	49.439.000	3,31	0,00	Sangat Rendah	
	Mutasi dan Promosi ASN	543.000.000	8.204.000	1,51	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan Kompetensi ASN	390.000.000	42.735.000	10,96	0,00	Sangat Rendah	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	659.999.580	179.233.900	27,16	2,92	Sangat Rendah	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.377.900.000	20.582.000	1,49	13,33	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.377.900.000	20.582.000	1,49	13,33	Sangat Rendah	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	148.500.000		0,00	10,00	Sangat Rendah	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100.000.000	5.978.000	5,98	5,00	Sangat Rendah	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	750.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	379.400.000	14.604.000	3,85	25,00	Sangat Rendah	
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.552.901.996	107.215.500	3,02	40,55	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.552.901.996	107.215.500	3,02	40,55	Sangat Rendah	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.450.000.000	103.692.500	7,15	11,33	Sangat Rendah	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.102.901.996	3.523.000	0,17	0,00	Sangat Rendah	
7	PENANGGULANGAN BENCANA	3.364.000.000	433.000.000	12,87	12,50	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.264.000.000	433.000.000	13,27	25,00	Sangat Rendah	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	400.000.000		0,00	24,00	Sangat Rendah	
	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.164.000.000	378.000.000	17,47	25,00	Sangat Rendah	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	550.000.000	55.000.000	10,00	20,00	Sangat Rendah	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	150.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan, Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
V	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	177.778.094.234	15.342.875.394	8,63	16,25	Sangat Rendah	
1	SEKRETARIAT DAERAH	43.294.684.208	4.309.998.294	9,96	11,52	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.213.623.458	4.135.820.794	10,28	9,21	Sangat Rendah	
	Administrasi Tata Pemerintahan	1.445.564.458	276.999.544	19,16	33,33	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	37.053.731.000	3.817.557.250	10,30	0,00	Sangat Rendah	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.431.793.000	41.264.000	2,88	3,51	Sangat Rendah	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	282.535.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.081.060.750	174.177.500	5,65	13,84	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	880.000.000	82.079.500	9,33	25,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	725.485.750	10.278.000	1,42	16,67	Sangat Rendah	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.575.000	81.820.000	5,84	13,67	Sangat Rendah	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	75.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
2	SEKRETARIAT DPRD	20.649.458.359	1.359.087.500	6,58	25,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.649.458.359	1.359.087.500	6,58	25,00	Sangat Rendah	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.937.855.000	87.365.000	1,77	10,00	Sangat Rendah	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.753.920.000	77.640.000	4,43	0,00	Sangat Rendah	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.139.460.000	207.250.000	9,69	0,00	Sangat Rendah	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.949.344.400	316.399.500	8,01	0,00	Sangat Rendah	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.778.055.459	516.005.000	13,66	6,25	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	271.716.000	27.550.000	10,14	10,00	Sangat Rendah	
	Fasilitasi Tugas DPRD	3.819.107.500	126.878.000	3,32	6,67	Sangat Rendah	
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	113.833.951.667	9.673.789.600	8,50	12,23	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	18.180.667.800	3.187.615.000	17,53	23,52	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	18.180.667.800	3.187.615.000	17,53	23,52	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	69.192.883.867	5.918.250.000	8,55	12,86	Sangat Rendah	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	69.192.883.867	5.918.250.000	8,55	12,86	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	18.732.000.000	6.800.000	0,04	0,06	Sangat Rendah	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.732.000.000	6.800.000	0,04	0,06	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5.378.400.000	166.062.000	3,09	12,31	Sangat Rendah	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5.378.400.000	166.062.000	3,09	12,31	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.350.000.000	395.062.600	16,81	12,42	Sangat Rendah	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.350.000.000	395.062.600	16,81	12,42	Sangat Rendah	
VI	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	91.463.714.325	21.106.880.876	23,08	23,08	Sangat Rendah	
1	39 KECAMATAN	91.463.714.325	21.106.880.876	23,08	23,08	Sangat Rendah	
VII	NON URUSAN	1.917.161.083.153	340.195.061.691	17,74	18,17	Sangat Rendah	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	988.521.075.976	208.574.506.388	21,10	17,13	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	988.521.075.976	208.574.506.388	21,10	17,13	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315.777.500	77.602.300	24,57	27,78	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	984.447.069.944	207.829.916.681	21,11	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.728.529.532	535.184.917	30,96	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.679.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.630.000	131.802.490	17,87	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.390.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
2	DINAS KESEHATAN	370.777.315.850	61.331.318.510	16,54	6,25	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	370.777.315.850	61.331.318.510	16,54	6,25	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.632.500	14.855.000	10,13	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.752.781.992	60.878.985.188	46,92	25,00	Sangat Rendah	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	231.650.191.858	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.285.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	948.634.500	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.211.863.600	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.286.214.000	437.478.322	19,14	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.712.400	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	27.348.607.900	5.494.604.557	20,09	12,50	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.348.607.900	5.494.604.557	20,09	12,50	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.811.888.400	4.167.997.150	22,16	25,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	894.700.000	36.758.000	4,11	25,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.470.276.000	970.250.407	21,70	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.541.743.500	319.599.000	12,57	25,00	Sangat Rendah	
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.449.696.680	2.144.682.389	18,73	18,43	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.449.696.680	2.144.682.389	18,73	18,43	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.110.800	31.362.600	19,84	42,11	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.682.996.680	1.319.486.565	19,74	28,57	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.007.200	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.500.000	72.126.892	10,77	20,83	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.192.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.698.400.000	637.371.832	23,62	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.490.000	84.334.500	10,33	12,50	Sangat Rendah	
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.407.155.059	1.037.582.475	16,19	22,08	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.407.155.059	1.037.582.475	16,19	22,08	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	17.786.000	22,23	23,08	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.724.155.059	851.839.936	18,03	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.000.000	44.877.000	9,91	20,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000	38.228.539	21,84	25,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	975.000.000	84.851.000	8,70	17,31	Sangat Rendah	
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.106.868.017	1.309.369.922	12,96	19,00	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.106.868.017	1.309.369.922	12,96	19,00	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.000.000	12.200.000	6,42	20,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.716.868.017	1.251.119.922	16,21	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.005.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000	21.350.000	3,56	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.000.000	24.700.000	4,15	25,00	Sangat Rendah	
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.089.196.867	2.183.895.044	12,07	24,35	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.089.196.867	2.183.895.044	12,07	24,35	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	118.272.248	2.100.000	1,78	45,45	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.180.791.484	1.160.041.882	22,39	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	391.110.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	727.171.500	130.924.141	18,00	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.285.590.000	734.653.500	7,14	25,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.072.000	113.448.821	11,69	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.189.635	42.726.700	10,27	25,00	Sangat Rendah	
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.835.670.838	1.072.686.956	18,38	16,95	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.835.670.838	1.072.686.956	18,38	16,95	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	13.585.000	10,87	16,67	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.900.000.000	986.942.860	25,31	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	610.938.800	12.285.000	2,01	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.280.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	502.801.238	43.498.596	8,65	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	536.650.800	16.375.500	3,05	10,00	Sangat Rendah	
9	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	37.557.927.451	7.551.549.091	20,11	15,10	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.557.927.451	7.551.549.091	20,11	15,10	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	22.294.050	11,15	11,48	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.727.282.023	2.199.907.610	22,62	18,23	Sangat Rendah	
	Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	30.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.700.000		0,00	1,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.360.594.626	59.293.250	4,36	25,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.106.311.000	5.183.388.135	20,65	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.081.039.802	86.666.046	8,02	25,00	Sangat Rendah	
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.562.328.625	2.328.653.554	12,55	18,37	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.562.328.625	2.328.653.554	12,55	18,37	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.500.000	28.849.500	13,77	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.027.794.041	1.960.771.647	13,05	28,57	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.500.000	11.270.000	1,33	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.025.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.000.000	282.530.907	27,56	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.509.584	45.231.500	4,07	25,00	Sangat Rendah	
11	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	9.063.814.144	1.453.452.581	16,04	25,95	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.063.814.144	1.453.452.581	16,04	25,95	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	22.740.000	12,99	33,33	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.000.040.648	1.235.010.517	20,58	21,43	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.000.000	53.518.700	7,04	25,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.248.773.496	130.533.364	10,45	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.000.000	11.650.000	1,32	25,00	Sangat Rendah	
12	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.996.654.820	1.788.668.555	19,88	19,75	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.996.654.820	1.788.668.555	19,88	19,75	Sangat Rendah	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	15.700.000	7,85	32,79	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.220.654.820	1.456.603.507	23,42	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.000.000	70.111.664	12,26	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.192.000.000	196.810.484	16,51	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.000.000	49.442.900	8,08	10,71	Sangat Rendah	
13	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	32.554.942.615	7.765.997.722	23,86	7,14	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.554.942.615	7.765.997.722	23,86	7,14	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	185.934.600		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.270.260.415	7.212.679.522	24,64	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.970.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.182.400		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.060.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.067.947.000	553.318.200	26,76	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.588.200		0,00	0,00	Sangat Rendah	
14	SEKRETARIAT DAERAH	236.680.283.767	9.992.799.820	4,22	17,70	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.680.283.767	9.992.799.820	4,22	17,70	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	132.000.000	61.426.400	46,54	33,33	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.158.387.443	6.785.975.142	21,10	24,41	Sangat Rendah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	320.650.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.500.000	1.950.000	0,76	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.363.777.877	458.055.059	8,54	21,43	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.226.279.718		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.428.156.800	857.376.890	15,79	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.361.647.282	232.134.333	3,65	8,21	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.395.039.647	331.387.018	9,76	0,00	Sangat Rendah	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.570.000.000	1.025.215.600	13,54	25,00	Sangat Rendah	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6.810.000.000	209.495.978	3,08	25,00	Sangat Rendah	
	Penataan Organisasi	658.845.000	29.783.400	4,52	25,00	Sangat Rendah	
15	SEKRETARIAT DPRD	50.811.406.488	13.191.618.051	25,96	14,96	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.811.406.488	13.191.618.051	25,96	14,96	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.443.340	1.193.000	0,46	7,69	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.871.456.504	1.272.700.511	21,68	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.594.113	31.100.000	24,37	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.814.747.850	111.575.000	6,15	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.003.938	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.263.078.500	346.983.530	15,33	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.859.680.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36.841.013.843	11.365.038.010	30,85	25,00	Sangat Rendah	
	Layanan Administrasi DPRD	950.388.400	63.028.000	6,63	1,92	Sangat Rendah	
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.985.215.463	1.984.011.425	12,41	16,43	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.985.215.463	1.984.011.425	12,41	16,43	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	28.458.400	8,13	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.625.099.892	1.710.799.589	19,84	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	991.522.061	26.538.864	2,68	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.197.918.700	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.394.400.810	147.334.422	10,57	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.076.274.000	70.880.150	6,59	15,00	Sangat Rendah	
17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	35.303.499.630	5.114.882.752	14,49	21,71	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.303.499.630	5.114.882.752	14,49	21,71	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.000.000	50.178.000	21,54	27,72	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.416.021.039	3.850.977.940	15,15	28,57	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	651.717.800	9.330.000	1,43	0,22	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.696.417.608	499.306.818	18,52	27,78	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.173.899.900		0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.689.010.000	480.183.644	28,43	50,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.443.433.283	224.906.350	9,20	17,66	Sangat Rendah	
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.670.128.760	2.172.540.902	17,15	40,38	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.670.128.760	2.172.540.902	17,15	40,38	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000	5.005.000	3,13	26,67	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.834.873.752	2.072.714.993	19,13	100,00	Sangat Tinggi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.124.008	24.370.000	5,04	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.093.000	-	0,00	21,74	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640.490.000	31.713.625	4,95	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.548.000	38.737.284	8,36	43,86	Sangat Rendah	
19	INSPEKTORAT DAERAH	14.848.515.953	2.693.535.994	18,14	10,55	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.848.515.953	2.693.535.994	18,14	10,55	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.900.000	1.000.000,00	0,70	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.671.008.953	2.523.577.537,00	21,62	20,31	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.000.000	500.000,00	0,07	1,67	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.800.000	7.220.000,00	0,93	21,43	Sangat Rendah	

No	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	Pagu (Rp)	Realisasi sampai dengan Triwulan I				Keterangan
			Keuangan		Kinerja		
			Rp	%	%	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.800.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.407.000	90.981.757,00	18,74	23,21	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.600.000	70.256.700,00	10,54	7,25	Sangat Rendah	
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.590.778.250	1.008.705.003	18,04	18,68	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.590.778.250	1.008.705.003	18,04	18,68	Sangat Rendah	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	133.350.000	45.370.000	34,02	30,77	Sangat Rendah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.020.252.170	865.317.406	21,52	25,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.600.500	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.447.600	41.758.500	9,88	25,00	Sangat Rendah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.776.000	-	0,00	0,00	Sangat Rendah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.021.980	20.759.097	8,80	25,00	Sangat Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.330.000	35.500.000	7,80	25,00	Sangat Rendah	
TOTAL		4.013.194.614.182	492.746.840.569	12,28	12,12	Sangat Rendah	

Sumber: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 2025

2.7 Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai Triwulan I RKPD tahun 2025, termasuk permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dari faktor pendorong dan faktor penghambat.

2.8.1 Faktor Pendorong

- a. Proses dan tahapan perencanaan telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah merupakan hasil analisis dan pembahasan yang akan secara langsung mendukung terwujudnya tujuan, dan target sasaran kinerja Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Peran optimal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan pengawasan telah membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Peran Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memfasilitasi, melakukan inovasi meningkatkan kualitas agar pembinaan kepada kabupaten/kota secara signifikan turut meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

2.8.2 Faktor Penghambat

- b. Masih banyak sub kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga tingkat penyerapan anggaran dan capaian kinerja sangat rendah;
- c. Penyampaian laporan hasil evaluasi Renja setiap triwulan secara kualitas masih belum optimal karena beberapa faktor penyebab, antara lain: volume pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola perencanaan dan evaluasi relatif banyak, SDM terbatas dan belum seluruh Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Keterlambatan penyampaian laporan evaluasi dari perangkat daerah;
- e. Keterlambatan dalam pekerjaan fisik konstruksi di beberapa Dinas, terutama di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, mengakibatkan capaian kinerja sangat rendah;

- a. Pada beberapa Perangkat Daerah masih terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja, dengan satuan dan target capaian untuk sub kegiatan, sehingga sulit untuk pengukuran kinerja.

2.8.3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

1. Target sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator agar dievaluasi dan disesuaikan terutama untuk capaian yang telah melampaui target tahun 2024;
2. Target sasaran Renstra seluruh Perangkat Daerah agar di evaluasi dan disesuaikan karena efisiensi anggaran yang sangat besar;
3. Penambahan dan pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah lebih diarahkan pada pencapaian target IKU setiap Perangkat Daerah dan yang mendukung capaian Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya;
4. Rata-rata capaian kinerja program berdasarkan urusan yang hanya mencapai 12,12%, yang tergolong dalam kategori rendah, menunjukkan perlun melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
 - a. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh program dan kegiatan berdasarkan urusan, guna mengidentifikasi akar permasalahan rendahnya capaian, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, maupun pengukuran kinerja;
 - b. Melakukan penajaman perencanaan program sesuai indikator kinerja yang lebih terukur, relevan, dan realistis, serta memastikan keterkaitan yang kuat antara program dengan prioritas pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan koordinasi, khususnya untuk program lintas sektor, melalui penguatan sinergi antar perangkat daerah serta pembentukan tim monitoring internal yang bertugas mengawal pelaksanaan program secara berkala;

- d. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi kinerja secara triwulanan atau semesteran, untuk mengukur capaian secara berkala dan menyusun langkah korektif yang cepat dan tepat.

BAB

III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini, dapat diidentifikasi kapasitas riil keuangan daerah yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025. Kondisi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2025 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program/kegiatan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Isu strategis daerah sebagai dasar merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan

arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan arah dan kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang dimaknai sebagai tanggungjawab yang diemban untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan Tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Memasuki tahun 2024, perekonomian Indonesia menghadapi momentum unik dengan berlangsungnya pesta demokrasi nasional. Pada triwulan I dan II 2024, perekonomian tumbuh solid namun dengan tren yang menurun. Sehingga, secara keseluruhan ekonomi diproyeksikan stagnan di level lima persen. Kebijakan dan upaya terintegrasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berdaya saing sebagai fondasi menghadapi risiko dan tantangan di tahun 2024.

Sebagai negara yang tengah bergerak menuju hilirisasi industri dan transformasi ekonomi hijau, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 yang berkisar 4,7% hingga 5,5% mencerminkan optimisme yang dibayangi kehati-hatian. Meski angka ini sedikit melambat dari pencapaian 2023 yang menyentuh 5,05%, namun masih

menunjukkan ketangguhan fundamental ekonomi nasional di tengah ancaman resesi global. Menurut Bank Indonesia, berikut kisaran perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (% , yoy)

Komponen	2023*	2024**			2024 ^p	2025 ^p
		I	II	III		
Pertumbuhan Ekonomi	5,05	5,11	5,05	4,95	4,7 – 5,5	4,8 – 5,6
Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,91	4,93	4,91	4,6 – 5,4	4,6 – 5,4
Konsumsi Pemerintah	2,95	19,90	1,42	4,62	2,8 – 3,6	2,8 – 3,6
Investasi	4,40	3,79	4,43	5,15	5,0 – 5,8	5,2 – 6,0
Ekspor	1,32	0,50	8,28	9,09	-0,4 – 0,4	6,1 – 6,91
Impor	-1,65	1,77	8,57	11,47	-1,1 - -0,3	7,1 - 7,9

Sumber: BPS, Proyeksi Bank Indonesia, 2025
Keterangan: ^pProyeksi BI, * = Angka Sementara, ** = Angka Sangat Sementara

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan proyeksi pertumbuhan 4,6% hingga 5,4%. Angka ini didorong oleh belanja politik, peningkatan bantuan sosial, dan terjaganya inflasi di level 3%. Namun, tantangan muncul dari kenaikan harga pangan dan energi, terutama dampak El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Konsumsi pemerintah yang diproyeksikan tumbuh 2,8% hingga 3,6% menunjukkan sikap prudent dalam pengelolaan fiskal. Program-program prioritas seperti peningkatan SDM, infrastruktur, dan transisi energi tetap berjalan dengan penyesuaian pada ruang fiskal yang tersedia. Defisit APBN yang kembali di bawah 3% menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga sustainabilitas fiskal.

Sektor investasi menyimpan optimisme dengan proyeksi pertumbuhan 5,0% hingga 5,8%. Dorongan utama datang dari pembangunan IKN Nusantara, kawasan industri hijau, serta hilirisasi mineral dan batu bara. Implementasi UU Cipta Kerja dan kemudahan berusaha yang terus membaik menjadi magnet bagi investor, meski mereka cenderung menunggu hingga terbentuknya pemerintahan baru.

Tantangan terbesar menghadang dari sektor eksternal. Ekspor yang diprediksi berkontraksi hingga -0,4% atau tumbuh tipis 0,4% mencerminkan dampak perang dagang AS-China dan konflik

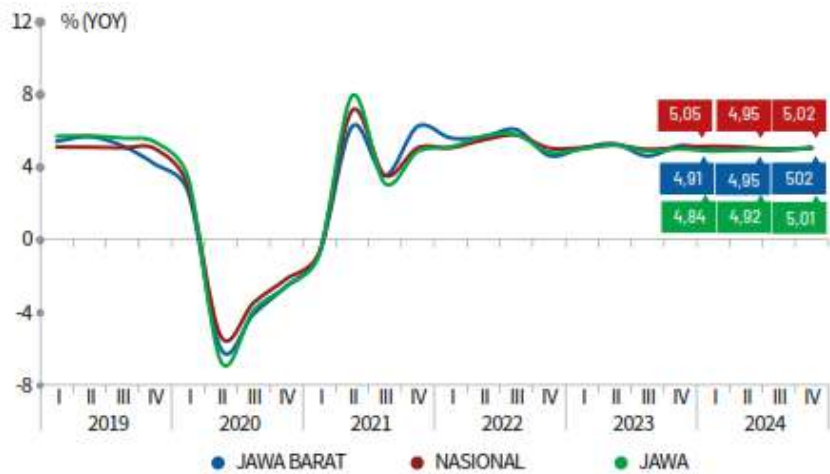
geopolitik global. Larangan ekspor bijih mineral mentah juga memberikan tekanan jangka pendek, meski dalam jangka panjang mendukung nilai tambah industri nasional. Sementara impor yang diproyeksikan menyusut antara -1,1% hingga -0,3% menggambarkan perlambatan aktivitas industri domestik.

Kondisi perekonomian nasional merupakan agregat dari aktivitas perekonomian daerah. Pangsa perekonomian nasional didominasi oleh kegiatan ekonomi di pulau Jawa. Ibu Kota Negara DKI Jakarta merupakan pangsa perekonomian terbesar disusul kemudian oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Kondisi Perekonomian Jawa Barat diulas dalam Sub-Bab selanjutnya.

3.1.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 5,02% (yoy) atau meningkat dari triwulan III 2024 yang sebesar 4,91% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan tercatat sebesar 2,05% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,49% (qtq). Tren pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy) meningkat dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,95% (yoy) serta sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa (Gambar 3.1).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan masih ditopang utamanya oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan momentum HBKN natal dan tahun baru yang secara siklikal selalu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kinerja investasi dan ekspor juga tercatat resilien dengan mencatatkan pertumbuhan positif meskipun sedikit termoderasi dari triwulan III 2024. Adapun kinerja konsumsi pemerintah cukup tertahan paska normalisasi momentum safari politik.



Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulanan
Sumber: Bank Indonesia, 2025

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,00% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut tercatat tertinggi kedua di pulau Jawa, dan sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional 5,02% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan peningkatan capaian realisasi investasi (PMA dan PMDN) yang turut mendorong pertumbuhan pada LU konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi berkontribusi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy), investasi yang meningkat 6,96% (yoy), serta ekspor yang tumbuh sebesar 12,08% (yoy). Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan konsumsi pada restoran/ hotel, serta rekreasi dan transportasi (Gambar 3.2)

NO	KOMODITAS	2021	2022				2022	2023				2023	2024				2024
			I	II	III	IV		Ir)	IIr)	IIIr)	IV		I	II	III	IV	
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.33	3.05	5.89	5.03	4.73	4.67	4.60	5.53	5.83	5.39	5.34	4.97	5.02	4.98	5.05	5.01
2	Konsumsi LNPRT	1.92	0.95	1.32	5.03	5.33	3.13	4.29	15.31	16.75	19.35	14.02	20.28	4.77	4.23	4.06	7.89
3	Konsumsi Pemerintah	2.07	3.20	-5.07	4.39	-5.55	-1.72	10.16	12.01	-5.08	7.75	5.65	32.59	-5.77	-1.28	-2.85	1.92
4	PMTB	6.47	1.17	0.51	0.09	-0.80	0.29	2.98	7.08	8.40	12.39	7.73	9.72	6.13	6.83	5.35	6.96
5	Perubahan Inventori	-152.21	3.77	-161.16	-114.91	-88.00	-116.44	2.54	-227.78	-7.36	-249.02	-19.65	51.11	-108.35	-296.18	-83.14	-32.85
6	Net Ekspor	34.59	30.21	15.10	15.84	10.01	17.61	10.11	1.40	-4.15	-15.52	-1.78	-10.21	4.18	5.38	11.39	1.71
7	a. Ekspor	23.12	17.38	13.53	10.62	3.91	11.10	4.96	11.94	14.58	17.82	12.38	21.89	9.70	11.70	6.31	12.08
	b. Impor	10.72	12.93	13.03	8.72	2.06	8.92	3.22	15.46	21.86	28.76	17.56	34.77	11.28	13.63	5.22	15.12
	PDRB	3.74	5.57	5.62	6.03	4.61	5.45	5.01	5.25	4.58	5.15	5.00	4.93	4.95	4.91	5.02	4.95

Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Permintaan (% yoy)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU yang berhubungan dengan permintaan domestik seperti perdagangan besar eceran, dan penyediaan akomodasi makanan minuman mengalami pertumbuhan positif dan meningkat dari triwulan III 2024. Lebih lanjut, LU pertanian juga tercatat mengalami akselerasi pada triwulan laporan. Selain itu, LU dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu industri pengolahan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dari triwulan sebelumnya. LU utama lainnya seperti konstruksi, dan transportasi pergudangan juga tercatat tumbuh positif pada triwulan laporan. Berdasarkan pangasanya pada triwulan IV 2024, LU pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi pada ekonomi Jawa Barat pada triwulan laporan (18,99%). Dilanjutkan oleh Transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 9,23%, dan Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 8,40%. (Gambar 3.3)

KOMODITAS	2021	2022				2022	2023				2023	2024				2024
		I	II	III	IV		Ir	IIr	IIIr	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	3,16	2,15	5,06	7,86	4,41	2,27	0,05	-1,89	0,29	0,11	-10,98	3,24	-3,26	18,99	1,59
Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,19	1,06	-0,31	-2,33	-0,36	-1,18	-1,09	0,84	1,05	-0,10	-0,96	0,04	-0,62	0,41	-0,28
Industri Pengolahan	4,22	8,30	7,61	6,43	5,80	7,00	6,62	5,68	4,73	2,09	4,74	3,87	2,79	5,12	2,34	3,53
Pengadaan Listrik, Gas	11,66	5,06	10,42	7,44	-0,74	5,42	-0,49	-2,09	-0,34	3,70	0,18	0,67	1,84	-2,37	-2,38	-0,60
Pengadaan Air	9,63	2,03	1,08	4,70	2,56	2,60	5,96	2,18	-3,29	5,73	2,62	7,50	6,32	8,35	0,22	5,48
Konstruksi	6,47	2,11	-0,48	-0,42	-2,96	-0,46	0,03	4,85	5,88	12,68	5,84	10,26	6,61	7,30	4,46	7,09
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,19	4,51	3,96	4,21	4,20	4,22	4,44	3,67	4,37	4,94	4,36	4,86	4,53	3,43	6,54	4,85
Transportasi dan Pergudangan	-0,17	4,21	17,85	18,37	5,55	11,09	6,37	10,09	12,44	14,67	10,93	14,43	14,13	11,87	9,23	12,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,04	4,67	8,94	25,83	7,92	11,27	9,19	6,86	7,76	10,97	8,72	8,35	8,77	2,76	5,91	6,43
Informasi dan Komunikasi	7,30	6,15	6,13	5,33	6,76	6,09	7,36	8,17	6,31	9,57	7,86	8,96	8,75	8,24	6,94	8,20
Jasa Keuangan	5,69	1,74	-0,80	-0,73	-2,94	-0,70	0,86	2,61	4,93	6,54	3,72	5,75	7,83	4,98	-1,65	4,20
Real Estate	11,75	4,69	1,96	3,07	7,65	4,35	6,66	7,69	5,72	4,96	6,23	6,02	7,12	8,54	4,94	6,64
Jasa Perusahaan	8,54	3,01	7,60	29,80	13,52	12,73	3,11	7,17	6,31	12,43	7,30	6,92	-3,57	-4,76	11,21	2,49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,02	-3,38	-6,35	6,22	-3,02	-1,79	3,31	7,52	-5,74	4,82	2,44	18,37	7,63	4,53	4,93	8,73
Jasa Pendidikan	0,02	0,35	2,00	0,30	8,58	2,79	5,43	7,18	0,88	6,88	5,04	8,99	6,14	7,02	2,12	5,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	8,92	5,98	8,53	0,54	5,82	1,70	6,79	6,74	8,09	5,86	7,86	5,91	4,25	6,01	5,98
Jasa lainnya	0,81	6,78	12,58	16,65	5,43	10,07	1,15	8,39	9,86	10,86	7,58	6,67	9,06	7,43	8,40	7,93
PDRB	3,74	5,57	5,62	6,03	4,61	5,45	5,01	5,25	4,58	5,15	5,00	4,93	4,95	4,91	5,02	4,95

Gambar 3.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Lapangan Usaha (% yoy)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Aktivitas Ekonomi Jawa Barat merupakan agregasi dari aktivitas ekonomi di 27 Kabupaten dan Kota. Pertumbuhan atau kontraksi ekonomi di sebuah daerah dapat mempengaruhi perekonomian provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota pada tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Laju PDRB Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten Kota (ADHK)
Tahun 2021 – 2024

Wilayah Jawa Barat	Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	3.74	5,45	5,00	4,95
Bogor	3.55	5,25	5,19	5,21
Sukabumi	3.75	5,12	5,17	5,15
Cianjur	3.48	5,04	5,16	5,14
Bandung	3.56	5,35	4,97	5,04
Garut	3.58	5,08	4,94	4.95
Tasikmalaya	3.43	4,70	4,69	4,64
Ciamis	3.66	5,02	4,99	4,97
Kuningan	3.56	5,53	5,25	5,61
Cirebon	2.47	4,09	4,85	5,83
Majalengka	4.75	6,63	6,15	6,38
Sumedang	3.17	5,03	5,01	4,05
Indramayu	0.58	2,88	9,76	2,18
Subang	2.40	4,21	4,64	4,81
Purwakarta	3.42	5,24	4,97	4,64
Karawang	5.85	6,31	5,40	4,20
Bekasi	3.62	5,30	5,32	5,17
Bandung Barat	3.46	5,34	5,00	4,94
Pangandaran	3.67	5,03	5,26	5,12
Kota Bogor	3.76	5,65	5,10	5,15
Kota Sukabumi	3.71	5,35	5,12	5,11
Kota Bandung	3.76	5,41	5,07	4,99
Kota Cirebon	3.04	5,10	5,01	5,02
Kota Bekasi	3.22	4,96	5,43	5,19
Kota Depok	3.76	5,24	5,05	5,47
Kota Cimahi	4.19	5,92	5,19	5,26
Kota Tasikmalaya	3.57	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	3.46	4,19	4,63	5,48

Sumber: BPS Jawa Barat (2025)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 3,43% seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi Covid-19, didukung oleh berbagai kebijakan pemulihan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan meningkat menjadi 4,70% dan tetap terjaga di

angka 4,69% pada 2023, mencerminkan kondisi ekonomi yang mulai membaik. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 4,64% yang dipengaruhi oleh dinamika eksternal dan penyesuaian sektor ekonomi domestik. Secara umum, stabilitas pertumbuhan ini menjadi indikator positif bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya ke depan.

3.1.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi perekonomian daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan target dan mengevaluasi capaian indikator makro utama yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Enam indikator utama yang digunakan yaitu: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2) Persentase Penduduk Miskin, 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 4) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), 5) Pendapatan per-kapita, dan 6) Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio).

Tabel 3.3
Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022-2024

No	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,38	69,38	69,80	69,98	70,27
2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,67	10,28	8,90 – 9,80	10,23	8,65 – 9,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,17	3,89	3,48 – 3,88	3,74	3,42 – 3,73
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50	4,69	4,70 – 5,12	4,64	4,66 – 5,16
5	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	24,11	24,17	25,99	25,92	26,10
6	Ketimpangan <i>Gini Ratio</i>	Poin	0,370	0,404	0,387 – 0,400	0,363	0,356 – 0,369

Sumber: - RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
- BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Secara keseluruhan, kerangka ekonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan arah yang positif. Namun, beberapa indikator memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks perekonomian nasional, Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 5% hingga 5,1% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan peningkatan investasi. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global, ketidakpastian geopolitik, dan potensi resesi global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kabupaten Tasikmalaya perlu merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan inovatif untuk mengantisipasi dinamika ekonomi nasional dan global, guna memastikan ketahanan ekonomi masyarakat serta optimalisasi potensi unggulan daerah

3.1.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan konsisten, sebagaimana tergambar dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan ADHB, nilai PDRB meningkat dari Rp37.443,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp49.783,14 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan aktivitas ekonomi secara nominal tanpa memperhitungkan inflasi, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 8,61 persen. Hal ini mengindikasikan penguatan kinerja sektor-sektor ekonomi utama serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang merepresentasikan pertumbuhan ekonomi riil juga menunjukkan arah yang stabil dan positif. Dari Rp24.344,86 miliar pada tahun 2020, PDRB ADHK meningkat menjadi Rp28.879,68 miliar pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata tahunan berada pada kisaran 4,6 persen hingga 4,7 persen sejak tahun 2022.

Konsistensi ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global, serta mencerminkan keberhasilan pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal.

Tabel 3.4
PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Berlaku	37.443,45	39.285,64	42.659,50	46.097,96	49.783,14
PDRB Konstan	24.344,86	25.179,48	26.361,68	27.599,15	28.879,68

Sumber: BPS Jawa Barat, Maret 2025

Persentase perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun menjadi indikator ekonomi makro selanjutnya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

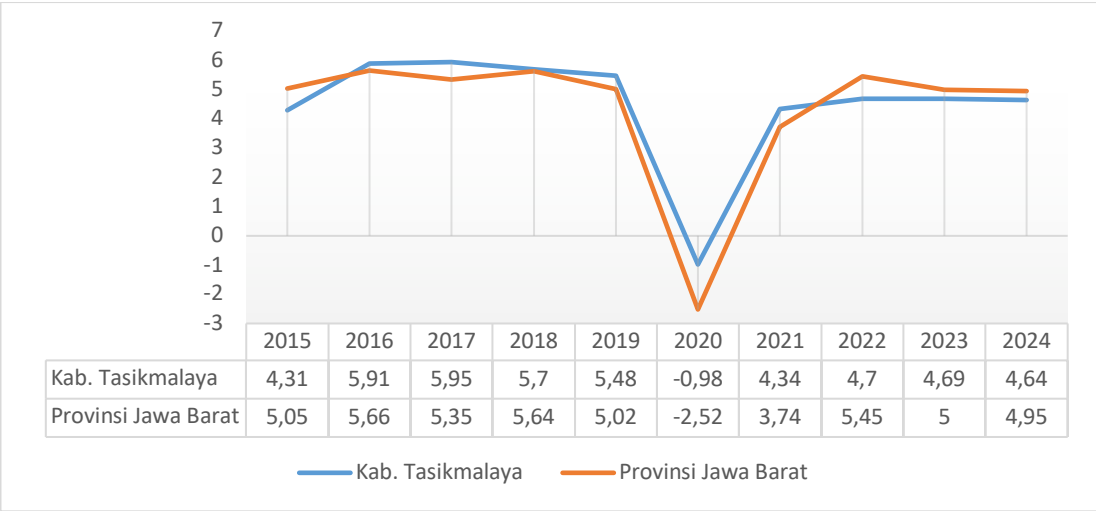
3.1.1.3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Dalam rentang waktu satu dekade terakhir, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan dinamika yang sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Barat, meskipun dengan beberapa perbedaan signifikan dalam besaran angka. Pada tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya relatif stabil, berkisar antara 4,3% hingga 5,95%, bahkan sempat melampaui rata-rata pertumbuhan Jawa Barat pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang cukup kuat, didorong oleh aktivitas ekonomi sektor pertanian, perdagangan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Namun, pada tahun 2020, saat pandemi global melanda, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi cukup dalam di kedua wilayah. Kabupaten Tasikmalaya mencatatkan kontraksi sebesar -0,98%, sementara Jawa Barat mengalami kontraksi yang lebih tajam sebesar -2,52%. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Tasikmalaya yang lebih berbasis sektor domestik memberikan ketahanan relatif lebih baik dibandingkan Jawa Barat yang lebih terdampak akibat sektor industri dan ekspor.

Memasuki masa pemulihan, Kabupaten Tasikmalaya kembali tumbuh sebesar 3,43% di tahun 2021 dan terus meningkat hingga 4,69% di tahun 2023. Meski demikian, pertumbuhan ini masih berada di bawah capaian Jawa Barat yang mencatat angka 5,45% pada tahun 2022 dan 5,00% pada 2023. Proyeksi tahun 2024 juga menunjukkan LPE Kabupaten Tasikmalaya sebesar 4,64%, sedikit di bawah pertumbuhan Jawa Barat sebesar 4,95%.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya cukup stabil, masih terdapat gap struktural yang perlu diatasi untuk mengejar pertumbuhan provinsi (Gambar.34). Diperlukan upaya penguatan sektor unggulan lokal, peningkatan investasi daerah, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berorientasi pada produktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.



Gambar 3.4.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat 2015-2024

Sumber: BPS, 2025

Untuk melihat struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat dari Lapangan Usaha dominan. Diantaranya dapat melalui data statistik distribusi persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 3.5 merinci data historsi sebaran persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama satu dekade (2014-2024).

Tabel 3.5.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya (ADHB %)
Berdasarkan Lapangan Usaha 2014-2024

No	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	39.00	38.34	38.32	38.02	38.02	37.48	37.81	37.61	38.01	37.77	36.81
B	Pertambangan dan Penggalian	0.30	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21
C	Industri Pengolahan	7.28	7.35	7.44	7.43	7.54	7.69	7.62	7.65	7.76	7.98	8.33
D	Pengaduan Listrik dan Gas	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	7.78	7.84	7.74	7.89	8.04	8.18	7.75	8.25	8.11	7.74	8.72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.74	20.49	20.26	19.74	19.17	19.35	19.18	18.19	18.31	18.46	18.00
H	Transportasi dan Pergudangan	3.83	4.30	4.30	4.33	4.29	4.22	4.22	4.11	4.16	4.57	4.70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.30	1.27	1.25	1.30	1.33	1.38	1.43	1.39	1.47	1.49	1.51
J	Informasi dan Komunikasi	2.91	3.08	3.24	3.41	3.33	3.34	4.20	4.31	4.20	4.15	4.16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.93	3.03	3.08	3.10	3.11	3.01	3.06	3.15	3.21	3.26	3.32
L	Real Estate	1.34	1.30	1.24	1.27	1.29	1.31	1.32	1.40	1.38	1.38	1.44
M, N	Jasa Perusahaan	0.38	0.40	0.41	0.42	0.44	0.49	0.43	0.45	0.48	0.50	0.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.91	4.83	4.7	4.52	4.39	4.16	3.95	3.72	3.38	3.31	3.15
P	Jasa Pendidikan/ Education	5.30	5.42	5.61	6.04	6.39	6.71	7.35	7.16	6.86	6.70	7.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.54	0.56	0.58	0.62	0.64	0.66	0.65	0.67	0.67	0.69	0.69
R, S, T, U	Jasa Lainnya/	1.39	1.44	1.47	1.59	1.70	1.72	1.70	1.64	1.71	1.71	1.83
Produk Domestik Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

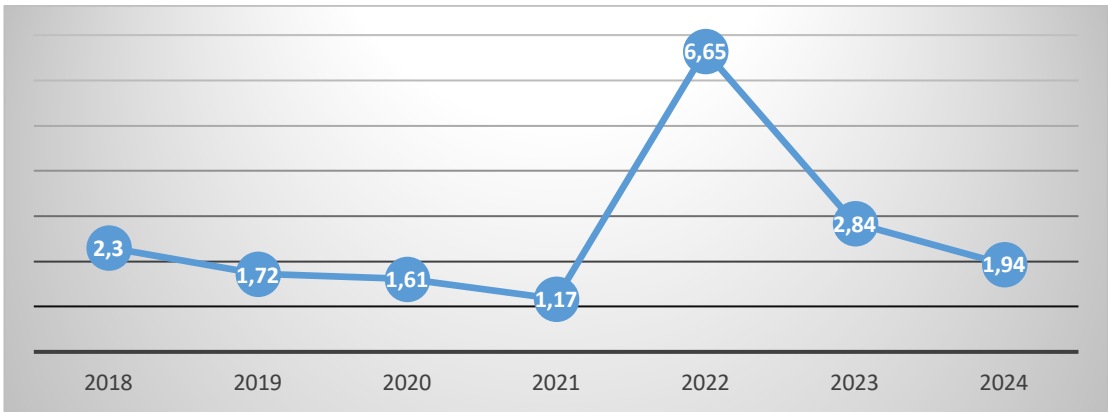
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Tabel 3.5 menggambarkan struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat agraris, dimana Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi Kontributor paling dominan PDRB yakni 36,81 persen pada 2024. Kecenderungan penurunan kontribusi di sektor primer ini, yang semula 39 persen pada 2014, menunjukkan ada indikasi perubahan struktur perekonomian dari mengandalkan produksi hasil bumi menjadi bertumpu kepada pengolahan dan perdagangan. Perubahan struktur perekonomian ini perlu dipercepat pada 2026 agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai tambah produk ekonomi lokal.

3.1.1.3.3. Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, dan demikian halnya investasi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi yang terkendali merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya diperhitungkan sama dengan inflasi Kota Tasikmalaya, karena berada dalam satu radar perhitungan.

Secara umum inflasi di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Gambar 3.5 menggambarkan fluktuasi angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 – 2024.



Gambar 3.5
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

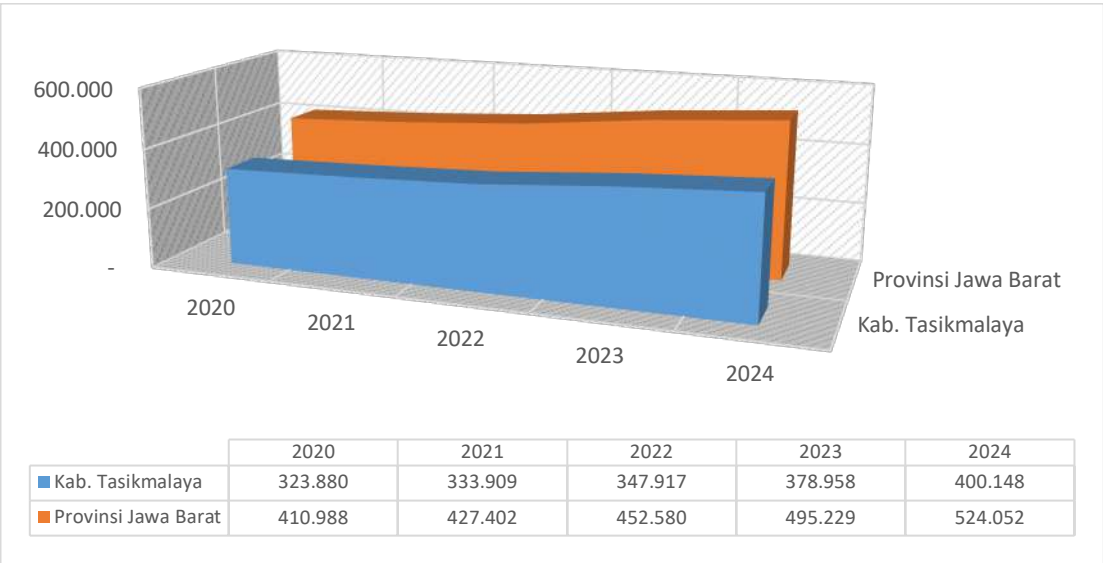
Pada Desember 2023, inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 2,84 persen) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,54. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok transportasi sebesar 0,52 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,52 persen.

Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kabupaten Tasikmalaya masih terjaga pada tingkat yang kondusif.

3.1.1.3.4. Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kenaikan konsisten sebesar 23,6% dalam lima tahun (2020–2024), dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 4,7%. Namun, angka tersebut tetap 21–24% lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat, yang tumbuh lebih cepat (27,5% atau 5,5% per tahun). Selisih absolut antara Tasikmalaya dan Jabar melebar dari Rp87.108 (2020)

menjadi Rp123.904 (2024), mengindikasikan ketertinggalan daya beli masyarakat Tasikmalaya meski pertumbuhannya relatif stabil (Gambar 3.6). Lonjakan tertinggi terjadi pada 2023 (8,9%), diduga dipengaruhi inflasi komoditas pangan dan energi.



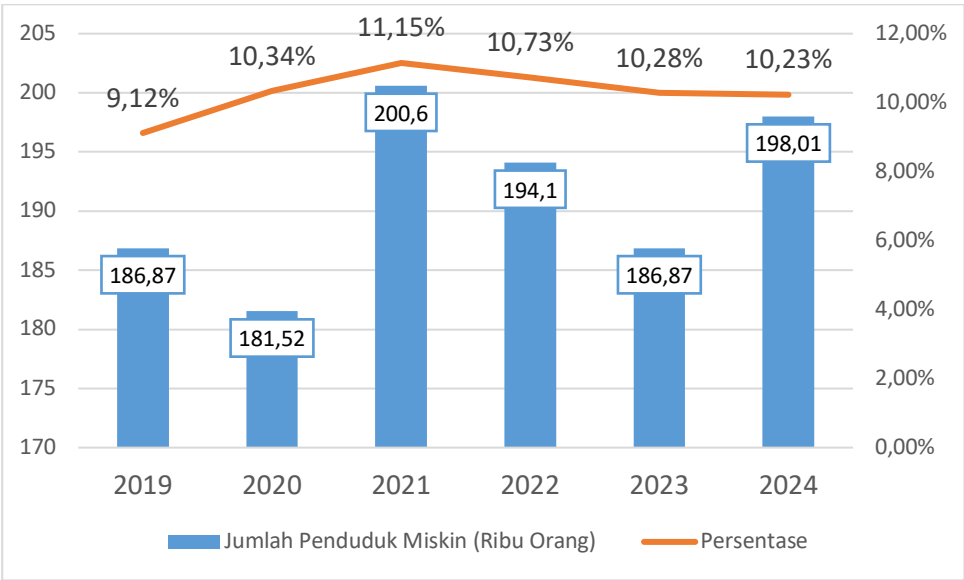
Gambar 3.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Dari grafik garis kemiskinan pada Gambar 3.6 dapat diproyeksikan disparitas ini memerlukan intervensi terfokus dalam RKPD 2026, seperti penguatan bantuan sosial berbasis kebutuhan pokok, program peningkatan pendapatan UMKM, dan pengendalian harga pangan lokal. Sinergi dengan kebijakan provinsi juga krusial untuk mengurangi kesenjangan, misalnya melalui alokasi anggaran padat karya atau pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan. Pemantauan berkala garis kemiskinan perlu diintegrasikan dengan evaluasi program, memastikan kenaikan tidak melampaui pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penduduk dengan pendapatan perbulan perkapita di bawah garis kemiskinan termasuk kategori penduduk miskin. Di Kabupaten Tasikmalaya Jumlah penduduk miskin tahun 2024 sebanyak 198,01 ribu jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 186,87 ribu jiwa. Namun demikian, persentase penduduk miskin mengalami

penurunan dari 10,28% tahun 2023 menjadi 10,23% pada tahun 2024.

Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 merupakan capaian terendah dalam kurun 4 tahun terakhir yaitu mencapai 9,12%. Hal ini menunjukkan pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri telah berhasil menekan jumlah kemiskinan. Namun demikian pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kontraksi ekonomi menyebabkan jumlah dan persentase penduduk miskin bertambah pada tahun 2020 dan 2021 (Gambar 3.7)



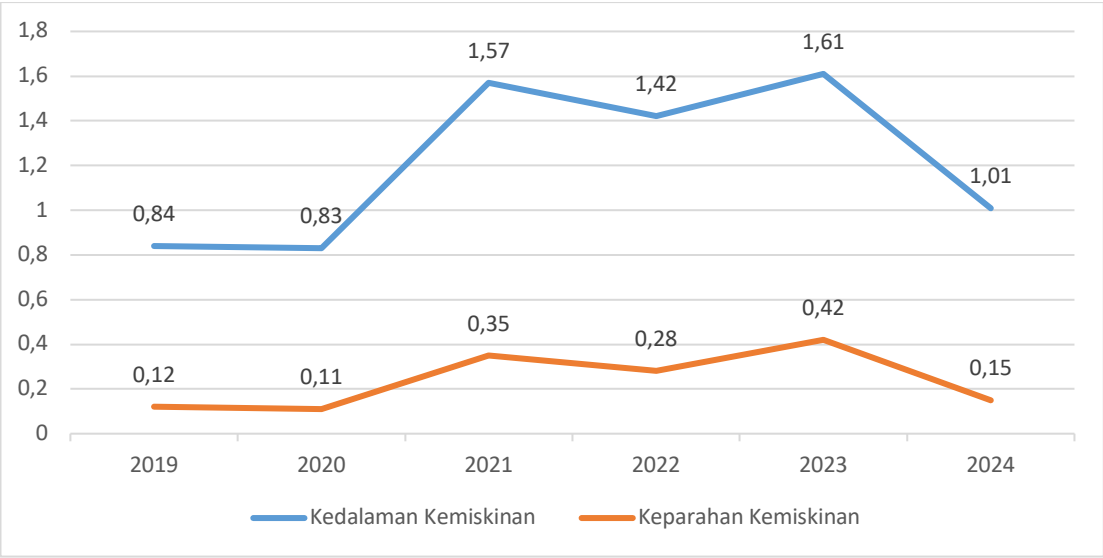
Gambar 3.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Data tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren meningkat signifikan pasca pandemi, dari 0,83 (2020) melonjak menjadi 1,61 (2023), sebelum turun ke 1,01 (2024). Lonjakan ini mengindikasikan membesarnya kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, khususnya selama periode krisis ekonomi. Sementara itu, tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang semula stabil di kisaran 0,11-0,12 (2019-2020), melonjak tiga kali lipat menjadi 0,42 (2023), menunjukkan memburuknya ketimpangan di antara masyarakat miskin sendiri, sebelum akhirnya membaik di 2024 (Gambar 3.8).

Fluktuasi kedua indikator ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah. Penurunan P1 dan P2 di 2024 menunjukkan dampak positif program bantuan sosial, namun nilai yang masih lebih tinggi

dibanding era pra-pandemi mengisyaratkan perlunya pendekatan jangka panjang. RKPD 2026 perlu memprioritaskan penguatan ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui program padat karya, pelatihan UMKM, serta sistem monitoring harga pangan yang ketat untuk mencegah gejolak serupa di masa depan.



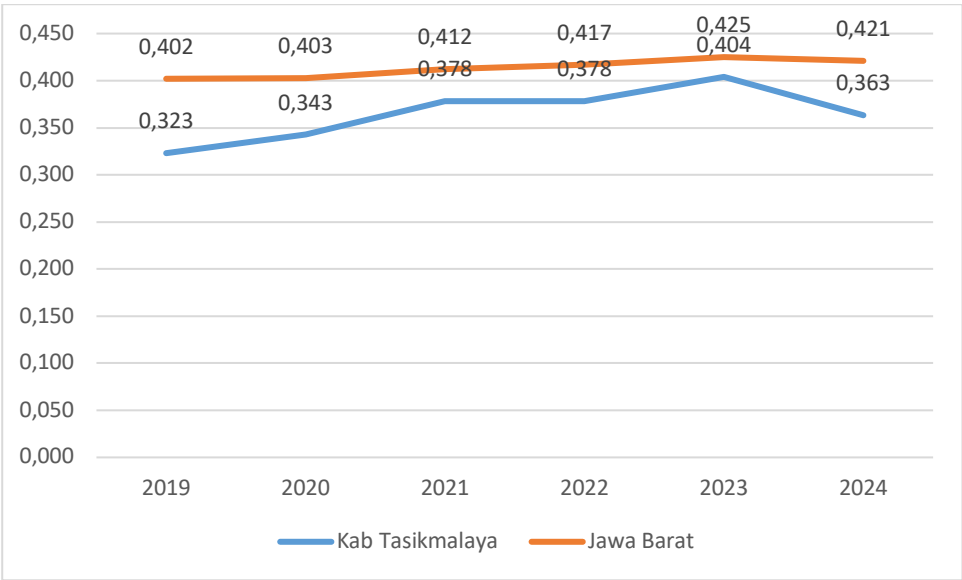
Gambar 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

3.1.1.3.5. Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*).

Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren meningkat dari 0,323 (2019) menjadi 0,404 (2023), sebelum turun menjadi 0,363 (2024), mengindikasikan memburuknya ketimpangan pengeluaran selama lima tahun terakhir, terutama pada masa pandemi. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi namun relatif stabil, berkisar antara 0,402 (2019) hingga 0,425 (2023), dengan penurunan tipis di 2024

(0,421). Meski lebih rendah dibanding rata-rata provinsi, kenaikan Gini Ratio Tasikmalaya yang signifikan (25% dalam 5 tahun) perlu menjadi perhatian serius.



Gambar 3.9
Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Dan Jawa Barat
Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Kesenjangan yang meningkat di Tasikmalaya, terutama pada 2021-2023, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif, seperti program padat karya, perluasan akses kredit UMKM, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Sementara itu, meski Gini Ratio Jawa Barat lebih tinggi, stabilitasnya menunjukkan struktur ketimpangan yang sudah mapan. RKPD 2026 perlu fokus pada penguatan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi disparitas di Tasikmalaya.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian

3.1.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan menghadapi tantangan multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor global, regional, dan domestik. Kebijakan proteksionisme era Presiden AS Donald Trump khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Trump menerapkan tarif impor yang tinggi terhadap

berbagai produk dari berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan kebijakan *Discounted Reciprocal Tariffs* sebesar 32 persen. Hal ini berdampak pada industri pengolahan yang bertujuan ke Amerika Serikat seperti produk Tas, sepatu dan produk tekstil dari Indonesia.

Kebijakan ini memicu perang dagang tidak hanya AS-China dan mengganggu rantai pasok global - sebuah risiko yang tetap aktual hingga 2026 mengingat kemungkinan kembalinya politik proteksionis di AS.

Di tingkat global, Bank Indonesia (2025) mencatat ekonomi dunia masih berjuang melawan dampak kebijakan Trump yang meninggalkan warisan ketidakstabilan perdagangan. Kebijakan "*America First*" dan "*Make America Wealthy Again*" Trump telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mencari pasar alternatif dan mengurangi ketergantungan pada AS. Namun, perlambatan ekonomi Tiongkok (proyeksi 4,5% pada 2026) dan resesi di Eropa memperumit upaya diversifikasi ini (Kemenko Perekonomian, 2025). LPEM FEB UI (2025) menambahkan bahwa kebijakan tarif Trump telah menciptakan preseden berbahaya dimana proteksionisme menjadi alat politik yang semakin umum digunakan, termasuk oleh negara-negara Eropa.

Dalam konteks regional, warisan kebijakan Trump turut mempengaruhi dinamika ASEAN. BKPM (2025) mencatat perusahaan multinasional kini lebih berhati-hati dalam investasi langsung akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan. Vietnam dan Thailand yang menjadi alternatif tujuan investasi selama perang dagang AS-China terus mempertahankan daya tariknya, menciptakan persaingan ketat bagi Indonesia (ADB, 2025). Kebijakan tarif Trump khususnya berdampak pada industri manufaktur Indonesia, dimana beberapa produk seperti tekstil dan alas kaki sempat terkena dampak langsung (Kemenperin, 2020).

Tantangan domestik Indonesia semakin kompleks dengan adanya warisan ketidakpastian global ini. Ketergantungan pada ekspor komoditas (60% total ekspor, BPS 2025) membuat perekonomian rentan terhadap gejolak kebijakan perdagangan negara

lain. Bank Indonesia (2025) memproyeksikan inflasi inti 2026 sekitar $3.5 \pm 1\%$, sebagian dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas global yang semakin tidak stabil pasca-era Trump. CSIS (2025) menambahkan bahwa depresiasi Rupiah masih menjadi risiko utama, terutama jika The Fed kembali menerapkan kebijakan moneter ketat seperti di era Trump.

Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa strategi kebijakan telah diidentifikasi:

1. Diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China, belajar dari pengalaman era Trump (Bank Indonesia, 2025)
2. Percepatan industri hilir sebagai respons terhadap proteksionisme global (Kemenperin, 2025)
3. Penguatan kerja sama regional melalui ASEAN untuk menciptakan blok perdagangan yang lebih tangguh (BKPM, 2025)
4. Reformasi subsidi energi secara bertahap untuk mengurangi beban fiskal (Kemenkeu, 2025)

Dengan mempertimbangkan warisan kebijakan Trump dan perkembangan terkini, tahun 2026 akan menjadi ujian penting bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Pembelajaran dari era Trump menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia perlu meningkatkan ketahanannya terhadap guncangan eksternal melalui diversifikasi yang lebih agresif dan transformasi struktural yang mendalam.

Ketergantungan pada pasar ekspor untuk pertumbuhan ekonomi merupakan dinamika yang perlu diperhatikan. Meskipun Indonesia telah lama mengandalkan pasar ekspor sebagai pendorong pertumbuhan, penurunan harga komoditas telah memengaruhi *terms of trade*. Diversifikasi ekspor menjadi strategi yang semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Perubahan paradigma ini akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka jalan menuju keberlanjutan dan ketahanan ekonomi di masa depan.

3.1.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat

Pada 2026, Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu motor penggerak industri nasional, menghadapi tantangan menarik dalam menjaga daya saingnya di tengah dinamika investasi yang semakin kompetitif. Sebagai wilayah yang menyumbang sekitar seperlima dari PDB manufaktur nasional, Jawa Barat sesungguhnya memiliki fondasi industri yang kuat, meskipun perlu terus beradaptasi dengan perkembangan terkini.

Dari aspek biaya produksi, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian bersama. Upah Minimum Provinsi yang mencapai Rp5,067 juta pada 2025, meskipun mencerminkan peningkatan kesejahteraan, memang perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Demikian pula dengan tarif listrik industri dan efisiensi logistik yang menjadi bahan evaluasi bersama para pemangku kepentingan.

Dalam hal perizinan usaha, kemajuan yang telah dicapai melalui sistem online patut diapresiasi, meskipun tentu masih ada ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut. Proses perizinan yang saat ini memakan waktu sekitar 28 hari bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencapai standar pelayanan yang lebih baik lagi.

Persaingan dengan daerah lain maupun negara tetangga merupakan keniscayaan dalam era globalisasi. Vietnam dan Thailand, misalnya, telah menunjukkan kemajuan dalam menarik investasi tertentu. Namun, Jawa Barat memiliki keunggulan komparatifnya sendiri, seperti sumber daya manusia yang melimpah dan lokasi yang strategis.

Dampak terhadap ketenagakerjaan memang perlu diwaspadai, namun sekaligus menjadi momentum untuk percepatan transformasi. Beberapa kasus relokasi industri sebenarnya memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk meningkatkan daya saing. Penyesuaian di sektor tenaga kerja ini sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan.

Beberapa langkah bijak yang mungkin dapat dipertimbangkan Bersama. Pertama, Sinergi kebijakan upah dengan peningkatan

produktivitas melalui program pelatihan berkelanjutan, yang melibatkan dunia usaha dan pendidikan vokasi.

Selanjutnya, Optimalisasi sistem perizinan yang telah ada dengan pendekatan lebih proaktif, termasuk asistensi bagi calon investor dalam memenuhi persyaratan. Kemudian, Penguatan infrastruktur pendukung industri secara bertahap, dengan memprioritaskan kawasan-kawasan strategis terlebih dahulu.

Tidak kalah pentingnya adalah penyediaan informasi yang komprehensif tentang potensi dan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat, termasuk *success story* berbagai perusahaan yang telah sukses beroperasi di Jawa Barat. Dan selanjutnya pengembangan program kemitraan industri-UMKM untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kokoh.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, Jawa Barat memiliki semua potensi untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi justru meningkatkan posisinya sebagai destinasi investasi yang menarik.

3.1.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kabupaten Tasikmalaya saat ini berada pada milestone dalam pembangunan ekonominya. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional (menyumbang 36,81% PDRB) menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari fluktuasi harga komoditas, dampak perubahan iklim, hingga keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja baru. Dengan 58% angkatan kerja masih bergantung pada sektor pertanian yang memiliki produktivitas relatif rendah (Rp28 juta/kapita/tahun), transformasi menuju ekonomi berbasis nilai tambah melalui pengolahan hasil dan penguatan sektor perdagangan-jasa menjadi sebuah keharusan.

Salah satu masalah mendasar adalah rendahnya nilai tambah produk pertanian. Sebagai contoh, produksi singkong yang mencapai 540.000 ton per tahun sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah sebagai bahan baku industri tepung ke luar daerah, dengan margin keuntungan petani yang hanya berkisar 8-12%. Kondisi ini

diperparah oleh minimnya infrastruktur pengolahan di wilayah setempat.

Ironisnya, 65% bahan baku industri makanan olahan di Tasikmalaya justru diimpor dari kabupaten tetangga karena ketiadaan industri pengolahan yang memadai. Di sisi pemasaran, hanya 23% produk UMKM lokal yang mampu menembus pasar ritel modern akibat kendala kualitas, kemasan, dan kontinuitas pasokan.

Transformasi ekonomi Tasikmalaya memerlukan pendekatan terpadu yang memadukan penguatan sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu, pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan seperti singkong (menjadi mocaf), padi (beras organik), dan sayuran (produk olahan) dapat meningkatkan nilai tambah hingga 300%. Pola kemitraan inti-plasma antara petani dan pengusaha pengolahan perlu dibangun dengan skema bagi hasil yang adil. Di sisi hilir, revitalisasi pasar tradisional menjadi pusat distribusi produk olahan lokal melalui peningkatan standar kualitas, pengembangan cold chain, dan integrasi dengan platform e-commerce dapat memperluas akses pasar.

Penguatan sektor jasa pendukung menjadi pilar penting lainnya dalam transformasi ini. Kehadiran food testing laboratory untuk sertifikasi produk, pelatihan digital marketing khusus produk agro, serta lembaga pembiayaan mikro berbasis komoditas akan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha. Kearifan lokal seperti pengolahan dodol dan kerajinan anyaman yang selama ini menjadi ciri khas Tasikmalaya dapat ditingkatkan nilai ekonominya melalui inovasi desain dan pemasaran modern.

Dampak dari transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dari Rp28 juta menjadi Rp75 juta per kapita per tahun, menyerap 15.000 tenaga kerja baru di sektor pengolahan, serta meningkatkan kontribusi sektor perdagangan-jasa dari 18% pada 2024 menjadi 20% PDRB pada 2026.

Langkah awal yang dapat segera dilakukan mencakup penyusunan peta jalan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan, pembentukan pusat inovasi produk lokal, serta program magang industri bagi generasi muda.

Transformasi ekonomi Tasikmalaya bukan berarti meninggalkan sektor pertanian, melainkan justru memberdayakannya melalui pendekatan industrialisasi pedesaan. Dengan strategi yang tepat, kabupaten ini memiliki potensi untuk bertransformasi dari wilayah agraris tradisional menjadi pusat agroindustri yang berdaya saing, sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan bagi masyarakatnya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah pedoman atau strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan aset daerah.

Secara umum arah kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pada awal tahun 2025 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan keuangan yang secara langsung mempengaruhi kondisi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai respons terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dasar APBD murni dan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada semester pertama tahun berjalan, maka pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 kebijakan keuangan daerah diarahkan pada penguatan stabilitas fiskal daerah, peningkatan efisiensi belanja, serta koreksi terhadap pembiayaan guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi aktual. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:

3.2.1 Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 difokuskan pada dua hal yaitu pertama upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta digitalisasi sistem pelayanan pajak dan retribusi. Kedua untuk penyesuaian target pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kebijakan dan informasi terbaru alokasi dana transfer.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah;
2. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer Pusat pada rekening pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/Km.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-35/PK/PK.2/2025 Tanggal 17 April 2025 tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility (TDF) ke RKUD dalam rangka

Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer pada rekening Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1234/KU.03.02/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Rencana Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2025.

Berikut gambaran kondisi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data dan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, sehingga untuk menyesuaikan dilaksanakan perubahan target Pendapatan Daerah sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian		APBD Murni TA 2025	Perubahan Penjabaran I TA 2025	Perubahan Penjabaran II TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025	Tambah/(Kurang) Terhadap Perubahan Penjabaran II TA 2025
1	2		3	4	5	6	7 =6-5
1.	Pendapatan Asli Daerah		483.209.585.669,00	483.209.585.669,00	483.209.585.669,00	394.575.335.570,00	(88.634.250.099,00)
	a.	Pajak Daerah	183.021.446.016,00	183.021.446.016,00	183.021.446.016,00	189.581.844.732,00	6.560.398.716,00
	b.	Retribusi Daerah	262.205.050.047,00	262.205.050.047,00	262.205.050.047,00	21.899.983.514,00	(240.305.066.533,00)
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.524.687.846,00	28.524.687.846,00	28.524.687.846,00	21.774.181.185,00	(6.750.506.661,00)
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.458.401.760,00	9.458.401.760,00	9.458.401.760,00	161.319.326.139,00	151.860.924.379,00
2.	Pendapatan Transfer		2.924.316.782.449,00	2.953.676.697.889,00	2.923.648.686.889,00	2.943.650.689.307,00	20.002.002.418,00
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	2.770.779.581.000,00	2.771.808.593.000,00	2.716.780.582.000,00	2.722.931.036.872,00	6.150.454.872,00
	1)	Dana Perimbangan	2.364.086.054.000,00	2.365.115.066.000,00	2.310.087.055.000,00	2.316.237.509.872,00	6.150.454.872,00
		a)	Dana Transfer Umum	1.667.343.543.000,00	1.667.343.543.000,00	1.637.865.601.818,00	12.100.883.818,00
		1)	DBH	80.346.907.000,00	80.346.907.000,00	92.447.790.818,00	12.100.883.818,00
		2)	DAU	1.586.996.636.000,00	1.586.996.636.000,00	1.545.417.811.000,00	-
		b)	Dana Transfer Khusus	696.742.511.000,00	697.771.523.000,00	678.371.908.054,00	(5.950.428.946,00)
		1)	DAK Fisik	53.581.930.000,00	53.581.930.000,00	40.132.744.000,00	-

No	Uraian					APBD Murni TA 2025	Perubahan Penjabaran I TA 2025	Perubahan Penjabaran II TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025	Tambah/(Kurang) Terhadap Perubahan Penjabaran II TA 2025
1	2					3	4	5	6	7 =6-5
				2)	DAK Non Fisik	643.160.581.000,00	644.189.593.000,00	644.189.593.000,00	638.239.164.054,00	(5.950.428.946,00)
		2)	Dana Insentif Fiskal Daerah			7.133.207.000,00	7.133.207.000,00	7.133.207.000,00	7.133.207.000,00	-
		3)	Dana Desa			399.560.320.000,00	399.560.320.000,00	399.560.320.000,00	399.560.320.000,00	-
	b	Transfer Antar Daerah			153.537.201.449,00	181.868.104.889,00	206.868.104.889,00	220.719.652.435,00	13.851.547.546,00	
		1)	Pendapatan Bagi Hasil			153.537.201.449,00	153.537.201.449,00	153.537.201.449,00	167.388.748.995,00	13.851.547.546,00
		2)	Bantuan Keuangan			-	28.330.903.440,00	53.330.903.440,00	53.330.903.440,00	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					25.430.750.000,00	25.430.750.000,00	25.430.750.000,00	119.165.374.539,00	93.734.624.539,00
	a	Hibah Bonus Produksi Panas Bumi			300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
	b	Hibah Upland			25.130.750.000,00	25.130.750.000,00	25.130.750.000,00	25.130.750.000,00	-	
	c	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			-	-	-	93.734.624.539,00	93.734.624.539,00	
Jumlah Pendapatan						3.432.957.118.118,00	3.462.317.033.558,00	3.432.289.022.558,00	3.457.391.399.416,00	25.102.376.858,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, proyeksi Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Perubahan Penjabaran II, yaitu sebesar Rp3.457.391.399.416,00 atau meningkat sebesar Rp25,1 miliar dari Perubahan Penjabaran II atau meningkat sebesar Rp24,4 miliar dari APBD murni TA 2025. Struktur pendapatan tetap didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp2,94 triliun atau sekitar 85% dari total pendapatan, sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp488,3 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat yaitu sebesar Rp119,1 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD Murni, telah terjadi dinamika terutama pada komponen Bantuan Keuangan dalam Transfer Antar Daerah yang meningkat signifikan dari nihil menjadi Rp53,33 miliar. Kenaikan ini menjadi indikator adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta penyesuaian pada komponen Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, menunjukkan bahwa meskipun secara total pendapatan tidak berubah pada RKPD terakhir, namun struktur dan alokasi antar komponen pendapatan mengalami penyesuaian strategis.

Secara umum Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,71% dari APBD TA 2025 murni yang bersumber dari penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Penyesuaian tersebut secara umum berasal dari target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penghapusan tunggakan kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah pada Tahun 2025, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi;
2. Mengoptimalkan pengelolaan aset, seperti tanah, gedung, dan sarana dan prasarana untuk memperoleh pendapatan melalui sewa menyewa dan kerjasama dengan pihak swasta;

3. Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak (instansi vertikal, BUMD, OPD terkait atau badan/perorangan) dalam pertukaran data, pengelolaan maupun pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan SDM Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
6. Memperkuat koordinasi dan pemenuhan ketentuan yang diarahkan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan transfer daerah.

Sementara itu dari sisi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, terdapat pengurangan pendapatan yang signifikan dari APBD TA 2025 murni karena terdapat efisiensi terhadap pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025. Adapun peningkatan yang diproyeksikan bersumber dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pusat Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya untuk peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah, bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 yang telah disesuaikan pada pergeseran anggaran, dan dari penyesuaian target DBH Provinsi Tahun Anggaran 2025 serta penyaluran Kurang Bayar DBH Provinsi Tahun Anggaran 2024.

3.2.2. Belanja Daerah

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dengan mengoptimalkan alokasi anggaran. Efisiensi ini tercermin melalui penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun. Kebijakan tersebut secara langsung berdampak terhadap kebijakan belanja di seluruh daerah termasuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Inpres tersebut, Presiden mengintruksikan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*Focus Grup Discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Bupati Tasikmalaya menindaklanjuti instruksi diatas melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang selanjutnya hasil efisiensi tersebut telah disesuaikan pada perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun ini menghadapi tantangan fiskal yang cukup signifikan, seiring dengan terjadinya beberapa keadaan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pertama terkait kewajiban menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan yang kedua disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang telah ditargetkan dalam dokumen APBD 2025. Proyeksi SiLPA yang digunakan sebagai salah satu komponen pembiayaan dalam struktur anggaran berdasarkan proyeksi SiLPA tahun sebelumnya.

Dampak dari kondisi tersebut adalah menimbulkan defisit anggaran, yang kemudian mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja secara selektif. Efisiensi belanja menjadi langkah strategis yang diambil guna menjaga stabilitas fiskal dan memastikan agar

pelaksanaan program prioritas daerah tetap berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.

Efisiensi ini dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang bersifat penunjang, menunda belanja yang tidak mendesak, serta mengoptimalkan belanja yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan program dan kegiatan strategis, meskipun dalam keterbatasan fiskal yang ada.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber belanja daerah serta arah kebijakan daerah, proyeksi belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian		APBD Murni TA 2025	Perubahan Penjabaran I TA 2025	Perubahan Penjabaran II TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025	Tambah/(Kurang) Terhadap Perubahan Penjabaran II TA 2025
1	2		3	4	5	6	7 =6-5
1.	Belanja Operasi		2.621.385.202.425,00	2.646.171.587.788,00	2.642.061.089.389,00	2.591.185.865.821,00	(50.875.223.568,00)
	a.	Belanja Pegawai	1.560.854.170.227,00	1.560.854.170.227,00	1.560.854.170.227,00	1.550.859.044.719,00	(9.995.125.508,00)
	b.	Belanja Barang dan Jasa	911.876.571.613,00	936.662.956.976,00	903.305.824.848,00	894.075.859.190,00	(9.229.965.658,00)
	c.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	d.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	e.	Belanja Hibah	144.754.460.585,00	144.754.460.585,00	174.001.094.314,00	140.912.494.314,00	(33.088.600.000,00)
	f.	Belanja Bantuan Sosial	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	5.338.467.598,00	1.438.467.598,00
2.	Belanja Modal		213.287.703.690,00	218.205.483.767,00	193.682.556.166,00	206.062.425.072,00	12.379.868.906,00
	a.	Belanja Tanah	9.776.930.000,00	9.776.930.000,00	6.296.930.000,00	3.880.134.000,00	(2.416.796.000,00)
	b.	Belanja Peralatan dan Mesin	93.592.411.277,00	98.510.191.354,00	97.184.451.236,00	96.653.864.149,00	(530.587.087,00)
	c.	Belanja Gedung dan Bangunan	23.668.038.913,00	23.668.038.913,00	22.629.066.430,00	20.537.649.413,00	(2.091.417.017,00)
	d.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.061.472.500,00	79.061.472.500,00	60.433.264.500,00	77.176.845.510,00	16.743.581.010,00
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.874.807.000,00	6.874.807.000,00	6.824.800.000,00	6.678.451.000,00	(146.349.000,00)

No	Uraian		APBD Murni TA 2025	Perubahan Penjabaran I TA 2025	Perubahan Penjabaran II TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025	Tambah/(Kurang) Terhadap Perubahan Penjabaran II TA 2025
1	2		3	4	5	6	7 =6-5
	f.	Belanja Modal Aset Lainnya	314.044.000,00	314.044.000,00	314.044.000,00	1.135.481.000,00	821.437.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga		30.000.000.000,00	29.655.750.000,00	28.761.165.000,00	28.943.493.400,00	182.328.400,00
4.	Belanja Transfer		670.746.712.003,00	670.746.712.003,00	670.246.712.003,00	665.402.471.810,00	(4.844.240.193,00)
	a.	Belanja Bagi Hasil	18.961.292.003,00	18.961.292.003,00	18.961.292.003,00	19.945.351.810,00	984.059.807,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	651.785.420.000,00	651.785.420.000,00	651.285.420.000,00	645.457.120.000,00	(5.828.300.000,00)
Jumlah Belanja			3.535.419.618.118,00	3.564.779.533.558,00	3.534.751.522.558,00	3.491.594.256.103,00	(43.157.266.455,00)

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Pada tabel diatas, struktur belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 1,24% dari Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari :

A. Belanja Operasi terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai pada rencana perubahan tahun anggaran 2025 mengalami penyesuaian sebagai akibat terkoreksinya SiLPA dan berlakunya pajak penghasilan progresif bagi anggota DPRD;
- 2) Belanja Barang dan Jasa secara umum mengalami penyesuaian yang berasal dari dialokasikannya Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat, kemudian belanja yang bersumber dari rencana penambahan target BLUD dan belanja yang bersifat earmarked bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.
- 3) Belanja Hibah diproyeksikan menurun dari Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disebabkan penyesuaian kemampuan fiskal daerah dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 1774/KU.03/BPKAD Hal Himbauan Pelaksanaan Efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025.
- 4) Belanja Bantuan Sosial berupa uang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tetap, meskipun terdapat penyesuaian jenis belanja bantuan sosial yang bersumber dari DBHCHT mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari kementerian terkait.

B. Belanja Modal pada proyeksi perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,39%.

C. Belanja Transfer pada asumsi Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan;

D. dan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 berkurang akibat adanya alokasi pengaman untuk Pemungutan Suara Ulang berkurang sebesar 3,52%.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan

yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rincian pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian		APBD Murni TA 2025	Perubahan Penjabaran I TA 2025	Perubahan Penjabaran II TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025	Tambah/(Kurang) Terhadap Perubahan Penjabaran II TA 2025
1	2		3	4	5	6	7 =6-5
1.	Penerimaan Pembiayaan		108.200.000.000,00	108.200.000.000,00	108.200.000.000,00	37.940.356.685,00	(70.259.643.315,00)
	a.	SiLPA	108.200.000.000,00	108.200.000.000,00	108.200.000.000,00	37.940.356.685,00	(70.259.643.315,00)
	b.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-
		Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.	-	-	-	-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan		5.737.500.000,00	5.737.500.000,00	5.737.500.000,00	3.737.500.000,00	(2.000.000.000,00)
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	b.	Penyertaan Modal Daerah	5.737.500.000,00	5.737.500.000,00	5.737.500.000,00	3.737.500.000,00	(2.000.000.000,00)
	c.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-

No	Uraian		APBD Murni TA 2025	Perubahan Penjabaran I TA 2025	Perubahan Penjabaran II TA 2025	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025	Tambah/(Kurang) Terhadap Perubahan Penjabaran II TA 2025
1	2		3	4	5	6	7 =6-5
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-
	e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
			102.462.500.000,00	102.462.500.000,00	102.462.500.000,00	34.202.856.685,00	(68.259.643.315,00)

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, 2025

Sebagaimana diketahui bahwa pada APBD Tahun Anggaran 2025 murni telah dianggarkan SiLPA sebesar Rp108.200.000.000,00 sedangkan berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 hanya sebesar Rp37.940.356.685,00 sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap anggaran murni tersebut dengan melakukan penyesuaian pada alokasi pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penyesuaian yang berasal dari penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebesar Rp2.000.000.000,00.

BAB

IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya dorong bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam hal penyusunan dokumen perencanaan oleh Pemerintah Daerah, perlu adanya keselarasan antara dokumen perencanaan yang telah disusun dalam hal ini mulai dari dokumen rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah masih menyesuaikan dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2030.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Prioritas dan program pembangunan Tahun 2025 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

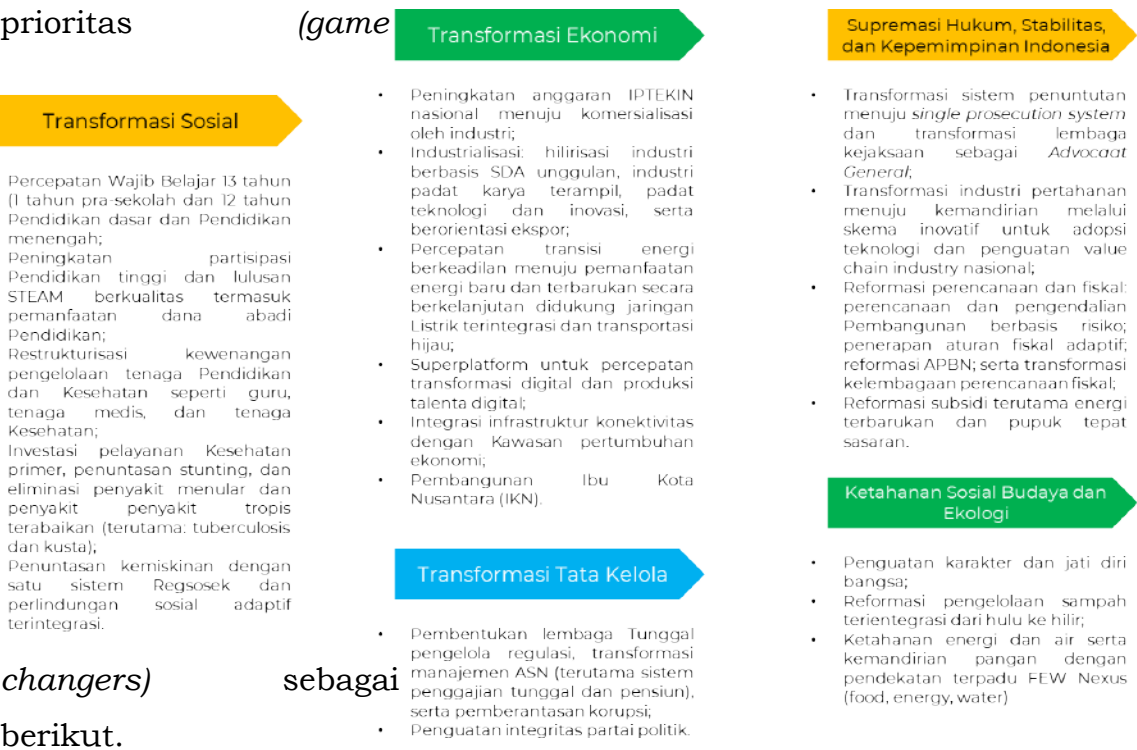
Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.



Gambar 4.1
Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045
Sumber: RPJMN Tahun 2024-2029, 2025

Rencana pembangunan nasional tahun 2024-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut:

Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; **Transformasi Ekonomi** Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; **Transformasi Tata Kelola** Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia** Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, dan **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Kelima fondasi transformasi tersebut diwujudkan melalui upaya transformatif super prioritas



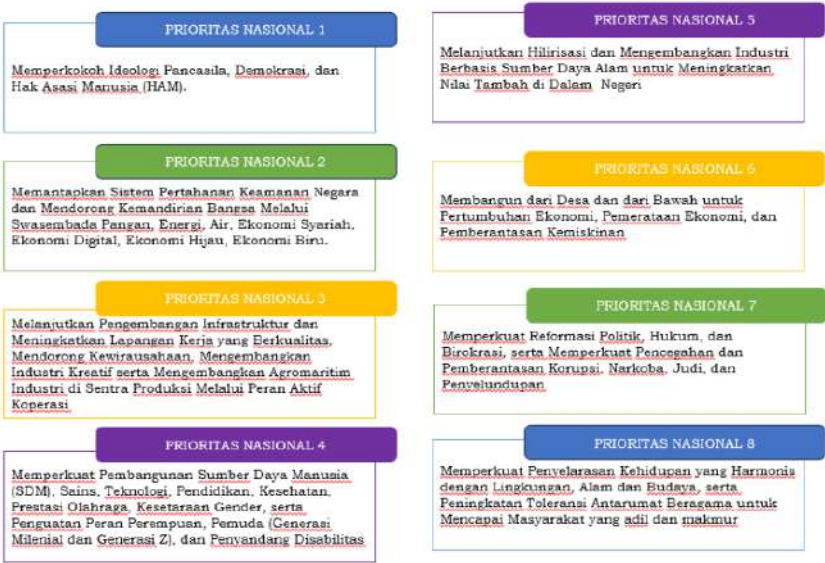
Gambar 4.2
Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)
Sumber: RPJMN Tahun 2024-2029, 2025

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis Yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, Dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi **“Pusat *Cutting-edge* industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”**. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan logistic cost guna meningkatkan comparative advantage investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global brain hub;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green, gray, dan social infrastructure terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target

sasaran pembangunan Tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Gambar 4.3
Prioritas Nasional Tahun 2025
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

RKP Tahun 2025 menjadi fondasi strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multi dimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, Energi, IKN, Digital, IPTEK dan inovasi, serta Agama dan Kebudayaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 4.4

Tantangan Multi Dimensi RKP 2025

Sumber: Kementerian Bappenas, 2025

Berdasarkan dari permasalahan dan tantangan tersebut, tema RKP 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu: SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas mewujudkan SDM berdaya saing dan produktif dengan memfokuskan melalui transformasi sosial, yaitu Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan STEAM Berkualitas; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kebutuhan dan Dual-System. Selain memfokuskan pada transformasi sosial, SDM berdaya saing dan produktif memfokuskan pula pada Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (sebagai contoh: budi pekerti).

Infrastruktur Berkualitas mewujudkan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas melalui transformasi ekonomi, yaitu: Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; Penguatan infrastruktur digital; Pengembangan infrastruktur transisi energi; Percepatan infrastruktur IKN. Selain itu, melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Ekonomi inklusif dan berkelanjutan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yaitu Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Pengembangan skema graduasi bansos; Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; Peningkatan

partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; Peningkatan produksi industri pengolahan; Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025-2029 yaitu “**Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata**” yang dijabarkan ke dalam 4 misi, diantaranya:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya; dan
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*.

Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi yaitu:

1. Misi ke-1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul

Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cagur Bageur, Bener, Pinter, dan Singer

Sasaran :

- Meningkatnya derajat kesehatan individu
- Terbentuknya individu beretika
- Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum
- Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan
- Terbentuknya individu kreatif dan inovatif

2. Misi ke-2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan

Tujuan :

- Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

- Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha

Sasaran

- Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri
- Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan
- Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa
- Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif
- Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja
- Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja
- Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan

3. Misi ke-3 : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya

Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan

Sasaran :

- Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan
- Meningkatnya Ketrampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil
- Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat

4. Misi ke-4 : Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*

Tujuan :

- Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi

- Terciptanya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih

Sasaran :

- Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
- Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan
- Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 masih berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dikarenakan pada saat penyusunannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030 baru dilantik. Tetapi dalam penyusunannya sudah memperhatikan visi dan misi maupun prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030 yaitu: **“TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR”**.

Sedangkan Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu :

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Pernyataan visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai berikut:

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau

pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta’awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta’awun) dalam al-Qur’an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang

berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas

pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah SWT, dalam proses transformasi sosial, baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Visi pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan di atas, dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.

Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu

pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.

2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit *shiddiq, tablig, amanah* dan *fathonah* guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata.

Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keempat misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tersebut didukung dengan 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) indikator tujuan dan 8 (delapan) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sasaran, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025	
				2023	2024	RKPD	P-RKPD
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian dan Berakhlakul Karimah							
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya		I.T.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,38	69,98	70,27	70,27
	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.S.1 Indeks Pendidikan	Poin	61,62	61,68	62,73	61,88
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.S.2 Indeks Kesehatan	Poin	82,88	83,17	83,58	83,38
	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.S.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	68,22	70,21	68,65	71,11
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.S4. Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	35,82	41,42	39,32	41,45
	S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.S.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,47	87,64	87,82	87,82
		I.S.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	575* (Menuju Madya)	595* (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.							

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025	
				2023	2024	RKPD	P-RKPD
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.T.2 Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,22 (BB)	71,25* (BB)	71,30 (BB)	80,01 (A)
		I.S.7 Nilai LPPD	Skor	3,38*	3,40* (Sedang)	3,42 (Tinggi)	3,42 (Tinggi)
		I.S.8 Nilai SAKIP	Skor	64,20 (B)	64,80 (B)	64,30 (B)	64,85 (B)
		I.S.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,72	82,48	81,80 (Baik)	82,50 (Baik)
		I.S.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	70,144	84,007	70,50	84,117
		I.S.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	71,32	80,02	72,30	80,07
		I.S.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	43,12 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)	52 (Inovatif)	49 (Inovatif)
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan		I.T.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,7	4,64	4,80	4,66 – 5,16
	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.S.13 PDRB Per Kapita	%	24,17	25,92	26,40	26,10

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025	
				2023	2024	RKPD	P-RKPD
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Wilayah, Dunia Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.							
T.4 Meningkatkan investasi daerah		I.T.4 Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp Juta	8.841.080	9.838.270	8.533.310	9.987.654
	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.S.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	110,96	-48,85	5	2,50

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2024-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran PN 1 yaitu mendorong Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan sasaran PN 2 yaitu mendorong: (a) *Asia Power Index (Military Capability)*; (b) *Asia Power Index (Diplomatic Influence)*; (c) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya; (d) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU); (e) Indeks Ketahanan Energi; (f) Kapasitas tampungan air; (g) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan; (h) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; (i) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global; (j) Indeks Ekonomi Hijau; (k) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer; (l) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah; (m) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; (n) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan (o) Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan dan Kumulatif.
3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan sasaran PN 3 yaitu mendorong: (a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah; (b) Rasio Kewirausahaan; (c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB; (d) Rasio PDB Pariwisata; (e) Devisa Pariwisata; (f) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif; (g) Aset

- Perbankan/PDB; (h) Aset Dana Pensiun/PDB; (i) Aset Asuransi/PDB; (j) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB; (h) Aset Dana Pensiun/PDB; (k) Total Kredit/PDB; (k) Total Kredit/PDB; dan (l) Inklusi Keuangan.
4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4, yaitu Matematika, Sains), Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, Harapan lama sekolah; (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi; (c) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi; (d) Tingkat Penguasaan Iptek: Pengeluaran Iptek dan Inovasi dan Peringkat Indeks Inovasi Global; (e) Tingkat Pengangguran Terbuka; (f) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; (g) Usia Harapan Hidup; (h) Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) dan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; (i) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); (j) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; (k) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); dan (l) Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
 5. Prioritas Nasional/PN 5 yaitu, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5, yaitu mendorong: (a) Rasio PDB Industri Pengolahan; (b) Pembentukan Modal Tetap Bruto; (c) Ekspor Barang dan Jasa; dan (d) Biaya Logistik.
 6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6, yaitu mendorong: (a) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk; (b) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; (c) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal; (d) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah

Metropolitan terhadap nasional; (e) Persentase desa mandiri; dan (f) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 yaitu mendorong: (a) Return on Asset (ROA) BUMN; (b) Indeks Integritas Nasional; (c) Indeks Materi Hukum; (d) Indeks Pelayanan Publik; (e) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (f) Indeks Persepsi Korupsi; (g) Indeks Pembangunan Hukum; (h) Rasio Perpajakan terhadap PDB; dan (i) Tingkat Inflasi.
8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8, yaitu mendorong: (a) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); (b) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB); dan (c) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2025 yaitu **“Penguatan Fondasi Aksesibilitas Layanan Dasar”**.

Adapun Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2025 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Langkah Ngawangun Jawa Barat meliputi:

1. **Langkah Kahiji**, yaitu infrastruktur jalan (jalan leucir), pembangunan rumah rakyat miskin, 100% elektrifikasi, dan sanitasi lingkungan;
2. **Langkah Kadua**, yaitu jaringan irigasi (cai ngalir), ekosistem ekonomi pertanian organik;
3. **Langkah Katilu**, yaitu pendidikan berkarakter, SMA/SMK gratis, ruang kelas baru, 10 ribu manajer putra daerah (beasiswa);
4. **Langkah Kaopat**, yaitu lapangan kerja baru, mendorong investasi, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif;

5. **Langkah Kalima**, yaitu terjaminnya layanan kesehatan, RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus, beasiswa dokter spesialis;
6. **Langkah Kagenep**, yaitu penanganan stunting dan gizi buruk, pangan bergizi dan nutrisi tinggi, industri pengobatan kearifan lingkungan;
7. **Langkah Katujuh**, yaitu reboisasi lingkungan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai, kampung adat dan nelayan;
8. **Langkah Kadalapan**, yaitu pengelolaan sampah mandiri;
9. **Langkah Kasalapan**, yaitu peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, RT, RW, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, dan birokrasi melayani masyarakat.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 untuk Tahun 2025, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan Tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional Tahun 2025.

4.2.3. Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

4.2.3.1. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Tahun 2024, arah kebijakan dari RPJMD, dan arah kebijakan RKP serta RKPD Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional. Proses penyusunan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
SDM Berdaya Saing dan Produktif	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kemampuan literasi dan numerasi siswa dibawah kompetensi minimum.	Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas
		Belum tuntasnya pembangunan rumah sakit pemerintah di 4 lokasi (Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)	
		Masih kurangnya tenaga kesehatan dalam menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
		Perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	
		Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan	
		Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	
		Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya	

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
		Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai	Penanganan Kemiskinan
		Data kemiskinan yang tersedia belum terintegrasi dan termutakhirkan	
		Intervensi program dan kegiatan terhadap sasaran belum optimal	
		Kompetensi angkatan kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja	Penangan Pengangguran
		Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai	
		Belum optimalnya upaya pencegahan stunting (remaja minum tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan terhadap calon pengantin, asupan gizi yang baik bagi ibu hamil/menyusui serta balita).	Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB
		Masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kandungan.	
		Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.	
		Masih tingginya inflasi	Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro	
		Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat produk	
		Belum teralokasinya Pasar Singaparna	
		Kurangnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai perilaku kepariwisataan (Sapta Pesona dan CHSE)	Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas
		Masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pariwisata (destinasi wisata dan desa wisata)	
		Belum optimalnya kerjasama dan jejaring ekonomi kreatif	
		Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisata
		Masih terbatasnya dokumen dan media potensi investasi Kabupatn Tasikmalaya	
		Terbatasnya produk pertanian yang mempunyai nilai tambah	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
		Terbatasnya lahan pertanian organik yang disertifikasi Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan	
Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Masih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak Belum memadainya pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat yang bersumber dari daerah irigasi Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan rumah layak huni Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
		Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat belum memadai dan beberapa bangunan perkantoran yang menyelenggarakan pelayanan publik masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya.	Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
		Masih kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi bencana kebakaran dan non kebakaran.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		Masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran.	
SDM Berdaya Saing dan Produktif	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
		Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan	

Sumber: Hasil analisis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (2025)

Berdasarkan hasil perumusan sebagaimana Tabel 4.2 di atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yaitu:

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Keenam Pelayanan Dasar tersebut merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah supaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari keenam pelayanan dasar tersebut dapat terwujud secara baik sesuai dengan standar yang diharapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah fundamental dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi semua penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan semua penduduk Indonesia. Pelayanan dasar ini juga memastikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki angkatan kerja yang sehat dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Namun demikian, akses dan kualitas pelayanan dasar antar daerah dan kelompok masyarakat menjadi penghambat bagi pertumbuhan Kabupaten Tasikmalaya. Di sektor pendidikan, kurangnya tenaga pendidik ASN adalah persoalan signifikan, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan

peningkatan upaya yang intensif. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Di sektor kesehatan, masih banyak rumah sakit pemerintah dan swasta belum memenuhi standar minimum. Masih banyak rumah tangga berpendapat rendah belum memiliki rumah yang memadai, dan ketiadaan akses air minum dan sanitasi di banyak tempat berpengaruh pada tingginya angka penyakit menular dan stunting.

Permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar; khususnya di antara masyarakat marginal; kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; tidak meratanya distribusi sarana dan prasarana; kurangnya pendekatan baru dan inovatif dalam penyelenggaraan layanan; serta rendahnya koordinasi lintas sektor.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan tetap menjadi prasyarat utama bagi manusia untuk tumbuh, berkembang, dan berperan aktif dalam pembangunan secara optimal. Di era 2025, tantangan Kesehatan semakin kompleks, termasuk peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, perubahan gaya hidup, serta isu kesehatan mental yang makin mendapat perhatian. Dalam menghadapi tantangan tersebut, derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau, dan responsive menjadi kunci dalam memastikan setiap individu memperoleh haknya untuk hidup sehat dan produktif.

Pada tahun 2025, pembangunan di bidang Kesehatan tidak lagi hanya berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana untuk layanan kuratif, tetapi semakin menitikberatkan pada

pendekatan promotif dan preventif secara terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mendukung pendekatan ini, antara lain melalui pemberian tambahan asupan gizi bagi bayi dan balita, peningkatan literasi gizi masyarakat, serta pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Berkat upaya tersebut, derajat kesehatan masyarakat menunjukkan tren peningkatan. Hal ini tercermin dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH) yang naik dari 73,87 tahun pada tahun 2023 menjadi 74,06 tahun pada tahun 2024. Namun, peningkatan ini masih tergolong belum signifikan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan perlu terus diperkuat secara holistik dan berkelanjutan, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta didukung oleh kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

3. Penanganan Kemiskinan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Tasikmalaya, tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami dinamika, salah satunya tercermin dari angka kemiskinan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 10,28% (186,90 ribu jiwa) dan sedikit mengalami penurunan menjadi 10,23% (186,80 ribu jiwa) pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat telah tercapai secara optimal. Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya rumah tangga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 181,282 rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan telah menyentuh lapisan kemiskinan struktural yang lebih sulit diatasi. Fenomena ini umum terjadi ketika angka kemiskinan memasuki titik kritis, sehingga strategi pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara lebih konsisten, terarah, dan konvergen. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan

memerlukan sinergi lintas sektor serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, agar program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh akar permasalahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Isu kemiskinan tetap menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan Tahun 2025. Tujuannya mencakup penghapusan segala bentuk kemiskinan di mana pun, penghilangan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan pertanian berkelanjutan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga menekankan pentingnya menjamin kehidupan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan penduduk di semua usia, menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, memperluas akses pembelajaran sepanjang hayat, serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

4. Penanganan Pengangguran

Hingga tahun 2025, isu kemiskinan tetap menjadi tantangan strategis dalam pembangunan daerah. Meningkatnya jumlah warga miskin dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya disebabkan oleh tekanan ekonomi, tetapi juga oleh masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Rendahnya partisipasi angkatan kerja berdampak pada terbatasnya jumlah penduduk yang dapat mengakses peluang kerja, sehingga mempengaruhi peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta menghambat percepatan penurunan angka kemiskinan. Semakin tinggi partisipasi Angkatan kerja, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi, konvergen, dan berbasis data, guna mempersatukan upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

5. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB

Masalah gizi masyarakat masih menjadi kendala yang di hadapi Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan stunting atau gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi, menjadi tantangan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Bahkan, di tahun 2019 lalu, Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam salah satu kabupaten/kota dengan angka stunting cukup tinggi yakni di angka 20,7% pada tahun 2023.

Tingginya angka stunting ini tidak hanya mencerminkan persoalan gizi, tetapi juga terkait erat dengan factor lain, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat, terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kurang optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak di sejumlah wilayah. Jika tidak ditangani secara serius, stunting akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas Kesehatan, kemampuan belajar, produktivita, dan daya saing generasi mendatang. Oleh karena itu penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektor yang terintegrasi, mulai dari edukasi gizi, perbaikan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Selanjutnya, belum optimalnya derajat kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan beberapa hal, yaitu: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2021 AKI masih bernilai 157 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2020 AKB masih bernilai 6 per 1.000 kelahiran hidup; dan c). Kondisi rawan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80,25.

Masih tingginya AKI Kabupaten Tasikmalaya disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil, pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI dan tingginya AKB menunjukkan bahwa peningkatan

kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

6. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tasikmalaya angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 meningkat menjadi 10,23% (186,80 ribu jiwa) dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 10,28% (186,90 ribu jiwa). Dari sisi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, trend rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 (5 tahun) yaitu sebesar 2,99% dengan Rincian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebesar 17,43%, Dana Perimbangan negatif (0,86%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11,05%. Kondisi pandemi menyebabkan proyeksi penerimaan tahun-tahun selanjutnya semakin sulit diprediksi disertai dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan periode 2021-2026.

Pemulihan dan penguatan ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah serta memperluas perlindungan social bagi masyarakat miskin dan rentan. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif, seperti pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, yang didorong melalui peningkatan daya saing, inovasi, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan dan investasi.

7. Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 270.677,66 hektar terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Dari seluruh luasan wilayah administrasi hampir di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdapat potensi daya tarik wisata terutama wisata alam serta Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu penghasil utama berbagai produk pertanian di Jawa Barat, dan memiliki potensi lain dalam bidang kerajinan tangan.

Dengan potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan berbagai sektor, terutama dengan mengembangkan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.031.163 orang. Namun, jumlah tersebut belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah rendahnya daya saing daerah dalam sektor pariwisata. Beberapa aspek yang menyebabkan belum optimalnya daya saing antara lain: a); Pertumbuhan investasi yang sangat rendah hanya , nilai investasi tahun 2024 hanya sebesar Rp2.282.790.000; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun masih terbatas; d) Masih terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan event budaya tahun masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Berbagai upaya pembangunan sektor pariwisata telah dilakukan, seperti pengembangan destinasi wisata, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta perbaikan aksesibilitas transportasi. Namun, langkah-langkah tersebut perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk antar daerah, menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Salah satu strategi yang terus dilanjutkan adalah revitalisasi obyek wisata untuk meningkatkan daya Tarik dan minat kunjungan wisatawan.

8. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi di bidang pertanian dan kepariwisataan

Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian yaitu dari luas wilayah 270.677,66 Ha, lahan pertanian memiliki luas sebanyak 241.518 Ha, sedangkan sisanya sebanyak 29.364 Ha merupakan lahan non-pertanian. Kondisi wilayah seperti ini membuat perekonomian Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh sektor pertanian. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya dalam bidang pertanian yang salah satunya sebagai penghasil kelapa tertinggi ke-1 di Jawa Barat dengan 28.017 ton di tahun 2018 serta Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu produsen pangan utama (beras) di Jawa Barat yaitu nomor 9 dengan produksi 451.232 ton di Tahun 2020.

Berdasarkan data terakhir dari Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp49.783,14 Milyar, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang Rp18.326,33 Milyar atau sekitar 36,81%. Kontribusi kedua didapatkan dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp8.959,52 Milyar (18,00%), dan kontribusi ketiga dari Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.146,39 Milyar (8,33%). Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya, namun trend kontribusinya menunjukkan pola yang fluktuatif.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu pertanian, harus dilaksanakan pengolahan yang diarahkan untuk mewujudkan tumbuhnya usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan harga yang wajar di tingkat petani, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mendukung itu maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) peningkatan mutu produk dan pengolahan komoditas pertanian menjadi bahan setengah jadi, (2) peningkatkan harga komoditi hasil pertanian dan pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang

proporsional bagi petani, (3) penumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani atau asosiasi tanaman pertanian, (4) peningkatan efisiensi biaya pengolahan dan pemasaran serta memperpendek mata rantai pemasaran.

9. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global

Pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan kita. Sektor pertanian telah terbukti memiliki peranan penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada kontribusi sektor pertanian yang tidak hanya berperan dalam pembentukan PDRB, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian sudah selayaknya dijadikan sebagai suatu sektor ekonomi yang sejajar dengan sektor lainnya. Sektor ini tidak lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor unggulan lainnya

Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan suatu sektor, industri atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan didalam lingkungan global selama biaya imbangnya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan. Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing pertanian harus mengarah pada penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu merangsang investor baik domestik maupun asing. Hal ini dapat dilakukan dengan menjamin keamanan dan dukungan infrastruktur penunjang lainnya seperti infrastruktur publik (jalan, sarana dan prasarana produksi lainnya, air, listrik dan infrastruktur penelitian yang mendukung investasi. Iklim yang kondusif di bidang pertanian juga tidak terlepas dari sisi pemerintahan kebijakan-kebijakan pelayanan seperti prosedur perizininan dan prosedur investasi harus dilakukan dengan tiga prinsip dasar cepat, mudah, dan murah.

10. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah

Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam RPJMN periode 2024-2029 yang akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan on grid dan off grid untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk multi-purpose dan irigasi.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, Internet of Things (IoT) maupun artificial intelligence (AI). Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola

pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Tantangan pengembangan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya adalah aksesibilitas dan konektifitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dalam untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan dan untuk mendukung perkembangan wilayah serta pengembangan investasi di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, perlu dibangun infrastruktur strategis terutama sarana jalan. “Beberapa infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah direncanakan akan dibangun, meliputi infrastruktur strategis nasional dan regional yaitu meliputi pembangunan tol Cileunyi, Garut, Tasikmalaya (Cigatas). Pembangunan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya seperti rencana pembangunan jalan Tinewati-Cintaraja, pembangunan jalan lingkaran utara-selatan Kab. Tasikmalaya, penyelesaian gedung sarana olahraga, gedung perkantoran pemerintah, rencana pembangunan pasar dan terminal Singaparna, pembangunan Rumah Sakit serta pembangunan TPA Kabupaten Tasikmalaya.

11. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya

Pengertian Tata Ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan pengertian kota, ditinjau dari segi geografis menurut Bintarto (1989), kota dapat diartikan suatu sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan

corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di bawahnya.

Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mencanangkan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kota Singaparna yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.

Selain akan terjadi kepadatan dan ketidak teraturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain, (1) kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, (2) tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, (3) akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk, (4) kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena

banyak dijadikan pemukiman, (5) akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, (6) tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan, (7) kepadatan penduduk membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk, (8) banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih, (9) buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut, (10) banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena hubungan arus pendek listrik, (11) banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya. Meskipun pada umumnya kota telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan *Zoning Regulation*.

12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Isu lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim sendiri merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN yang perlu didukung pelaksanaannya oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat

buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.

Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia.

Kabupaten Tasikmalaya menempati posisi kedua kerawanan bencana secara nasional, sebanyak 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kerawanan menengah hingga tinggi bencana alam, terutama pergerakan tanah dan longsor dari 10 potensi bencana alam 1. Banjir, 2. Banjir Bandang, 3. Cuaca Ekstrem, 4. Gelombang Ekstrem dan Abrasi, 5. Gempa bumi, 6. Kebakaran Hutan dan Lahan, 7. Kekeringan, 8. Letusan Gunung api, 9. Tanah Longsor dan 10. Tsunami.

13. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi

Kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi biroksi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun misi Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional.

1.2.3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran, selanjutnya Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi. Berdasarkan 13 (tiga belas) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera.					
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.					
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar	1	Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan profesional termasuk yang berstatus non-PNS serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
				2	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
				3	Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
				4	Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
				5	Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif
				6	Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Layanan Kesehatan	1	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan profesional serta kualitas sarana prasarana kesehatan
				2	Peningkatan kualitas manajemen RSUD SMC dan Rintisan Pembangunan RSUD Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya
				3	Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
				4	Percepatan vaksinasi COVID-19 sesuai target nasional (100%)
				5	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat	6	Optimalisasi SIGESIT 119, Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan
				1	Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat
				2	Peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam setiap kegiatan
				3	Penguatan peran serta institusi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif
			Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	4	Peningkatan budaya olahraga rekreasi dan olahraga prestasi
				1	Peningkatan cakupan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur
				2	Peningkatan promosi dan edukasi tentang Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana)
	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga	1	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan serta rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				2	Pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
				3	Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
				4	Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) di seluruh kecamatan (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Masalah Sosial)
				5	Bea siswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal	1	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam kegiatan produktif bagi pembangunan daerah
	S.5 Meningkatnya pemberdayaan		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1	Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak		
		I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak		1	Perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak
				2	Pengembangan dan pelebagaan Desa Layak Anak
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.					
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	1	Akselerasi persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan
				2	Peningkatan fasilitasi pembinaan Mental Spiritual kepada masyarakat termasuk : - Peningkatan dukungan kesejahteraan santri, ajengan/guru ngaji, dan marbot mesjid - Penguatan kegiatan keagamaan, mesjid, majelis taklim, madrasah, dan pondok pesantren - Penyediaan Kartu Sakti Santri - Penguatan peran DKM sebagai pusat pemberdayaan umat - Fasilitasi sertifikasi gratis tanah wakaf - Penyelenggaraan festival keislaman
				3	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian dan pengelolaan BUMD seperti : - Pembentukan dan pengembangan induk perusahaan daerah (<i>Holding Company</i>) - Pembentukan dan Pengembangan Bank/BPR Syariah - Optimalisasi manajemen BUMD - Pembentukan dewan ekonomi syariah Kabupaten Tasikmalaya
				4	Penguatan partisipasi publik melalui pengembangan komunikasi kepala daerah dengan masyarakat dalam forum rembug warga dan halaqah pembangunan daerah bersama para ulama dan tokoh masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				5	Meningkatkan fasilitasi dan harmonisasi kemitraan eksekutif-legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
				6	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				7	Penguatan peran kelembagaan masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum
				8	Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, toleransi, keharmonisan, dan kerukunan umat beragama
		I.8 Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Penataan dan penguatan organisasi, dan tata laksana perangkat daerah
				2	Peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja
				3	Peningkatan kualitas perencanaan yang sinergis, akuntabel, dan partisipatif
				4	Percepatan pembangunan daerah melalui sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
		I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik	1	Peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah dan murah berbasis teknologi informasi
		I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah	1	Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan pelayanan dasar
				2	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
				3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas manajemen ASN	1	Implementasi Sistem Merit
				2	Peningkatan kapasitas, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan aparatur
		I.12 Indeks Inovasi Daerah	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya inovasi daerah	1	Apresiasi inovasi daerah melalui lomba penyelenggaraan inovasi daerah
				2	Adopsi dan promosi inovasi daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				3	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.					
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis perdesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM pertanian
				2	Pembangunan dan pengembangan prasarana sarana pertanian
				3	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
				4	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan peternakan
				5	Pengembangan komoditas unggulan pertanian
				6	Pengembangan potensi, diversifikasi, modernisasi dan industrialisasi produk pertanian terstandar dalam upaya menembus pasar nasional dan internasional
				7	Asuransi petani
			Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	1	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan
				2	Peningkatan keamanan pangan
				3	Penganekaragaman konsumsi pangan
			Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM perikanan
				2	Pengembangan prasarana dan sarana perikanan
				3	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan
				4	Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
				5	Asuransi nelayan
			Pengembangan usaha mikro dan koperasi	1	Fasilitasi Wirausaha di perdesaan
				2	Penguatan kapasitas dan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pertanian, koperasi, usaha mikro serta ekonomi kreatif
				3	Fasilitasi sertifikasi produk usaha mikro (PIRT, HAKI, dan Label Halal)
				4	Penguatan SDM dan kelembagaan koperasi
					Peningkatan kewirausahaan pemuda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	1	Peningkatan volume perdagangan melalui pembangunan pasar, pasar digital, dan peningkatan kualitas pasar rakyat yang sehat dan bersih
				2	Peningkatan promosi perdagangan dan kemudahan prosedur ekspor
				3	Penyediaan data barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar
				4	Perlindungan Konsumen melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal
			Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	1	Penguatan IKM melalui fasilitasi kemitraan, legalitas usaha dan peningkatan sarana produksi
				2	Pembangunan kawasan industri terpadu dalam memanfaatkan momentum pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap
				3	Pembangunan Tasik Industrial Park di Tasikmalaya Selatan
			Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	1	Pengembangan dan peningkatan daya saing destinasi wisata desa berbasis komunitas dengan memperhatikan pemuliaan lingkungan
				2	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata
				3	Peningkatan SDM kepariwisataan
				4	Pengembangan pemasaran pariwisata melalui sistem digital
				5	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
			Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	1	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
				2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
				3	Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
				4	Peningkatan kapasitas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan RT/RW

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.					
T.4 Meningkatkan investasi daerah	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
				2	Pemberian insentif penanaman modal
				3	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal melalui Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
				4	Peningkatan promosi dan pengendalian penanaman modal
			Mencetak tenaga kerja unggul berdaya saing	1	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul dan Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah melalui Sistem Pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH)
				2	Peningkatan prasarana dan sarana balai latihan kerja
				3	Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitasi bursa kerja dan padat karya
				4	Perlindungan dan pendampingan ketenagakerjaan
			Memantapkan penyediaan infrastuktur konektivitas antar wilayah	1	Penataan infrastruktur kawasan ibu kota pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
				2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, pusat perdagangan, dan destinasi pariwisata
				3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	1	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
				2	Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten
				3	Peningkatan Drainase Perkotaan dan Lingkungan
				4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
				5	Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air minum untuk mendukung kebutuhan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	1	Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan di bidang perhubungan
				2	Meningkatkan cakupan penerangan jalan umum (Tasik Caang)
			Peningkatan tatakelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS3R)
				2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian kualitas air, udara, dan tutupan lahan

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dan berdasarkan Arah Kebijakan yang diuraikan sebelumnya, maka tema atau fokus pembangunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2025 adalah:

“Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Visi dan Misi Bupati terpilih Periode 2025-2030, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025 sangat erat. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. **Prioritas 2**, yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting
3. **Prioritas 3**, yaitu Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. **Prioritas 4**, yaitu Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. **Prioritas 5**, yaitu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
6. **Prioritas 6**, yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan

- 7. **Prioritas 7**, yaitu Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
 - 8. **Prioritas 8**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik
 - 9. **Prioritas 9**, yaitu Peningkatan Kemandirian Desa
- Adapun 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 beserta fokusnya yaitu:
- 1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan



Gambar 4.5
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Pendidikan”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting



Gambar 4.6
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 4.7
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

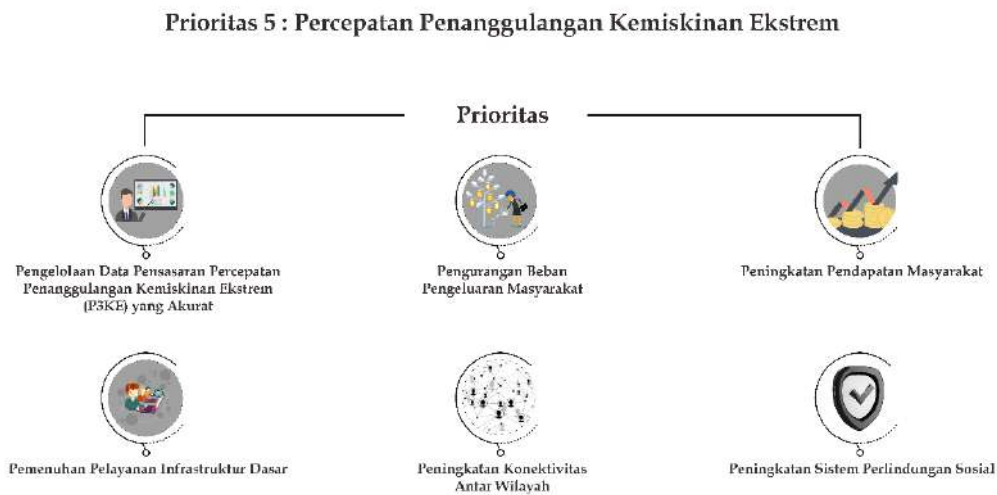
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana



Gambar 4.8
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Mitigasi dan Penanggulangan Bencana”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



Gambar 4.9
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem”

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan



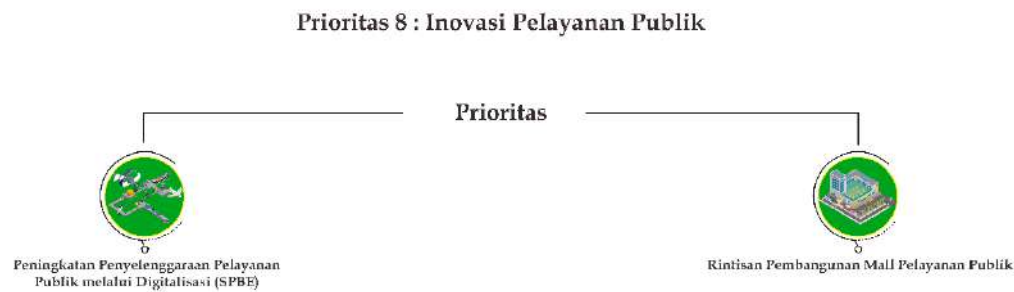
Gambar 4.10
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan”
Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro



Gambar 4.11
Fokus Dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro”
Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

8. Inovasi Pelayanan Publik



Gambar 4.12
Fokus dalam Prioritas Daerah “Inovasi Pelayanan Publik”
Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

9. Peningkatan Kemandirian Desa



Gambar 4.13
Fokus dalam Prioritas Daerah “Peningkatan Kemandirian Desa”
Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Selanjutnya adalah perumusan program prioritas pembangunan daerah beserta penganggarnya. Tahap ini sangat penting karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas. Penganggaran juga sangat penting dalam mendukung ketercapaian program prioritas, maka pada perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dirumuskan perubahan anggaran prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka percepatan pencapaian target program prioritas yang telah ditetapkan. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan visi

dan misi Kepala daerah terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari visi dan misi Kepala daerah terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.4
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
1	P.1 Peningkatan pelayanan pendidikan.	S.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	61,88 poin	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	336.992.752.040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	41,45%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	32%	1.376.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni yang dibina	50%	1.537.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pelestarian Dan	Persentase cagar budaya yang dikelola	46,5%	144.040.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Cagar Budaya				
TOTAL ANGGARAN								340.050.442.040	
2	P.2 Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka prevalensi stunting.	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	83,38 poin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	83,30%	173.686.782.145	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,14 skor	6.823.664.810	Dinas Kesehatan
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	100%	790.993.360	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	65%	1.650.304.383	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	69,50%	205.736.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	72 dokumen	10.098.584.900	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21 tahun	10.088.131.062	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengembangan Kapasitas Daya	Persentase wirausaha muda	21,09%	2.470.975.900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Saing Kepemudaan				
						Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	25%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	21,25%	440.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	40%	4.201.608.900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Cakupan Pembinaan Atlet Muda	47,36%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	33,33%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TOTAL ANGGARAN								210.456.781.460	
3	P.3 Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	6 pameran	100.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
	konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Kabupaten Tasikmalaya							
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55 jenis izin	17.400.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	1.200 orang	1.455.774.633	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3.409 orang	233.599.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100%	175.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pengembangan	Penyediaan Sarana	2 paket	20.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Kawasan Transmigrasi	dan Prasarana Translok			Pintu dan Tenaga Kerja
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	41141,24 Ha	22.053.230.300	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	20,96%	17.763.669.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	46,46%		
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	45,97%	7.249.850.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
									Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Terpusat	4,76%		
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	65,12%	7.502.846.100	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	73,19%	1.342.630.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Jalan	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	55,47%	45.298.550.140	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
									Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	46,15%	876.779.350	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	233.550.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	9,88%	1.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyelarasan dokumen perencanaan	100%	122.746.900	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						pembangunan dengan pengelolaan LH			Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	75%	576.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	172030 Kubik	2.348.509.600	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai	41,11%	1.814.833.200	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
TOTAL ANGGARAN								109.591.818.223	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
4	P.4 Mitigasi dan penanggulangan bencana.	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	2.964.910.300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	75.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Penanganan Bencana	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100%	2.485.858.600	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL ANGGARAN								5.526.368.900	
5	P.5 Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial,	I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	71,11%	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial	1.121 Orang	394.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
		Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial				yang mengikuti peningkatan kapasitas			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	3.264.687.990	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	67,40%	6.195.777.530	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,82 poin	Program Pengarusutamaan Gender Dan	Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat	2 dokumen	486.266.700	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
		dan perlindungan anak.			Pemberdayaan Perempuan	daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota			Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Cakupan perangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
					Program Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan bagi korban kekerasan perempuan	102 Orang	531.637.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	659.869.500	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
									Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor 615 (Menuju Madya)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	111 Dokumen	649.395.900	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL ANGGARAN								12.181.635.410	
6	P.6 Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan.	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata	I.13 PDRB Per Kapita	Rp 26,10 juta/orang	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	39 kecamatan	5.351.172.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
		berbasis pedesaan							
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	215 Ha	25.189.761.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	9 paket	522.148.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani dan terlaksananya penyuluhan pertanian	250 kelompok	3.316.391.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase ketahanan pangan masyarakat	80 ton	491.673.200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengelolaan	Produksi perikanan tangkap	1.870,88 tom	470.161.600	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Perikanan Tangkap				
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya	12 bulan	243.451.500	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan	10 Kelompok	187.643.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
TOTAL ANGGARAN								35.772.401.300	
7	P.7 Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta/Orang	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	persentase koperasi yang dibina	100%	297.017.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro Formal	37,7%	372.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana perdagangan yang mendukung aktifitas perdagangan	100%	375.354.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	1%	328.017.398	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase Kenaikan Ekspor Bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	2%	270.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	5%	37.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						(UTTP) yang di tera dan tera ulang			
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Formal	1613 unit usaha	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	1,20%	818.255.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	2.488.141.294	245.117.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Tingkat hunian akomodasi	11%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	20%	514.218.100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	3%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						nusantara yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya			
TOTAL ANGGARAN								3.957.478.998	
8	P.8 Inovasi pelayanan publik.	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Skor 3.42 (Tinggi)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	2.163.898.100	Sekretariat Daerah
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	100%	230.589.500	Sekretariat Daerah
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip	100%	59.802.700	Sekretariat Daerah
					Program Pemerintahan Dan	Persentase Pemenuhan Kebijakan	100%	29.073.678.361	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat			
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	2.105.667.850	Sekretariat Daerah
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	7.187.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	3.180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pengelolaan	Persentase masyarakat yang	100%	1.084.105.220	Dinas Perhubungan,

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Informasi Dan Komunikasi Publik	menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,7 poin	323.625.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	90%	83.549.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1.8 Nilai SAKIP	Skor 64,85 (B)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	916.395.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Koordinasi dan	Persentase kesesuaian	100%	1.043.852.820	Badan Perencanaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTR A) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/R PJPd) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTR A) terhadap	100%		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)			
						Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang	100%		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						Infrastruktur dan Kewilayahan			
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100%	1.140.093.000	Inspektorat Daerah
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	100%	582.270.000	Inspektorat Daerah
			I. 9 Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50 poin	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	100%	131.573.600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	98,30%	3.035.734.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	85%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	98,50%	324.982.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						Penerbitan Akta Kematian	92%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	85%	17.999.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	96%	11.629.988.649	Sekretariat DPRD
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	84,117 poin	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	702.583.313.003	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen	83,49%	1.616.293.500	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
						Bukti Kepemilikan			
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	5.622.493.770	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	80,07 poin	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian)	124 poin	2.135.448.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian)	94 poin		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian)	95 poin		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JP/Orang/Tahun	1.807.309.300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor 49 (inovatif)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	398.225.600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
									Pengembangan Daerah
TOTAL ANGGARAN								778.478.638.473	
9	P.9 Peningkatan kemandirian desa.	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	26,10 juta	Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	100%	46.000.000	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	351 desa	9.272.889.000	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan,	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	467 lembaga	460.000.000	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran (RPJMD)	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Pagu	Perangkat Daerah
					Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
TOTAL ANGGARAN								9.778.889.000	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, data diolah (2025)

4.2.4.1. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sementara itu, dari perspektif perencanaan politis, penentuan prioritas pembangunan Tahun 2025 juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terekam dari hasil reses anggota DPRD yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Rumusan keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan sasaran dan program prioritas pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Sasaran dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,38 Poin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
					Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
					Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
					Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK
					Pembinaan Desa Stop Buang Air Sembarangan (ODF)
					Sosialisasi Kesehatan serta Kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Polindes, Pos UKK, Poskestren)
					Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	61,88 Poin	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD, SKB/PKBM, SD dan SMP
			Program Pengelolaan Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD,SKB/PKBM, SD dan SMP kurang mampu
			Program Pengelolaan Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, SD, dan SMP yang kurang mampu
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
			Program Pengelolaan Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Program Pengelolaan Pendidikan		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD, SMP, PAUD dan SKB/PKBM
			Program Pengelolaan Pendidikan		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
			Program Pengelolaan Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD, SMP, PAUD dan SKB/PKBM

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	42,45%	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
			Program Pengembangan Kebudayaan		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	71,11%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Pemberian Edukasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
dan Pemberdayaan sosial				Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif KPM PKH
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,82 Poin	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Pembinaan Pembangunan Berbasis Gender
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	* Peningkatan Kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	* Pembentukan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	* Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATPBM) di Tingkat Desa

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
	Indikator Kabupaten Layak Anak	615 (Menuju Madya)	Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Profil Anak Tingkat Desa
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Indeks Kesehatan	83,38 Poin	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Pemberdayaan wirausaha pemuda
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Pembangunan/Rehabilitasi serta pengadaaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi dan olahraga prestasi
					Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan olahraga
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta / Orang	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pangan	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian (Penyuluh dan Petani Milenial)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Pembangunan/Rehabilitasi Embung
					Pengembangan/Rehabilitasi Dam Parit
					Pengembangan/Rehabilitasi Irigasi Air Tanah (Irigasi Tersier)
					Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Penyediaan Alat Mesin Pra Panen (traktor, handsprayer dll)
					Pengembangan Ayam Ras Petelur
					Pengembangan Ayam Buras
					Pengenbangan Perbibitan Ternak Itik

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
					Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)
					Pengadaan sarana produksi perikanan budidaya
					Peningkatan SDM Pembudidaya Ikan
					Peningkatan SDM Nelayan Kecil
					Bantuan Sarana Usaha Pengolahan Ikan
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
					Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat/Lumbung Pangan Masyarakat
					Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Berkala Jalan
					Rekonstruksi Jalan
					Pembangunan/Pemeliharaan Berkala Jembatan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Pembangunan/Perluasan/ Peningkatan SPAM
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		MCK Komunal
					Septictank Individu

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target 2025	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Menu Usulan
			Program Pengembangan Perumahan		Rumah Korban Bencana
			Program Kawasan Permukiman		
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Rumah Tidak Layak Huni
			Program Pengelolaan Persampahan		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pengelolaan Persampahan
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		Pembangunan TPA/TPST/TPS3R
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Rehabilitasi Jaringan Irigasi
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)		Fasilitas Perhubungan

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

4.2.4.2. *Sustainable Development Goals (SGDs)*

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan program Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terhadap pencapaian SDG's tersaji dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Program Dukungan terhadap Pencapaian SDG's Tahun 2025

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
1	TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)	Program Pemberdayaan Sosial
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	Program Rehabilitasi Sosial
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Program Perlindungan Perempuan
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	
2	TANPA KELAPARAN (MENGHILANGKAN KEPALARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang	
2.c	Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat,	

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
	dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim	
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	
3.6	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan	

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
	dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	Program Pengelolaan Pendidikan
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	
5	KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk	

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
	perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	
6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETEREDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	
7	ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	
8	PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	Program Penempatan Tenaga Kerja
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Program Pengembangan UMKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9	INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Hubungan Industrial Program Penataan Bangunan Gedung

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan
10	BERKURANGNYA KESENJANGAN (MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTAR NEGARA)	Program Penataan Desa
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Program Peningkatan Kerjasama Desa
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	
11	KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)	Program Pengembangan Perumahan
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Program Kawasan Permukiman
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	
12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	
13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA)	Program Penanggulangan Bencana
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
		Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Penanganan Bencana
16	PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Program Pencatatan Sipil
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis,	

No.	Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program
	status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

4.2.4.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan, kita berharap dengan dilaksanakannya peraturan ini maka akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai

dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial dengan berbagai indikatornya.

Tabel 4.7
Program Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Program
1.	SPM Pendidikan	1 Pendidikan Anak Usia Dini 2 Pendidikan Dasar 3 Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2.	SPM Kesehatan	1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4 Pelayanan kesehatan balita 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar		Program
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	
3.	SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	
4.	SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	
5.	SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanganan Bencana
		3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
		4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
6	SPM Sosial	1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Sosial
		2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
		3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
		5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

1.2.5. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional/Misi atau Asta Cita yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun RKPD Tahun 2025, sinkronisasi dan keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8

Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	PD 8 : Inovasi pelayanan publik.	Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	Bakesbangpol
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negaradan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Asia Power Index (Military Capability)	PD 8 : Inovasi pelayanan publik.	Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	Satpol PP Bakesbangpol
	Asia Power Index (Diplomatic Influence)				
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempatnya				
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	PD 6 : Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan.	PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta/Orang	DPKPP
	Indeks Ketahanan Energi				-
	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas	Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	DPUTRLH

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.			
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)				
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global				DPMPTSPTK
	Indeks Ekonomi Hijau				DPUTRLH
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer				
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)				
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
	Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)				
PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor	PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta/Orang	Diskopukmindag

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
yang Berkualitas,Mendorong Kewirausahaan,Mengembangkan Industri Kreatifserta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.			
	Rasio Kewirausahaan (%)				
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)				
	Rasio PDB Pariwisata (%)				Disparpora
	Devisa Pariwisata (miliar USD)				
	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)				
	Aset Perbankan/PDB (%)				Diskopukmindag
	Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	Aset Asuransi/PDB (%)				
	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)				
	Total Kredit/PDB (%)				
	Inklusi Keuangan (%)				
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains,Teknologi, Pendidikan,Kesehatan, Prestasi Olahraga,Kesetaraan Gender,	Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	PD 1 : Peningkatan pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	61,88 poin	Disdikbud

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)				
	Harapan lama sekolah (tahun)				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)				
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)				
	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB	PD 8: Inovasi pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah	Skor 49 (inovatif)	Bappelitbangda
	Peringkat Indeks Inovasi Global				
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	DPMPTSPK
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)				

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Usia Harapan Hidup (tahun)	PD 2 : Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka prevelansi stunting	Indeks Kesehatan	83,38	Dinkes
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)				
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)				
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)				Dinsos PPKB P3A
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	PD 5 : Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,82 poin	Dinsos PPKB P3A
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif,	PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta/Orang	Diskopukmindag
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)				

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
		perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.			
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)				
	Biaya Logistik (% PDB)				
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	PD 5 : Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.'	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	71,11%	Dinsos PPKB P3A
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	DPMPTSPTK
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)				
	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta/Orang	Diskopukmindag Disparpora
	Persentase desa mandiri (%)	PD 9 : Peningkatan kemandirian desa.	PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta/Orang	DPMD

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	PD 3 : Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	DPUTRLH
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi,serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	PD 8: Inovasi pelayanan publik.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	84,117 poin	BPKPD
	Indeks Integritas Nasional		Indeks Profesionalitas ASN	80,07 poin	BKPSDM
	Indeks Materi Hukum		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50 poin (baik)	SEMUA PD
	Indeks Pelayanan Publik		Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	Dishubkominfo
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nilai SAKIP	Skor 64,85 (BB)	Inspektorat Daerah
	Indeks Persepsi Korupsi		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	84,117 poin	BPKPD
	Indeks Pembangunan Hukum				
	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)				

Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Tasikmalaya	Indikator Sasaran Prioritas Kab. Tasikmalaya	Target 2025	PD Penanggungjawab
	Tingkat Inflasi (%)	PD 7 : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.	PDRB Per Kapita	Rp 26,10 Juta/Orang	Diskopukmindag
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	PD 1 : Peningkatan pelayanan pendidikan	Persentase Pemajuan Kebudayaan	41,45%	Disdikbud
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	PD 8 : Inovasi pelayanan publik.	Nilai LPPD	Skor 3,42 (Sedang)	Satpol PP
	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 4 : Mitigasi dan penanggulangan bencana.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,50%	BPBD

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Tabel 4.9

Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap Prioritas Nasional/Asta Cita Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	385.021.220
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	385.021.220
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	43.000.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	342.021.220
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,7 point	192.800.000
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	90 %	192.800.000
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	176.200.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 Unit	16.600.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum serta Pelanggaran Perda dan Perkada	89 %	3.017.794.220
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	17 % 93 %	2.384.108.020
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	2.384.108.020
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	85%	633.686.200
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	13 Laporan	633.686.200
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	5.675.120.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	-	-	5.675.120.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2900 Orang	5.675.120.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	7.124.000.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	7.124.000.000
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3000 Orang	7.124.000.000
2	Memantapkan sistem pertahanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	41141,24 Ha	21.691.826.700

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	40941,24 Hektar	21.691.826.700
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	155,80 KM	21.691.826.700
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	20,96 % 46,46 %	17.086.069.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	1216158 Jiwa	17.086.069.000
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7 Liter/Detik	13.422.669.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	332 SR	3.663.400.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	90 %	83.549.000
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah SKPD terlayani penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1 Orang	83.549.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Aplikasi Perangkat Daerah	83.549.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	685.055.000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	685.055.000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	685.055.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	470.161.600
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	470.161.600
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1 Kelompok	470.161.600
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	172030 kubik	2.006.104.600
		Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	66,66%	2.006.104.600
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai Rasio Konektivitas Kabupaten/kota Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam	0,65 %	393.055.100
				41,11 % 67,04 %	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		keadaan layak jalan Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	79 % 82,70 %	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan / pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%	393.055.100
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit	393.055.100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	32 %	221.250.000
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ritual adat istiadat yang difasilitasi	4 Event	221.250.000
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	35 Objek	221.250.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	46,5 %	144.040.000
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya	0 Cagar	144.040.000
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	144.040.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro Formal	37.7 %	252.000.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Formal	47102 Usaha Mikro	252.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1500 Unit Usaha	252.000.000
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	31.930.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	31.930.000
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40 Laporan	31.930.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga	33.33 % 40.00 % 47.36 %	95.972.100
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai dengan kebutuhan	100 %	95.972.100
		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	95.972.100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	40.000.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	40.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	5.195.192.600
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.195.192.600
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1600 Keluarga	5.195.192.600
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	116.758.551.706
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	17.467.642.684
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	17.467.642.684
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	99.290.909.022
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	4.979.669.000
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	93.916.049.022

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	395.191.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	200.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Partisipasi Murni (APM) SD	100 % 100,04 %	100.000.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	100,04 % 94,05 %	100.000.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	1.305.774.633
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	1200 orang	1.305.774.633
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	177 Orang	1.305.774.633
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	41141,24 Ha	21.691.826.700
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	40941,24 Hektar	21.691.826.700
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	155,80 KM	21.691.826.700

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	20,96 % 46,46 %	17.086.069.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	1216158 Jiwa	17.086.069.000
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7 Liter/Detik	13.422.669.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	332 SR	3.663.400.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	2 %	270.000.000
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event Promosi dagang produk ekspor yang diikuti	5 Event	270.000.000
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	16 Pelaku Usaha	270.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Kecil dan Menengah	1.2 %	818.255.000
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Kecil dan menengah	17287 Unit Usaha	818.255.000
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	818.255.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Industri dan Peran Serta Masyarakat			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai Rasio Konektivitas Kabupaten/kota Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan layak jalan Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	0,65 % 41,11 % 67,04 % 79 % 82,70 %	393.055.100
		Prosentase penyediaan /pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Prosentase penyediaan /pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 %	393.055.100
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit	393.055.100
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	40.000.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	40.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	5.195.192.600
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.195.192.600
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1600 Keluarga	5.195.192.600

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	1.305.774.633
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	1200 Orang	1.305.774.633
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	177 Orang	1.305.774.633
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	81,05 %	406.850.000
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	409503 Unit	406.850.000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	406.850.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	1,30 %	1.046.148.400
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	245415 Unit	1.046.148.400
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	1.046.148.400

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	385.021.220
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	385.021.220
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	43.000.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	342.021.220
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,7 point	192.800.000
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	90 %	192.800.000
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	176.200.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 Unit	16.600.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	90 %	83.549.000
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Jumlah SKPD terlayani penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1 Orang	83.549.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Aplikasi Perangkat Daerah	83.549.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	100 %	131.573.600
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	131.573.600
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	131.573.600
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	5.675.120.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	5.675.120.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2900 Orang	5.675.120.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	7.124.000.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	7.124.000.000
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3000 Orang	7.124.000.000
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	32 %	221.250.000
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ritual adat istiadat yang difasilitasi	4 Event	221.250.000
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	35 Objek	221.250.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	18.474.500
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	18.474.500
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	18.474.500
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum serta Pelanggaran Perda dan Perkada	89 %	3.017.794.220
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan"	17 % 93 %	2.384.108.020
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	2.384.108.020
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	85 %	633.686.200
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	13 Laporan	633.686.200
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	172030 kubik	2.006.104.600
		Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	66.66 Persen	2.006.104.600

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	21940,15 Ton	2.006.104.600
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	5.675.120.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	5.675.120.000
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2900 Orang	5.675.120.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	7.124.000.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	7.124.000.000
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3000 Orang	7.124.000.000

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Tabel 4.10
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	336.992.752.040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.823.664.813	Dinas Kesehatan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.650.304.383	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	10.088.131.062	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.098.584.900	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.470.975.900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	440.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.201.608.900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Program Pengelolaan Pendidikan	336.992.752.040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	187.643.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	491.673.200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.351.172.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	3.316.391.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	173.686.782.145	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan MakananMinuman	790.993.360	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.098.584.900	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	10.088.131.062	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.763.669.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	7.249.850.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	406.850.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Pendidikan	336.992.752.040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	460.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.195.777.530	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pendaftaran Penduduk	3.035.734.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	324.982.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	470.161.600	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	328.017.398	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	818.255.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Pengendalian Inflasi di Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	491.673.200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.351.172.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	25.189.761.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	522.148.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	3.316.391.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar	328.017.398	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2.105.667.850	Sekretariat Daerah
5	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.351.172.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	3.316.391.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	470.161.600	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	243.451.500	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	187.643.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	297.017.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	372.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	375.354.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	818.255.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	245.117.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pemasaran Pariwisata	514.218.100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
6	Dukungan Swasembada Pangan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.043.852.820	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.351.172.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	25.189.761.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengendalian Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	522.148.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	3.316.391.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	297.017.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	372.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Arah Kebijakan Nasional	Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	375.354.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	818.255.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Hasil analisis Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

BAB



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dalam dokumen RKPD, serta capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan dilakukan secara terpadu berdasarkan urusan dan kewenangan, baik urusan wajib maupun pilihan, termasuk fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Seluruh program dan kegiatan tersebut didukung oleh pendanaan bersifat indikatif, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Rekapitulasi program prioritas pembangunan daerah, beserta sasaran pembangunan dan pagu indikatifnya, disajikan dengan membandingkannya terhadap pagu yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta Sasaran Pembangunan dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
PP.1 Peningkatan pelayanan pendidikan				604.266.051.836	340.050.442.040
	S.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Program Pengelolaan Pendidikan	478.081.776.6 15	601.366.051.836	336.992.752.040
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	1.930.392.783	700.000.000	1.376.250.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	418.362.400	1.900.000.000	1.537.400.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	630.000.000	300.000.000	144.040.000
PP.2 Peningkatan pelayanan kesehatan daerah serta penurunan angka prevalensi stunting				334.956.102.099	210.456.781.463
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41.199.410. 000	285.098.723.517	173.686.782.145
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.444.132.664	3.864.168.585	6.823.664.813
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.678.205.037	1.200.703.297	790.993.360
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.688.375.000	4.254.166.000	1.650.304.383
		Program Pengendalian Penduduk	694.575.000	1.352.500.000	205.736.000
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	15.819.036.15 0	15.752.975.000	10.098.584.900
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.034.483.985	2.692.365.700	10.088.131.062
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	500.000.000	6.770.000.000	2.470.975.900
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	516.500.000	516.500.000	440.000.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.900.000.000	13.454.000.000	4.201.608.900
PP.3 Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi				247.751.897.436	109.591.818.223
	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Program Promosi Penanaman Modal	860.000.000	750.000.000	100.000.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	2.980.000.000	420.000.000	17.400.000
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.450.000.000	8.700.000.000	1.455.774.633
		Program Penempatan Tenaga Kerja	12.017.636.63 6	12.117.836.636	233.599.000
		Program Hubungan Industrial	650.000.000	650.000.000	175.000.000
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	200.000.000	100.000.000	20.000.000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	46.150.000. 000	23.700.000.000	22.053.230.300
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.085.000. 000	17.020.000.000	17.763.669.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.935.000. 000	21.955.000.000	7.249.850.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	15.308.191. 760	9.805.000.000	7.502.846.100
		Program Penataan Bangunan Dan	5.720.000.0 00	11.470.063.000	1.342.630.000

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					
Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Lingkungannya			
		Program Penyelenggaraan Jalan	225.823.140 .267	125.041.083.000	45.298.550.140
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.100.000.0 00	1.000.000.000	876.779.350
		Program Pengembangan Perumahan	34.632.250. 000	300.000.000	233.550.000
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	13.868.000. 000	1.870.000.000	406.850.000
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	850.000.000	150.000.000	122.746.900
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.004.672.7 50	1.497.903.000	576.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	6.278.475.000	2.968.000.000	2.348.509.600
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.000.000.00 0	3.752.011.800	1.814.833.200
PP.4 Mitigasi dan penanggulangan bencana				8.224.380.000	5.526.368.900
	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Program Penanggulangan Bencana	2.160.000.000	3.554.000.000	2.964.910.300
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.710.000.000	2.430.380.000	75.600.000
		Program Penanganan Bencana	2.160.000.000	2.240.000.000	2.485.858.600
PP.5 Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem				17.377.000.000	12.181.635.410

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.440.000.0 00	1.690.000.000	394.000.000
		Program Rehabilitasi Sosial	5.157.511.2 50	4.460.000.000	3.264.687.980
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.500.000.0 00	5.412.000.000	6.195.777.530
	S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	325.000.000	1.370.000.000	486.266.700
		Program Perlindungan Perempuan	150.000.000	370.000.000	531.637.800
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.550.000.000	1.625.000.000	659.869.500
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	1.620.000.000	2.450.000.000	649.395.900
PP.6 Peningkatan infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan				35.086.644.393	35.772.401.300
	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	49.842.140.90 1	3.934.814.628	5.351.172.000
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	104.684.487.6 69	12.400.000.000	25.189.761.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.848.341.250	225.000.000	522.148.000
		Program Penyuluhan Pertanian	10.471.872.49 3	10.496.032.777	3.316.391.000
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.187.397.2 57	1.766.350.382	491.673.200
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	122.414.410.9 34	2.650.000.000	470.161.600
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.334.855.640	2.814.446.606	243.451.500
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.257.401.627	800.000.000	187.643.000
PP.7 Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro				47.619.467.000	3.957.478.998
	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	600.000.000	800.000.000	297.017.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	1.705.000.000	4.511.945.000	372.000.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	42.369.072.886	26.950.000.000	375.354.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.600.000.000	2.600.000.000	328.017.398
		Program Pengembangan Ekspor	850.000.000	850.000.000	270.000.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	500.000.000	100.000.000	37.500.000
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	200.000.000	400.000.000	700.000.000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.350.000.000	1.475.000.000	818.255.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	32.444.984. 500	3.832.522.000	245.117.500
		Program Pemasaran Pariwisata	3.950.000.0 00	4.150.000.000	514.218.100
PP.8 Inovasi pelayanan publik				949.787.849.720	778.478.638.473
	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.000.000.000	32.000.000.000	2.163.898.100
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.035.000.000	749.321.000	230.589.500
		Program Pengelolaan Arsip	725.000.000	242.000.000	59.802.700
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	39.543.800. 000	54.918.221.126	29.073.678.361
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	9.061.274.5 49	3.581.060.750	2.105.667.850

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37.725.000. 000	18.732.000.000	7.187.750.000
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	11.625.000. 000	2.350.000.000	3.180.000.000
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.925.000.0 00	2.799.312.466	1.084.105.220
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.650.000.0 00	1.376.000.000	323.625.000
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	400.000.000	219.036.600	83.549.000
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.357.891.000	2.610.000.000	916.395.400
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.248.480.000	2.209.250.324	1.043.852.820
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.384.034.667	3.754.998.000	1.140.093.000
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.099.047.162	1.699.500.000	582.270.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	583.664.400	500.000.000	131.573.600
		Program Pendaftaran Penduduk	25.000.000	3.371.183.500	3.035.734.500
		Program Pencatatan Sipil	95.000.000	425.073.800	324.982.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	226.315.000	60.940.000	17.999.000

Prioritas Pembangunan	Sasaran (RPJMD)	Program Perangkat Daerah	Pagu		
			RPJMD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	35.518.974.14 1	20.649.458.359	11.629.988.649
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	906.908.695 .648	773.153.342.530	702.583.313.003
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.068.000.0 00	2.767.400.000	1.616.293.500
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.295.000.0 00	13.600.950.000	5.622.493.770
		Program Kepegawaian Daerah	5.541.060.0 00	3.087.999.269	2.135.448.600
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.464.273.0 00	3.552.901.996	1.807.309.300
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.139.925.932	1.377.900.000	398.225.600
PP.9 Peningkatan kemandirian desa				16.008.224.488	9.778.889.000
	S.7 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Program Penataan Desa	1.110.000.0 00	300.000.000	46.000.000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.165.850.000	10.708.224.488	9.272.889.000
		Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.300.000.000	5.000.000.000	460.000.000

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah, data diolah (2025)

Pada RKPD Tahun 2025, kebutuhan anggaran untuk mencapai target kinerja program pada masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2021–2026 belum sepenuhnya dapat terakomodir. Di sisi lain, penambahan pagu anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2025 belum sepenuhnya selaras dengan pagu indikatif yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026.

Perlu dipahami bahwa pagu indikatif dalam dokumen RPJMD bersifat proyeksi lima tahunan yang disusun berdasarkan asumsi makro ekonomi pada saat perencanaan awal. Sementara itu, penyusunan pagu program dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 didasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi riil dan perkembangan kebijakan pada tahun berjalan. Dengan demikian, perbedaan total pagu program antara dokumen RPJMD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan konsekuensi logis dari dinamika fiskal dan penyesuaian terhadap kondisi aktual, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Terdapat perubahan pagu yang sangat signifikan kenaikannya pada beberapa program, antara lain:

1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional mendukung sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, dan sejalan juga dengan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan;
2. Pada Proyeksi Perubahan RKPD 2025 untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp. 6.823.664.810, setelah dilaksanakan rasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran menjadi sebesar Rp. 6.683.480.203,- adalah terdiri dari pagu anggaran yang bersumber dari :
 - DAK Non Fisik sebesar Rp. 1.644.046.000,- dimana Anggaran DAK Non Fisik ini sudah sesuai dengan Juknis yang diberikan oleh Kemenkes RI.

- DAU sebesar Rp. 5.039.434.204,- dalam Anggaran DAU ini sebesar Rp. 3.883.979.116 digunakan untuk kegiatan Workshop Penguatan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Bagi Petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Kader. Kegiatan ini sejalan dengan diluncurkannya Program Integrasi Layanan Primer oleh Kemenkes RI. ILP Kemenkes merupakan program penting yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup dan integrasi berbagai layanan kesehatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- DAK Non Fisik sebesar Rp. 1.644.046.000,- dimana Anggaran DAK Non Fisik ini sudah sesuai dengan Juknis yang diberikan oleh Kemenkes RI;
- DAU sebesar Rp. 5.039.434.204,- dalam Anggaran DAU ini sebesar Rp. 3.883.979.116 digunakan untuk kegiatan Workshop Penguatan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Bagi Petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Kader. Kegiatan ini sejalan dengan diluncurkannya Program Integrasi Layanan Primer oleh Kemenkes RI. ILP Kemenkes merupakan program penting yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup dan integrasi berbagai layanan kesehatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- Sisanya bersumber dari DAU, juga digunakan untuk kegiatan:
 - Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam rangka pengembangan inovasi di bidang Kesehatan;
 - Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan jejaring lainnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat;
 - Penyajian data dan Informasi Tenaga Kesehatan (SISDMK dan RENBUT);
 - Pengelolaan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan;

- Sosialisasi dan Pembinaan Pengawasan Perijinan;
 - Workshop Penguatan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Bagi Petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Kader;
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari alokasi APBD murni Tahun Anggaran 2025 yang diarahkan untuk mendukung upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Tasikmalaya;
 4. Peningkatan anggaran Program Penanganan Bencana dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk mengantisipasi meningkatnya intensitas kejadian bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, perlu penambahan kebutuhan logistik, khususnya ketersediaan buppersok sandang, untuk korban bencana. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ini belum optimal, sehingga diperlukan penyesuaian anggaran pada perubahan RKPD Tahun 2025;
 5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Perubahan RKPD Tahun 2025 pagunya meningkat karena ada pengalihan anggaran hasil efisiensi diantaranya untuk pemenuhan SPM bidang sosial;
 6. Pagu Program Perlindungan Perempuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebagai bentuk respons terhadap tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus terjadi setiap tahun, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Peningkatan anggaran ini diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penanganan dan penjangkauan kasus di 39 kecamatan;
 7. Peningkatan anggaran Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri disebabkan oleh adanya penambahan kegiatan *business matching* yang bertujuan untuk menaikkan standar produk pengusaha agar diterima di *e-katalog*;
 8. Peningkatan anggaran pada Program Pendaftaran Penduduk disebabkan oleh adanya peralihan pembiayaan honorarium operator administrasi kependudukan di 39 kecamatan, yang sebelumnya dialokasikan melalui Program Penunjang dan pada Tahun 2025 dialihkan ke Program Pendaftaran Penduduk. Selain

itu, peningkatan anggaran juga dipicu oleh kebutuhan pengadaan alat perekaman data kependudukan di 22 kecamatan. Kebutuhan tambahan ini belum terakomodasi dalam dokumen RPJMD sebelumnya;

9. Peningkatan anggaran Program Pencatatan Sipil disebabkan oleh adanya peralihan honor operator pencatatan sipil yang tersebar di 39 Kecamatan yang semula di Program Penunjang dan pada Tahun 2025 beralih ke Program Pencatan Sipil. Hal tersebut belum terprediksi di dokumen RPJMD;
10. Peningkatan anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa disebabkan oleh adanya penambahan pembiayaan jaminan asuransi mengalami penambahan, yang semula hanya untuk asuransi kesehatan bagi perangkat desa menjadi bertambah dengan adanya pembiayaan untuk asuransi ketengakerjaan bagi RT dan RW;

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Mengenai penyajian matriks rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam bab V ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Matriks rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Per Perangkat Daerah (*terlampir*).

Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68	1.332.164.226.957
2	Dinas Kesehatan	65	403.048.404.980
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa	3	172.325.766.704
4	Puskesmas Cipatujah	17	6.120.934.606
5	Puskesmas Karangnunggal	18	5.751.628.028
6	Puskesmas Cikalong	17	4.946.075.555
7	Puskesmas Cikatomas	18	4.723.092.259
8	Puskesmas Pancatengah	17	3.736.319.646
9	Puskesmas Cibalong	17	2.536.637.513
10	Puskesmas Parungponteng	17	2.880.878.692
11	Puskesmas Bantarkalong	17	3.318.315.341
12	Puskesmas Bojongasih	17	1.788.651.194
13	Puskesmas Culamega	17	2.282.444.975
14	Puskesmas Bojunggambir	17	3.999.095.808
15	Puskesmas Sodonghilir	17	5.724.655.835
16	Puskesmas Taraju	17	3.957.329.754
17	Puskesmas Salawu	17	5.559.382.543
18	Puskesmas Puspahiang	17	3.564.009.774
19	Puskesmas Tanjungjaya	17	3.428.567.683
20	Puskesmas Sukaraja	17	4.658.838.900

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
21	Puskesmas Salopa	18	4.745.954.034
22	Puskesmas Jatiwaras	17	4.195.696.815
23	Puskesmas Cineam	18	3.952.190.812
24	Puskesmas Manonjaya	17	5.724.842.353
25	Puskesmas Gunungtanjung	17	2.849.817.623
26	Puskesmas Singaparna	17	2.787.570.817
27	Puskesmas Tinewati	17	3.076.382.845
28	Puskesmas Sukarame	17	3.333.696.603
29	Puskesmas Mangunreja	17	2.847.231.192
30	Puskesmas Cigalontang	17	5.921.869.906
31	Puskesmas Leuwisari	17	2.790.168.484
32	Puskesmas Karangjaya	18	1.399.900.083
33	Puskesmas Sariwangi	17	3.200.297.148
34	Puskesmas Cisaruni	17	2.770.663.039
35	Puskesmas Sukaratu	17	4.602.828.754
36	Puskesmas Cisayong	17	3.756.535.747
37	Puskesmas Sukahening	17	2.520.180.176
38	Puskesmas Rajapolah	17	5.312.858.959
39	Puskesmas Jamanis	17	3.689.305.424
40	Puskesmas Ciawi	17	6.040.627.284
41	Puskesmas Kadipaten	17	2.959.470.000
42	Puskesmas Pagerageung	17	3.616.368.704

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
43	Puskesmas Sukaresik	17	3.054.283.515
44	Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya	5	10.000.000.000
45	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	62	137.593.981.455
46	Satuan Polisi Pamong Praja	26	19.079.506.094
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20	9.743.438.866
48	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55	41.770.418.649
49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22	10.780.347.494
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	15.425.354.829
51	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43	38.258.765.981
52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	29	15.647.426.893
53	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	21	10.232.179.407
54	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	22	15.136.744.503
55	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	34	63.187.580.715
56	Sekretariat Daerah	63	83.202.018.083
57	Sekretariat DPRD	51	59.942.277.262
58	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	50	13.386.028.249
59	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	62	742.522.490.392

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27	14.149.826.041
61	Inspektorat Daerah	32	16.570.878.953
62	Kecamatan Cibalong	17	2.218.868.236
63	Kecamatan Parungponteng	17	2.036.871.707
64	Kecamatan Jatiwaras	16	2.154.725.889
65	Kecamatan Salopa	17	1.881.256.254
66	Kecamatan Tanjungjaya	15	1.844.394.695
67	Kecamatan Puspahiang	16	2.026.468.488
68	Kecamatan Sukaraja	17	1.878.681.644
69	Kecamatan Salawu	16	2.109.857.989
70	Kecamatan Karangnunggal	18	2.320.868.847
71	Kecamatan Bantarkalong	16	2.203.781.326
72	Kecamatan Cipatujah	17	2.067.409.831
73	Kecamatan Cikatomas	17	2.130.190.999
74	Kecamatan Taraju	16	2.160.037.760
75	Kecamatan Pancatengah	17	1.883.515.694
76	Kecamatan Cikalong	18	1.972.353.984
77	Kecamatan Sodonghilir	17	2.124.029.097
78	Kecamatan Kadipaten	18	2.089.623.896
79	Kecamatan Pagerageung	18	2.053.181.017
80	Kecamatan Jamanis	17	1.959.729.601
81	Kecamatan Rajapolah	15	1.938.051.164

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
82	Kecamatan Ciawi	17	2.153.633.966
83	Kecamatan Cineam	17	2.183.324.068
84	Kecamatan Manonjaya	16	2.408.237.972
85	Kecamatan Bojonggambir	17	1.896.398.939
86	Kecamatan Cisayong	16	2.063.692.301
87	Kecamatan Sariwangi	17	1.906.201.883
88	Kecamatan Singaparna	16	2.312.318.228
89	Kecamatan Sukarame	17	2.078.751.861
90	Kecamatan Sukahening	16	2.113.923.971
91	Kecamatan Sukaratu	17	2.061.237.198
92	Kecamatan Cigalontang	16	2.176.778.857
93	Kecamatan Leuwisari	14	1.997.930.592
94	Kecamatan Padakembang	16	2.166.783.165
95	Kecamatan Gunungtanjung	17	2.019.345.857
96	Kecamatan Karangjaya	18	1.886.583.135
97	Kecamatan Culamega	18	1.972.682.797
98	Kecamatan Sukaresik	17	1.986.825.943
99	Kecamatan Mangunreja	18	2.186.262.235
100	Kecamatan Bojongasih	29	2.198.312.826
101	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43	72.846.573.042
TOTAL		2.177	3.531.962.957.884

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, data diolah (2025)

BAB

VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB VI

**KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Guna mengukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan sebanyak 6 Indikator Makro, 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) pada setiap urusan sesuai RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Keberhasilan program pembangunan diukur melalui Indikator Makro dan target capaian selama lima tahun. Beberapa target pada RKPD tahun 2024 berbeda dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Perubahan target Indikator Makro didasarkan pada pengaruh pada tatanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Pada tahun 2025 tatanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kembali pulih dan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Atas dasar tersebut, maka tahun 2025 ini beberapa target Indikator Makro mengalami perubahan.

Adapun penyesuaian target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 tercantum pada tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1
Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Keterangan
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,69	4,64	4,66 – 5,16	4,66 – 5,16	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,89	3,74	3,42 – 3,73	3,42 – 3,73	
3	Rasio Gini	Poin	0,404	0,363	0,386 – 0,399	0,356 – 0,369	Capaian Tahun 2024 telah melampaui target Tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2025
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,38	69,98	70,27	70,27	
5	Tingkat Kemiskinan	%	10,28	10,23	8,65 - 9,55	8,65 - 9,55	
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK Kumulatif	Ton CO ₂ Eq	N/A	N/A	621.707,06	621.707,06	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Selain penetapan proyeksi Indikator Makro, ditetapkan pula indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025			Keterangan
			2023	2024	RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	Indeks Pendidikan	Poin	61,62	61,68	60,62	62,73	61,88	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
2	Indeks Kesehatan	Poin	82,88	83,17	77,45	83,58	83,38	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
3	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	68,22	70,21	68,08	68,65	71,11	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
4	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	35,82	41,42	22,82	39,32	41,45	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,47	87,64	87,02	87,82	87,82	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025			Keterangan
			2023	2024	RPJMD	RKPD	P-RKPD	
								penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
6	Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	575 (Menuju Madya)	595* (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)	
7	Nilai LPPD	Skor	3,38* (Sedang)	3,40* (Sedang)	3,42 (Sedang)	3,42 (Sedang)	3,42 (Sedang)	
8	Nilai SAKIP	Skor	64,20 (B)	64,80 (B)	71 (BB)	64,30 (B)	64,85 (B)	Terdapat perubahan metode penilaian pada salah satu komponen SAKIP, sehingga dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,72	82,48	80,30 (Baik)	81,80 (Baik)	82,50 (Baik)	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	70,144	84,007	70,50	70,50	84,117	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
11	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	71,32	80,02	61	72,30	80,07	Capaian tahun 2024 telah melampaui target 2025 pada RPJMD, sehingga dilakukan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025			Keterangan
			2023	2024	RPJMD	RKPD	P-RKPD	
								penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
12	Indeks Inovasi Daerah	Skor	43,12 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)	55 (Inovatif)	52 (Inovatif)	49 (Inovatif)	Terdapat perubahan metode perhitungan Indeks Inovasi Daerah, sehingga dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD
13	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta/Orang	24,17	25,92	29,14	26,40	26,10	Target 2025 pada RPJMD terlalu tinggi, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P
14	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	110,96	-48,85	5	5	2,50	Target 2025 pada RPJMD terlalu tinggi, sehingga dilakukan penyesuaian pada RKPD dan RKPD-P

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023-2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A.01	Pertumbuhan PDRB	%	4,69	4,64	4,66 – 5,16	4,66 – 5,16	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.02	Laju inflasi	%	2,84	1,94	2-3	2-3	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.03	PDRB per kapita	Rp. Juta	24,17	25,92	26,40	26,40	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.04	Indeks Gini	Poin	0,404	0,363	0,386 – 0,399	0,386 – 0,399	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.05	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	89,72	89,77	90,45 – 91,35	90,45 – 91,35	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.06	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	10,28	10,23	8,65 – 9,55	8,65 – 9,55	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.07	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,38	69,98	70,27	70,27	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.08	Angka melek huruf	%	99,95	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
A.09	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,96	7,97	8,08	8,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A.10	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,87	74,06	74.39	74.39	Dinas Kesehatan
A.11	Persentase balita gizi buruk	%	0,41	0,41	0,6	0,6	Dinas Kesehatan
A.12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,37	68,76	80,49	80,49	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.13	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,89	3,74	3,59	3,42 – 3,73	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,72	82,48	81,80	81,80	Sekretariat Daerah
			Baik	Baik	Baik	Baik	
A.15	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,49	10,07	11,01	11,01	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
A.16	Opini BPK atas Laporan Pengelola Keuangan Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
A.17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,00	88,45	84,15	84,15	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.18	Penguatan cadangan pangan	Ton	N/A	38,00	100	100	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
A.19	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	37,77	36,81	38,63	38,63	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.20	Produksi sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Ton	1.023.024	991,77	1.301.255	1.301.255	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.21	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	0,21	0,21	0,17	0,17	Badan Pusat Statistik
A.22	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,46	18,00	17,82	17,82	Badan Pusat Statistik
A.23	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,98	8,33	8,36	8,36	Badan Pusat Statistik
A.24	Pertumbuhan Industri	%	1,5	1,9	1,2	1,9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
B.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	8.562	8.965	8.179	8.179	BPS Kabupaten Tasikmalaya
B.02	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR	%	80,28	91,21	86,52	86,52	Sekretariat Daerah
C. ASPEK PELAYANAN UMUM							
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
1	Pendidikan						
C.1.01.01	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,64	12,66	12,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.02	APK PAUD	%	79,60	79,60	79,6	79,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.03	APK SD	%	100,25	101,14	100.04	100.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.04	APM SD	%	95,55	95,76	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.05	APK SMP	%	100,86	101,35	101.34	101.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.06	APM SMP	%	86,89	84,27	94.05	94.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.07	Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP	%	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.08	Persentase PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	%	67,08	72,08	77,08	77,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.01.09	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Literasi) memenuhi kompetisi minimum	%	58,7	59,2	59,7	59,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.10	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetisi minimum	%	27,25	27,5	27,75	27,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.11	Rasio Guru terhadap Siswa SD	Perbandingan	01:25	01:26	01:27	01:27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.12	Rasio Guru terhadap Siswa SMP	Perbandingan	01:20	01:22	01:23	01:23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.13	Persentase angka putus sekolah jenjang SD	%	4	3	0.00002	0.00002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.14	Persentase angka putus sekolah jenjang SMP	%	13	11	0.00009	0.00009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.15	Persentase siswa SD berasal dari PAUD	%	70	72	74	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.16	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3.25	3,5	3.7	3.7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.17	Persentase Lulusan Pendidikan Kesetaraan	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.01.18	Persentase Lulusan Pendidikan Kursus dan Keterampilan	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.19	Persentase Pendidik berkualifikasi minimal S1 bersertifikat pendidik	Persen	57,18	59,18	61,18	61,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.20	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat kepala sekolah	Persen	98	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.21	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	99,66	99,88	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.22	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	82,18	82,24	82,3	82,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.23	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.24	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.01.25	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	%	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.26	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	98,42	99,53	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan						
C.1.02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	262	264	3	3	Dinas Kesehatan
C.1.02.02	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran Hidup	Orang	36	40	80	80	Dinas Kesehatan
C.1.02.03	Prosentase Keluarga Sehat	%	39,67	54,31	78	78	Dinas Kesehatan
C.1.02.04	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	8	7	2	2	Dinas Kesehatan
C.1.02.05	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	Orang	7	6	1	1	Dinas Kesehatan
C.1.02.06	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran Hidup	Orang	240	236	2	2	Dinas Kesehatan
C.1.02.07	Prosentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	99,57	97,10	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.02.08	Prosentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	94,78	99,10	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.09	Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,32	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.10	Prosentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,34	98,22	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.11	Presentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,17	97,30	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.12	Presentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	87,40	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.13	Presentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	87,40	95,54	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.14	Prevalensi stunting	%	10,72	9,29	12,25	12,25	Dinas Kesehatan
C.1.02.15	Presentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)	%	0,41	0,41	0,6	0,6	Dinas Kesehatan
C.1.02.16	Presentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.02.17	Prosentase Ibu hamil Kurang Gizi mendapatkan makanan tambahan padat gizi	%	44,70	77,36	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.18	Prosentase Balita Kurang Gizi mendapatkan makanan tambahan padat gizi	%	38,76	72,90	89,5	89,5	Dinas Kesehatan
C.1.02.19	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	68,50	75,30	61,3	61,3	Dinas Kesehatan
C.1.02.20	Jumlah Kader posyandu, KPM, PKK Mampu konseling PMBA	Orang	11570	12145	252	252	Dinas Kesehatan
C.1.02.21	Prosentase Ibu Hamil mengkonsumsi Tablet Tambah darah dan suplemen gizi	%	86,29	92,80	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.22	Prosentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah darah dan suplemen gizi	%	15,56	14,56	65	65	Dinas Kesehatan
C.1.02.23	Prosentase Masyarakat konsumsi garam berodium	%	89,69	96,00	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.24	Prosentase Bayi mendapatkan Asi Eksklusif	%	89,30	82,30	80	80	Dinas Kesehatan
C.1.02.25	Prosentase Konvergensi penanganan stunting	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.26	Presentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	112,12	92,37	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.02.27	Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	70	92,84	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.28	Prosentase Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	82,57	-42,45	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.29	Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	%	100	97,20	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.30	Presentase penderita Diabet Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,40	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.31	Presentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan	%	87,23	94,83	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.32	Prosentase Desa Siaga Aktif	%	69,23	69,23	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.33	Prosentase kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%	%	44,49	48,21	57,2	57,2	Dinas Kesehatan
C.1.02.34	Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100 %	%	0	9,79	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.35	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)		1/47.676	1/49.901	1/45.079	1/45.079	Dinas Kesehatan
C.1.02.36	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk (1 : 10.000)	Perbandingan	1/12.394	1/12.097	1/11.782	1/11.782	Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.02.37	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (1 : 100.000)	Perbandingan	1/979.111	1/665.353	5.11	5.11	Dinas Kesehatan
C.1.02.38	Rasio Klinik per satuan penduduk	Perbandingan	1/32.637	1/26.974	1/28.606	1/28.606	Dinas Kesehatan
C.1.02.39	Pembangunan Rumah Sakit Type D/RS Pratama Cikatomas	Gedung	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
C.1.02.40	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjya, Karangnunggal	Gedung	0	0	3	3	Dinas Kesehatan
C.1.02.41	Cakupan pembiayaan peserta JKN yang dibiayai pemerintah kabupaten Tasikmalaya	%	13,13	13,72	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.42	Cakupan pembiayaan kesehatan rujukan jamkesmas yang dibiayai pemerintah kabupaten Tasikmalaya	%	15,10	1,52	85	85	Dinas Kesehatan
C.1.02.43	Cakupan pembiayaan jampersal	%	76,45	84,08	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.44	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	%	9.91 : 100.000	15.48 : 100.000	0.09	0.09	Dinas Kesehatan
C.1.02.45	Prosentase Pemenuhan Obat dan Vaksin di Pelayanan Dasar	%	57,50	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.46	Hasil Penilaian SAKIP		BB	BB	A	A	Dinas Kesehatan
C.1.02.47	Opini Audit Akuntan Publik Independent	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.02.48	Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan profesional sesuai standar	%	95,86	95,88	97	97	Dinas Kesehatan
C.1.02.49	Cakupan Mutu Pelayanan	%	79,74	90,04	96	96	Dinas Kesehatan
C.1.02.50	Cakupan Mutu Pelayanan Keperawatan	%	93,26	93,13	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.51	Cakupan Mutu Penunjang Klinik	%	97,94	98,65	94	94	Dinas Kesehatan
C.1.02.52	Cakupan Mutu Penunjang Non Klinik	%	93,83	97,46	94	94	Dinas Kesehatan
C.1.02.53	Cakupan Alat dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	82,78	83,86	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.54	Cakupan Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	%	82,30	82,30	87	87	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
C.1.03.01	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,99	70,45	70,92	70,92	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.03.02	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,566	0,568	0,593	0,593	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.03	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	%	59,08	62,39	66,73	66,73	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.04	Ketaatan terhadap RTRW	%	26,61	26,62	41,16	19,33	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.03.05	Persentase penduduk berakses air minum	%	66,44	66,93	67,42	67,43	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.06	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	50,43	50,69	50,73	50,73	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
C.1.04.01	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,2541	0,2546	0,2547	0,2553	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
							dan Lingkungan Hidup
C.1.04.02	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	%	52,18	52,28	52,49	52,49	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
C.1.05.01	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	99,36	99,64	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
C.1.05.02	Indeks Risiko Bencana	%	159,14	145,50	174,11	142,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
C.1.05.03	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kebencanaan	%	0,58	0,64	0,84	0,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.06.01	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.02	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial	%	0,57	0,57	0,57	0,57	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.03	Persentase PPKS yang tertangani	%	4,21	4,24	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.06.04	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.05	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	76,66	81,60	68,3	68,3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.06	Persentase PPKS yang termasuk dalam jenis layanan SPM yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.08	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.9	Persentase PSKS aktif	%	-	-	95,00	95,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.06.10	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	Tahun	-	-	1	1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.11	Nilai SAKIP Dinas	Poin	76,15	77,30	73,31	73,31	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.12	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	3.83	3.83	3.83	3.83	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.06.13	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Ruta/KPM	120.768	108.449	130,5	130,5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.14	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.15	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	%	90	90	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.1.06.16	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	%	-	-	5,6	5,6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja						
C.2.01.01	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	31,74	40,51	27,67	50,15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.02	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	13,67	15,41	6,25	15,41	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.03	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,37	68,76	80,49	80,49	Badan Pusat Statistik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.01.04	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,89	3,74	3,59	3,42 – 3,73	Badan Pusat Statistik
C.2.01.05	Rasio penduduk yang bekerja	%	59,96*	60,27*	60,87	60,87	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.06	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.07	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	34,2	34,2	79	79	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.02.01	Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah	%	100	100	12,45	12,45	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.02	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.03	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	-	-	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.02.04	Persentase perempuan yang memperoleh akses dan layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	100	0,13	0,13	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.05	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang terfasilitasi	%	100	100	80	80	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.06	Persentase ketersediaan data gender dan anak tingkat kabupaten	%	-	-	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.02.07	Persentase pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	100	100	68,72	68,72	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.08	Persentase lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang terfasilitasi	%	65	75*	80	80	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.09	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	61,52	64,32*	64,37	64,37	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.02.10	Skor capaian KLA		579,36	595*	615	615	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan						
C.2.03.01	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90	88,45	84,15	84,15	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.2.03.02	Penguatan cadangan pangan	Ton	N/A	38	100	100	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.2.03.03	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	%	96,36	98,28			Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
4	Pertanahan						
C.2.04.01	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Paket	4	4	1	1	Sekretariat Daerah
5	Lingkungan Hidup						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.05.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,73	65,51	67,6	67,6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.2.05.02	Persentase sampah yang terkelola	%	9,84	10,28	14,72	14,72	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
C.2.06.01	Persentase Rata – Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	89,59	96,68	95,85	96,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.02	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	98,57	99,83	98,4	98,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.06.03	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	60,48	86,40	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.04	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,33	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.05	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	-	-	85	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
C.2.07.01	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	64,95	82,9	34,47	82,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C.2.07.02	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0	1,99	0,57	1,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C.2.07.03	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	98,42	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.08.01	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,15	2,11	2,36	2,36	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.02	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	68,1	70,05	69,5	69,5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.03	Prosentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	%	9,92	7,2	12,1	12,1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.08.04	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	19	20,5	21	21	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.05	Prosentase pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	%	-	50	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.06	Jumlah Lembaga dan Pendidikan Institusi yang di bina	Lembaga	39	39	39	39	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.08.07	Prosentase Ketersediaan Data	%	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.08	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB	Gedung	11	16	2	2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.09	Prosentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	-	-	77	77	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
9	Perhubungan						
C.2.09.01	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	80,81	82,19	81,58	82,27	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
C.2.09.02	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	30,25	33,14	35	35	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
10	Komunikasi dan Informatika						
C.2.10.01	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	3,05	3,76	2,7	3,3	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
C.2.10.02	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Level	II	II	III	III	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
C.2.10.03	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	64,68	67,84	75	75	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
C.2.11.01	Volume usaha koperasi	Rp	362.350.540.276	505.539.811.287	510.595.209.399	510.595.209.399	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
							dan Perdagangan
C.2.11.02	Persentase Usaha Mikro	%	144,42	99,79	99,8	99,8	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.03	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	4	21	8	21	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.04	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	154.592	129,032	124,846	124,846	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.05	Persentase Koperasi Sehat	%	49,75*	51,47	53,14	53,14	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.11.06	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha Mikro	11*	13*	15	15	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
12	Penanaman Modal						
C.2.12.01	Nilai realisasi penanaman modal	Rp (juta)	446.296	228,279	170.148	228,279	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.02	IKM Pelayanan Perizinan	skor	86,91	89.02	86,3	86,3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.03	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	291	1537	142	142	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.12.04	Persentase Kenaikan nilai realisasi penanaman modal (%)	%	111	15,90	5	5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.05	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	231	428,17	5	5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
C.2.13.01	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	42,39	44,95	42	42	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
C.2.13.02	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	55,64	54,70	54	54	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
C.2.13.03	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	130	52	20	20	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.13.04	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	43,49	38*	40,00	40,00	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.05	Persentase wirausaha muda	%	20,56	21,04	21,09	21,09	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.06	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	24,06	24,5	25	25	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.07	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	23,78	21,2	21,25	21,25	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.08	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	59,7	56,34	47,36	47,36	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.09	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	47,29	37,03	40,00	40,00	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	22,54	23,04	33,33	33,33	Dinas Pariwisata

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
							Pemudaan Dan Olahraga
14	Statistik						
C.2.14.01	Persentase ketersediaan data statistik sektoral untuk tiap bidang urusan pemerintahan	%	90	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15	Persandian						
C.2.15.01	Cakupan tingkat keamanan informasi	%	70*	80*	90	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
16	Kebudayaan						
C.2.16.01	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	2	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.02	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	0	1	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.03	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	6	10	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.16.04	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	5	4	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.05	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	44	47	43	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.06	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	35,82	41,42	25,68	41,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan						
C.2.17.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	55,9	72,15	64,95	72,20	Sekretariat Daerah
C.2.17.02	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	52,48	78	24,5	24,5	Sekretariat Daerah
C.2.17.03	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,2568	0,05	0,475	0,475	Sekretariat Daerah
C.2.17.04	Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1	1	0,284	0,284	Sekretariat Daerah
C.2.17.05	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,0629	1	0,00095	0,00095	Sekretariat Daerah
C.2.17.06	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	TMB	81	97	21 TBM	21 TBM	Sekretariat Daerah
C.2.17.07	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Paket	4	0	1	1	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.2.17.08	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Koleksi	50	50	1	1	Sekretariat Daerah
18	Kearsipan						
C.2.18.01	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	Persen	20,33	32,20	20,33	50,85	Sekretariat Daerah
			(12/59)	(19/59)	(12/59)	(30/59)	
C.2.18.02	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	48,28	48,28	38,91	38,91	Sekretariat Daerah
C.2.18.03	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	38,33	39,16	60	60	Sekretariat Daerah
C.2.18.04	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	12/59 (20,33%)	19/59 (32,20%)	12/59 (20,33%)	30/39 (50,85%)	Sekretariat Daerah
3. Urusan Pemerintahan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan						

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.3.01.01	Produksi perikanan	Ton	83.748	84.623,33	87.503,12	87.503,12	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.02	Konsumsi ikan	Ton	38,43	33*	35,5	35,5	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.03	Cakupan bina kelompok nelayan	Kel	92	102	110	110	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.04	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	1.282,29	1.285,28	1849,21	1849,21	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.05	Nilai tukar nelayan	indeks	-	-	112	112	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.06	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	ton	84,62	83.338,05	89.467,55	89.467,55	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
2	Pariwisata						
C.3.02.01	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	11.668.515.299	12.372.290.170	7.091.043.000	7.091.043.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.02	Persentase peningkatan keanekaragaman produk ekonomi kreatif	%	2,5	3,7	4,7	4,7	Dinas Pariwisata,

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
							Pemuda dan Olahraga
C.3.02.03	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	783.115	1.031.163	1,631,216	1,631,216	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.04	Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang Telah Dikembangkan	Unit	3	3	8	8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.05	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	1.169.248.500	1.169248.500	2.488.141.294	2.488.141.294	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.06	Tingkat hunian akomodasi	%	7,49	17,37	13	13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.07	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar	%	N/A	N/A	6	6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.08	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	N/A	N/A	8,93	8,93	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.3.02.09	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	2,03	2,79	3,12	3,12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.10	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	91,34	62,77	20	20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.11	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	26,2	31,33	5	5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Pertanian						
C.3.03.01	Persentase izin usaha pertanian	rekomendasi	-	-	5	5	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.03.02	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	68,56	68,37	1.362.377	1.362.377	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.3.03.03	Meningkatnya penyuluhan pertanian	%	80,32	93,38	56,82	56,82	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.04	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Ton	753,06	724,43	984.845	984.845	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.05	Meningkatnya Produksi Hortikultura	Ton	269.968	267.341	198.089	198.089	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.06	Meningkatnya Produksi perkebunan	Ton	65.238	57.550	47,123	47,123	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.07	Meningkatnya Produksi peternakan	Ton	79.111,49	75.388,12	71.198	71.198	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral						
C.3.04.01	Persentase perizinan yang terfasilitasi	%	N/A	N/A	100	100	Sekretariat Daerah
5	Perdagangan						
C.3.05.01	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	12,8	10,66	1	11	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.02	PDRB Sektor Perdagangan	Rp juta	8.507.691	8.959.520	8.671.420	8.671.420	BPS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.3.05.03	Ekspor Bersih Perdagangan	\$	2.821.357,70*	2.877.784,85*	2.935.340,55	2.935.340,55	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.04	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	2*	2*	2	2	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.05	Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap lainnya (UTTP)	Unit	9.587*	10.067*	10,57	10,57	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
6	Perindustrian						
C.3.06.01	Pertumbuhan Industri	%	1,5	1,9	1,2	1,9	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.06.02	PDRB Sektor Industri	%	3.676.746	4.146.390	3.650.797	3.650.797	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.3.06.03	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	3,29*	3,76*	4,23	4,23	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.06.04	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	100	100	100	100	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
7	Transmigrasi						
C.3.07.01	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK	0	0	5	5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.3.07.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	0	0	3	3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4. Unsur Penunjang							
1	Sekretariat Daerah						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.4.01.01	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
C.4.01.02	Level kematangan/ maturitas pengadaan barang dan jasa	Level	8	9	8	9	Sekretariat Daerah
C.4.01.03	Persentase bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
C.4.01.04	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
C.4.01.05	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD						
C.4.02.01	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	%	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5. Unsur Pendukung							
1	Perencanaan						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.5.01.01	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Point	21,80	21,87	24,95	21,90	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Keuangan						
C.5.02.01	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.02	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	84,68	82,95	89	89	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.03	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	3,97	6,23	5,24	5,24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.04	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,49	10,07	11,01	11,01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
C.5.02.06	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,03	1,02	1,94	1,94	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.07	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.08	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,52	63,66	62	62	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.09	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	8,293	7,281	4,39	4,39	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.10	Rasio PAD	%	9,49	10,07	1,41	1,41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.11	Opini Laporan Keuangan	Interpretasi	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
							Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.12	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,513	2,716	13,34	13,34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.13	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	13,827	5,596	7,71	7,71	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.14	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.15	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,088	1,043	1,38	1,38	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.16	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,74	0,84	1,41	1,41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
							Pendapatan Daerah
C.5.02.17	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,23	0,24	0,0028	0,0028	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
3	Kepegawaian						
C.5.03.01	Indeks Sistem Merit	Poin	284,5	313	357,5	357,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Penelitian dan Pengembangan						
C.5.04.01	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	43,12	47,59	52	49	Badan Perncaaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
C.5.04.02	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	100	100	100	100	Badan Perncaaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi		Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2024	RKPD	P-RKPD	
							Pengembangan Daerah
6. Unsur Pengawasan							
1	Pengawasan						
C.6.01.01	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	89,19	90,29	86	92	Inspektorat Daerah
C.6.01.02	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	3	3	3	3	Inspektorat Daerah

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2025

BAB



PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 pada prinsipnya masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/islami, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA